



wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

LPPD 2024

LAPORAN
PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah selesai disusun dan disampaikan secara tepat waktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD dimaknai sebagai laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintahan Daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kami berharap bahwa melalui penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, akan tersedia suatu pandangan yang terperinci mengenai berbagai tugas yang telah kami kerjakan selama tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo.

Meskipun demikian, kami mengakui bahwa tidak ada yang sempurna, dan dengan itu kami paham bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas kami sepanjang tahun 2024. Kami berkomitmen untuk terus berusaha melakukan perbaikan di tahun-tahun mendatang. Kami berdoa agar Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Wonosobo, Maret 2025

BUPATI WONOSOBO



H. AFIF NURHIDAYAT, S. Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	4
B. Data Geografis Wilayah	4
C. Jumlah Penduduk	13
D. Jumlah Kecamatan, Desa Kelurahan	14
E. Rincian Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	15
F. Rincian ASN Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	30
G. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	35
H. Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan	37
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	52
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	52
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	67
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	74
E. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	91
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	101
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	121
2.1 Capaian Kinerja Makro	121
A. Indeks Pembangunan Manusia	121
B. Angka Kemiskinan	129
C. Angka Pengangguran	133
D. Pertumbuhan Ekonomi	133
E. Pendapatan Perkapita	134
F. Ketimpangan Pendapatan	135
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	137
A. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	137
B. Indikator Kinerja Kunci Hasil	138
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	172
2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	173
2.3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024	179

2.3.3. Realisasi Anggaran per Misi Daerah	242
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	257
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	260
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	260
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	269
4.3 Bidang Urusan Urusan Pekerjaan Umum	299
4.4 Bidang Urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	309
4.5 Bidang Urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	315
4.6 Bidang Urusan Urusan Sosial	327
4.7 Program dan Kegiatan	341
BAB V PENUTUP	350

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.1.	Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo	5
Tabel I.1.2.	Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo	6
Tabel I.1.3.	Morfologi Kabupaten Wonosobo	9
Tabel I.1.4.	Statigrafi Kabupaten Wonosobo	10
Tabel I.1.5.	Bendung, Sungai, dan Daerah Irigasi Kabupaten Wonosobo	12
Tabel I.1.6.	Data Penduduk Wonosobo Tahun 2024 Berdasarkan Pencatatan Administratif Kependudukan	14
Tabel I.1.7.	Jumlah Desa dan Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo	14
Tabel I.1.8.	Rincian Perangkat Daerah dan UPTD Serta Dasar Hukum Pembentukan di Kabupaten Wonosobo	15
Tabel I.1.9.	Rincian ASN Berdasarkan Urusan dan Fungsi di Kabupaten Wonosobo	30
Tabel I.1.10.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo	35
Tabel I.1.11.	Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah	36
Tabel I.1.12.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja	37
Tabel I.1.13.	Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023 dan 2024	59
Tabel I.1.14.	Ketimpangan antar Kelompok dengan Kriteria Ketimpangan Versi Bank Dunia Tahun 2024	61
Tabel I.1.15.	Keselarasan Misi RPJMN dengan Misi RPJMD Wonosobo Tahun 2021-2026	68
Tabel I.1.16.	Keselarasan Antara Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021	68
Tabel I.1.17.	Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 Dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026	71
Tabel I.1.18.	Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2011-2031 dengan Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026	72
Tabel I.1.19.	Keselarasan Antara PN RKP 2024 dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	73
Tabel 2.1.1.	Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	121
Tabel 2.1.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Menurut Komponen Tahun 2021-2024	123
Tabel 2.1.3.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Karisidenan Kedu Tahun 2021-2024	123
Tabel 2.1.4.	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karisidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024	125
Tabel 2.1.5.	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024	126

Tabel 2.1.6.	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024	127
Tabel 2.1.7.	Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	129
Tabel 2.1.8.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024 (Ribu Jiwa)	130
Tabel 2.1.9.	Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	130
Tabel 2.1.10.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024	131
Tabel 2.1.11.	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021-2024	131
Tabel 2.1.12.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	132
Tabel 2.1.13.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	133
Tabel 2.1.14.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	133
Tabel 2.1.15.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo ADHB Menurut Pengeluaran 2021-2024 (Persen)	134
Tabel 2.1.16.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Wonosobo (Persen), 2023 dan 2024	136
Tabel 2.2.1.	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	138
Tabel 2.2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	150
Tabel 2.2.3.	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	161
Tabel 2.2.4.	Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	166
Tabel 2.3.1.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo	173
Tabel 2.3.2.	Program dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024	175
Tabel 2.3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	180
Tabel 2.3.4.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	184
Tabel 2.3.5.	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	185
Tabel 2.3.6.	Daftar IPKD Tahun 2024 Kluster Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah "Rendah" di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	189
Tabel 2.3.7.	Nilai SAKIP Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	192
Tabel 2.3.8.	Indeks Merit Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	197
Tabel 2.3.9.	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	199
Tabel 2.3.10.	Nilai Indeks Ketahanan Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2024	240

Tabel 4.1.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024	260
Tabel 4.1.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024	264
Tabel 4.1.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	264
Tabel 4.1.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	264
Tabel 4.1.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Pendidikan Tahun 2024	267
Tabel 4.1.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	268
Tabel 4.2.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024	269
Tabel 4.2.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024	280
Tabel 4.2.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	280
Tabel 4.2.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	282
Tabel 4.2.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Kesehatan Tahun 2024	297
Tabel 4.2.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	298
Tabel 4.3.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	299
Tabel 4.3.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	303
Tabel 4.3.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	304
Tabel 4.3.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	304
Tabel 4.3.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	308
Tabel 4.3.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2024	309
Tabel 4.4.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	309
Tabel 4.4.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	310
Tabel 4.4.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	311
Tabel 4.4.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	311
Tabel 4.4.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	313
Tabel 4.4.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	314
Tabel 4.5.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024	315
Tabel 4.5.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024	320
Tabel 4.5.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas	

	Tahun 2024	320
Tabel 4.5.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024	321
Tabel 4.5.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024	325
Tabel 4.5.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024	326
Tabel 4.6.1.	Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024	327
Tabel 4.6.2.	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024	332
Tabel 4.6.3.	Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024	333
Tabel 4.6.4.	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024	335
Tabel 4.6.5.	Indeks Pencapaian (IP) Urusan Sosial Tahun 2024	340
Tabel 4.6.6.	Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024	341
Tabel 4.7.1.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	341
Tabel 4.7.2.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	342
Tabel 4.7.3.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	345
Tabel 4.7.4.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024	346
Tabel 4.7.5.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas	347
Tabel 4.7.6.	Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024	349

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo	5
Gambar 1.1.2	Peta Topografi Kabupaten Wonosobo	8
Gambar 1.1.3	Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Wonosobo	91
Gambar 2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	122
Gambar 2.2	Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	124
Gambar 2.3	Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	125
Gambar 2.4	Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	127
Gambar 2.5	Indek Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2021	128
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	134
Gambar 2.7	Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	136
Gambar 2.3.1	Trend Nilai IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024	189
Gambar 2.3.2	Trend Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo 2020-2024	192
Gambar 2.3.3	Trend Indeks Merit Kabupaten Wonosobo 2021-2024	196

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

I. PEMBENTUKAN DAERAH

Kabupaten Wonosobo dibentuk bersama 27 kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

II. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);

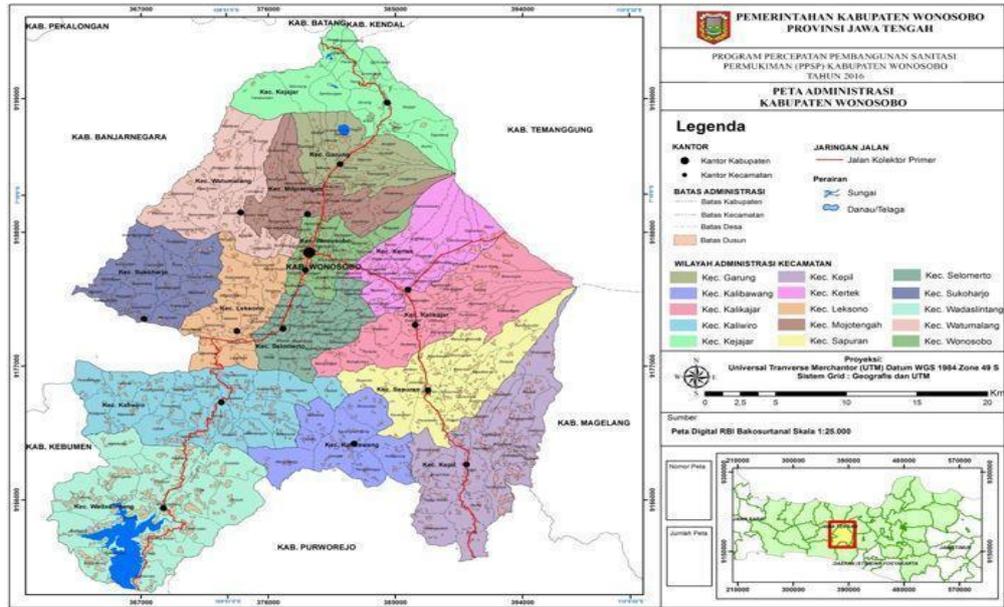
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

I. Batas Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Wonosobo adalah 98.468 ha (984,68 km²) atau 3,03 % dari luas Jawa Tengah. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berbatasan dengan kabupaten tetangga, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Batang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Magelang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Purworejo sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen.

Gambar 1.1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Wonosobo



(Sumber: Satu Data Wonosobo 2024)

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Wonosobo berada pada 70.11'.13" dan 70.36'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43'.19" dan 1100.04'.40" garis Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Wonosobo berada di tengah wilayah Jawa Tengah, bahkan berada pada tengahnya Pulau Jawa. Wilayah Wonosobo dilintasi jalur tengah. Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah jalur transit dan penghubung antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cilacap dan PKN Semarang. Dilalui jalur penghubung PKN Cilacap-PKN Semarang dan PKN Yogyakarta serta koridor KSPN Borobudur-Dieng. Kondisi ini juga menunjukkan adanya letak strategis ekonomi yang harus ditangkap peluangnya sebagai jalur yang dilalui tersebut.

II. Luas Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 236 desa dan 29 kelurahan.

Tabel 1.1.1
Pembagian Wilayah Kabupaten Wonosobo

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
1	Wonosobo	3.238	3,29	7	13	20
2	Kertek	6.214	6,31	19	2	21
3	Selomerto	3.971	4,03	22	2	24
4	Leksono	4.407	4,48	13	1	14
5	Garung	5.122	5,20	14	1	15
6	Mojotengah	4.507	4,58	16	3	19

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Desa dan Kelurahan
7	Kejajar	5.762	5,85	15	1	16
8	Watumalang	6.823	6,93	15	1	16
9	Sapuran	7.772	7,89	16	1	17
10	Kalikajar	8.330	8,46	18	1	19
11	Kepil	9.387	9,53	20	1	21
12	Kaliwiro	10.008	10,16	20	1	21
13	Wadaslintang	12.716	12,91	16	1	17
14	Sukoharjo	5.429	5,51	17	-	17
15	Kalibawang	4.782	4,86	8	-	8
Jumlah		98.468	100,00	236	29	265

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

III. Topografi

Ditinjau dari aspek topografi, wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ciri yang berbukit dan bergunung, terletak pada ketinggian antara 200 sampai 2.250 m di atas permukaan laut. Kelerengan merupakan suatu kemiringan tanah dimana sudut kemiringan dibentuk oleh permukaan tanah dengan bidang horizontal dan dinyatakan dalam persen. Kabupaten Wonosobo dibagi menjadi 7 wilayah kemiringan, yaitu:

Tabel 1.1.2
Persebaran Kemiringan Lereng di Kabupaten Wonosobo

No	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Wilayah
1.	0 - 2 %	1.052,263	Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Kertek (1,04 % dari luas seluruh wilayah)
2.	2 - 5 %	22.969,500	Terdapat di 13 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang dan Kecamatan Kalibawang (22,89 % dari luas seluruh wilayah)
3.	5 - 8 %	8.143,769	Tersebar merata di 14 Kecamatan selain Kecamatan Watumalang (8,11% dari luas seluruh wilayah)
4.	8 – 15 %	55.434,850	Semua kecamatan (55,2% dari luas seluruh wilayah)
5.	15 – 25 %	11.101,600	Semua kecamatan kecuali Kecamatan Wonosobo (11,06% dari luas seluruh wilayah)
6.	25 – 40 %	1.479,631	Kecamatan Kejajar, Garung dan Kalikajar (1,47% dari luas seluruh wilayah)
7.	>40 %	142.362	Kecamatan Kejajar (0,14% dari luas seluruh wilayah)

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

Variasi kemiringan lereng di Kabupaten Wonosobo memberikan dampak positif bagi pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpu pada alam seperti sektor pariwisata, pertanian dan perkembangan. Sedangkan dampak negatifnya dalam hal pengembangan wilayah dan potensi bencana alam gerakan tanah/ tanah longsor.

IV. Struktur Geologi

Berdasarkan pembagian zona fisiografi Pulau Jawa oleh Van Bemmelen (1949), Wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuartar. Endapan gunung api kuartar masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Secara fisiografi Wonosobo terletak pada ujung timur Depresi Serayu yang terbentuk oleh proses orogenesis dan epirogenesa, kemudian diikuti oleh kegiatan vulkanisme dan denudasional yang cepat. Di sebelah timur Depresi Serayu dibatasi oleh Gunung Sumbing dan Sindoro yang terbentuk pada zaman Kuartar ($\pm 1,8$ juta tahun yang lain), rangkaian gunung api tersebut terus berlanjut dan bersambung dengan kompleks gunung api Dieng dan Rogojembangan.

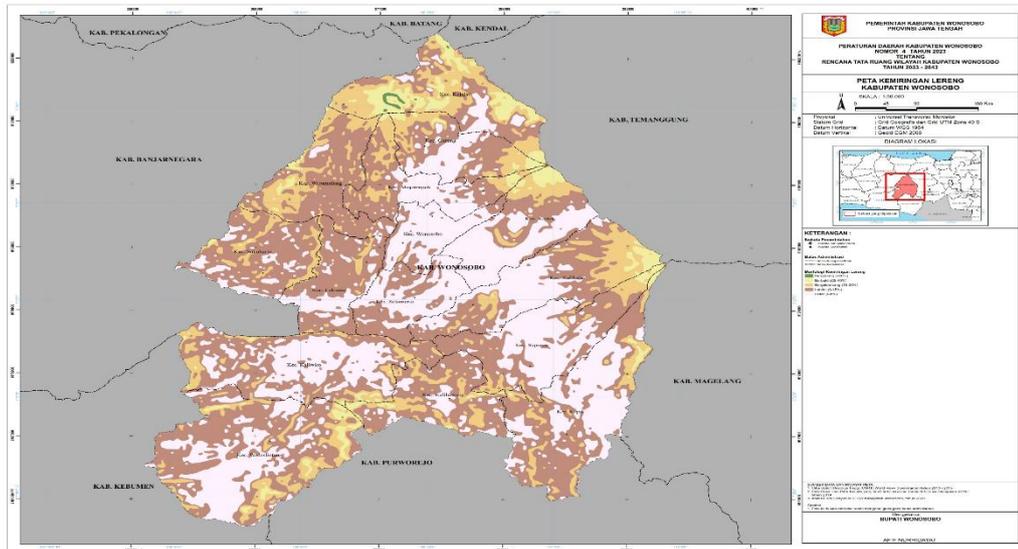
Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda, tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Komoditi utama pertanian yang dihasilkan adalah teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi. Selain itu, juga cocok untuk pengembangan budidaya Jamur, Carica Papaya dan Asparagus dan beberapa jenis kayu yang merupakan komoditi ekspor non migas serta beberapa jenis tanaman yang merupakan tanaman khas Kabupaten Wonosobo seperti Purwaceng, Gondorukem dan kayu putih.

Di Kawasan Dieng banyak dijumpai depresi yang terbentuk oleh pusat erupsi vulkanik pada zaman Pleistocene yang kemudian terisi oleh endapan dan sisa tumbuhan. Di samping itu terdapat hulu sungai serayu dengan anak sungai yang berada di bagian selatan, yakni di ujung timur Pegunungan Serayu Selatan yang dibatasi oleh Zona Patahan. Banyaknya gunung di Wonosobo juga menjadi sumber mata air yang mengalir ke sungai Serayu, Bogowonto, Kali Galuh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Sungai-sungai ini sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai Serayu yang menambah debit air di telaga Menjer telah dapat dimanfaatkan akhirnya untuk membangkitkan listrik tenaga air. Yang tidak kalah penting dari Kabupaten Wonosobo adalah potensi wisata Dataran Tinggi Dieng (*Dieng Plateau*) dengan panas bumi (yang telah dimanfaatkan sebagai PLTU), kawah dan panorama yang indah. Selain itu, juga terdapat candi-candi peninggalan Kerajaan Mataram Hindu.

Semuanya itu adalah daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke Wonosobo (pemanfaatan panas bumi Dieng).

Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta topografi dapat dilihat pada Gambar 1.1.2.

Gambar 1.1.2
Peta Topografi Kabupaten Wonosobo



Sumber: RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2049

Secara geomorfologi, bentang lahan di Kabupaten Wonosobo, didominasi oleh bentang lahan bentukan dari proses vulkanik. Bentang lahan lainnya berasal dari bentukan denudasional, bentang lahan struktural, bentang lahan fluvial (aliran sungai). Bentuk bentang lahan proses vulkanik yang ada yaitu kubah lava, kerucut gunung api, lereng gunung api, kaki gunung api, perbukitan intrusif batuan gunung api, pegunungan medan lava, perbukitan medan lava, kaldera, danau kaldera, lembah antar gunung api material piroklastik, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2. Konsekuensinya dengan bentang lahan yang didominasi oleh vulkanik, menjadikan wilayah Kabupaten Wonosobo mempunyai topografi yang dominan tidak datar. Hal ini tentunya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah perkembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Wonosobo. Pengembangan wilayah disesuaikan dengan bentukan lahan agar prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wilayah Kabupaten Wonosobo memiliki ketinggian antara 250 dpl – 2250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1000 dpl sebesar 50% dari seluruh area, menjadikan Kabupaten Wonosobo sebagai dataran tinggi dengan kondisi posisi pasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan. Kabupaten Wonosobo memiliki iklim tropis dengan dua musim dalam setahun yaitu musim kemarau dan musim hujan. Rata-rata suhu di Kabupaten Wonosobo adalah antara 14,3 – 26,5 derajat Celcius. Sementara curah hujan rata-rata per tahun berkisar

antara 1713-4255 mm/tahun. Oleh karena itu, Kabupaten Wonosobo termasuk dalam wilayah yang subur sehingga cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Secara geologis, wilayah Kabupaten Wonosobo termasuk dalam jalur fisiografi Pegunungan Serayu Selatan Bagian Utara dan menempati bagian tengah zona fisiografi tersebut. Zona ini didominasi oleh endapan gunung api kuarter. Endapan gunung api kuarter ini masih dapat diamati kenampakan kerucut vulkaniknya seperti Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, sedangkan di bagian lain gunung api Dieng yang berumur lebih tua meninggalkan sisa erupsi yang membentuk plateau (dataran tinggi). Sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda Kabupaten Wonosobo termasuk daerah yang subur. Hal ini sangat mendukung perkembangan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat dengan komoditi utama seperti teh, tembakau, berbagai jenis sayuran dan kopi.

Penggunaan lahan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 meliputi lahan sawah sebesar 12.714,84 Ha (12,54%) dan bukan lahan sawah 88.599,23 Ha (87,46%). Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043, peruntukan lahan di Kabupaten Wonosobo dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya. Peruntukan kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya. Sementara itu, kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, peternakan, permukiman seluas 86.499,42 Ha.

Kondisi dan karakteristik wilayah Kabupaten Wonosobo cukup kompleks baik dilihat dari aspek geografis, geologis, hidrologis maupun meteorologis, memiliki potensi dan sumber kekayaan alam yang melimpah.

V. Morfologi

Berdasarkan hasil analisis menggunakan peta citra terbaru, terdapat 7 (tujuh) jenis morfologi di Kabupaten Wonosobo, yaitu datar, bergelombang, berombak, cekung, perbukitan, pegunungan, dan pegunungan curam.

Tabel 1.1.3
Morfologi Kabupaten Wonosobo

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
1	Datar	Garung, Wadaslintang	1.159,71	1,14%
2	Bergelombang	Garung, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Selomerto, Watumalang, Wonosobo	8.715,93	8,60%
3	Berombak	Kaliwiro, Wadaslintang	98,46	0,10%
4	Cekung	Kejajar	359,8	0,36%
5	Perbukitan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono,	35.896,72	35,44%

No	Morfologi	Persebaran Kecamatan	Luas (Ha)	%
		Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo		
6	Pegunungan	Garung, Kalibawang, Kalikajar, Kaliwiro, Kepil, Kertek, Leksono, Mojotengah, Sapuran, Selomerto, Sukoharjo, Wadaslintang, Watumalang, Wonosobo	54,735,78	54,04%
7	Pegunungan Curam	Garung, Kalikajar, Kejajar, Kertek, Mojotengah, Sapuran	327,10	0,32%
Jumlah			101.293,51	100,00%

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

Morfologi dengan bentuk pegunungan memiliki luas paling besar, yaitu sekitar 54,04%. Diikuti oleh bentuk morfologi perbukitan sekitar 35,44% dan morfologi bergelombang dengan luas sekitar 8,60%. Adapun bentuk morfologi dengan luas terkecil adalah morfologi berombak yaitu sekitar 0,10% yang berada di Kecamatan Kaliwiro dan Kecamatan Wadaslintang.

VI. Stratigrafi

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Banjarnegara – Pekalongan skala 1:100.000 (W.H Condon, L. Pardyanto, K.B. Ketner, T.C. Amin, S. Gafoer dan H. Sampoerna, 1996), Pegunungan Serayu Utara dibentuk oleh batuan sedimen dengan terobosan batuan pada beberapa tempat, sedangkan Pegunungan Serayu Selatan didominasi oleh batuan melange/malihan yang merupakan Komplek Luk Ulo dan sedikit batuan sedimen dengan terobosan di beberapa tempat. Stratigrafi Wilayah Kabupaten Wonosobo terdiri atas 26 satuan batuan/formasi yang urutannya dari muda sampai ke tua adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.4
Stratigrafi Kabupaten Wonosobo

Simbol	Stratigrafi	Simbol	Stratigrafi
Qa	Aluvial	Ktm	Batu terbreksikan
Qla	Aluvial dan Endapan Danau	Qt2	Endapan undak
Tptl	Anggota Batugamping	Tmw3	Formasi Waturanda
QTlb	Anggota Breksi	Qtd	Formasi Damar
Tmrs	Anggota Sigugur	Tmph	Formasi Halang
Tmwt	Anggota Tufa	Tomk	Formasi Kebo Butak
Tmi 1	Batuan Beku Terobosan	Tpp1	Formasi Peniron
Tpd	Batuan Diorit	Tmp7	Formasi Penosogan
Qdm	Batuan Gunungapi Dieng	Tom T1	Formasi Totogan
Qjyf	Batuan Gunungapi Jembangan	Qf	Kipas Aluvial
Qsm	Batuan Gunung Api Sumbing	Kog	Mafik dan Ultramafik

Simbol	Stratigrafi	Simbol	Stratigrafi
Qsu 1	Batuan Gunung Api Sindoro	Qj	Morfoset Patuk Banteng-Jeding
Qsmo	Batuan Gunungapi Tua Sumbing	Teol	Reefal Limestone

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

VII. Hidrologi

Ditinjau dari aspek hidrologi, Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa sumber daya, antara lain:

a. Air Permukaan

Sumber daya air permukaan yang ada di Kabupaten Wonosobo meliputi:

1) Sungai

Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Wonosobo sebagian telah digunakan untuk irigasi, pertanian dan air minum. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu sumber mata air di gunung-gunung yang ada di sekitar Kabupaten Wonosobo. Nama-nama sungai tersebut adalah Sungai Serayu, Bogowonto, Kali Begaluh, Kali Semagung, Kali Sanggrahan dan Luk Ulo. Selain untuk kebutuhan irigasi, pertanian, dan air minum, ada manfaat lain dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Wonosobo, seperti Sungai Serayu yang mengalir ke Telaga Menjer dan arus airnya dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik tenaga air dan juga menjadi obyek pariwisata berupa wisata arung jeram yang diminati oleh wisatawan domestik maupun internasional.

Dengan adanya sungai-sungai di Kabupaten Wonosobo, potensi kegiatan sektoral yang berkaitan dengan perairan bisa dapat digali dan dikembangkan. Potensi di sektor pariwisata, sektor perikanan perairan air tawar, sektor energi, dan sektor-sektor lainnya jika dikembangkan dengan baik maka akan meningkatkan pendapatan daerah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah akan meningkat di beberapa sektor. Banyaknya sungai dan anak sungai di Kabupaten Wonosobo juga perlu dicermati kelestarian dan tingkat polusinya karena dengan jumlah sungai yang banyak maka akan semakin luas pula kawasan sempadan sungai di Kabupaten Wonosobo yang perlu dilindungi dan jika tidak dapat terlindungi dengan baik dikhawatirkan timbul dampak negatif bagi pemanfaatan ruang seperti banyaknya titik rawan longsor di sepanjang sungai dan anak sungai atau tingginya tingkat polusi di sungai akibat banyaknya limbah rumah tangga dan limbah industri dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.

2) Waduk dan Telaga

Selain sungai, sumberdaya air permukaan di Kabupaten Wonosobo adalah waduk. Terdapat satu waduk besar dan satu telaga di Kabupaten Wonosobo, yaitu Waduk Wadaslintang dan Telaga Menjer. Waduk Wadaslintang merupakan waduk di selatan Kabupaten Wonosobo dan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen. Dengan lokasi Waduk Wadaslintang yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen serta fungsi waduk yang berpengaruh terhadap dua kabupaten tersebut maka pengelolaan Waduk Wadaslintang secara bergantian setiap tahun akan dikelola oleh Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Telaga Menjer, Telaga Warna dan Telaga Cebong merupakan telaga yang berada di Kawasan Dieng. Telaga Menjer tidak hanya menjadi salah satu objek wisata di Kawasan Dieng, namun juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan bendungan dan disebut sebagai PLTA Garung.

3) Bendung

Terdapat 19 bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo yang terdapat di 13 sungai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1.5

Bendung, Sungai, dan Daerah Irigasi Kabupaten Wonosobo

Nama Bendung	Sungai	Daerah Irigasi
Wanganaji	Serayu	Wanganaji
Geblok	Serayu	Geblok
Mangli	Serayu	Mangli
Timbang	Serayu	Timbang
Tandu	Serayu	Tandu
Capar Jeruk	Capar	Capar Jeruk
Gintung	Gintung	Gintung
Kalimendong	Bleber	Kalimendong
Kalitulang	Kalitulang	Kalitulang
Banjaran	Preng	Banjaran
Muncar	Begaluh	Muncar
Klitih	Begaluh	Klitih
Mungkung	Begaluh	Mungkung
Karangsari	Begaluh Kecil	Karangsari
Pingit	Bogowonto	Pingit
Kedung Tumpeng	Medono	Kedung Tumpeng
Kedungupit	Begaluh	Kedungupit
Kembang	Begaluh	Kembang
Aji Pegedangan	Cecep	Aji Pegedangan

Sumber: Revisi RTRW Rekom BIG Kabupaten Wonosobo, 2019-2039

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa debit air di semua bendung melebihi dari debit kebutuhan air sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air yang dibebankan kepada bendung-bendung yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat memenuhi kebutuhan. Banyaknya bendung di Kabupaten Wonosobo berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik air untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di sekitar bendung sehingga mampu beban-beban listrik dapat dialokasikan untuk wilayah lain di Kabupaten Wonosobo.

b. Air Tanah

Sumber daya air tanah yang ada di Kabupaten Wonosobo dapat dibedakan menurut letaknya menjadi:

- 1) *Confined Aquifer*, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil. Di sekitar Dieng dan Gunung Sindoro banyak dijumpai *confined aquifer* yang airnya banyak mengandung mineral dan bersifat panas.
- 2) *Unconfined Aquifer*, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zona jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil.

Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Wonosobo terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan. Mata air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan irigasi desa, PDAM, dan air minum masyarakat. Pemanfaatan air tanah perlu diawasi dan dikendalikan karena berkaitan dengan volume cadangan air tanah yang jika tidak diimbangi dengan upaya perlindungan lokasi-lokasi imbuhan air maka volume air tanah akan semakin berkurang dan seiring waktu akan habis.

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 adalah 945.955 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 482.688 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 463.267 jiwa. Tingkat persentase jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosobo sebesar 10% atau 97.551 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo. Letak Kecamatan Wonosobo yang merupakan pusat ibukota Kabupaten Wonosobo menjadikan daya tarik sendiri untuk penduduk tinggal di Kecamatan Wonosobo. Sedangkan Kecamatan Kalibawang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil dengan tingkat persentase 3% atau 29.782 jiwa. Tabel 1.1.6 menjelaskan kondisi kependudukan Kabupaten Wonosobo per Desember Tahun 2024.

Tabel 1.1.6
Data Penduduk Wonosobo Tahun 2024 Berdasarkan Pencatatan Administratif
Kependudukan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Wadaslintang	33.339	32.587	65.926	7
2	Kepil	35.516	34.071	69.587	7
3	Sapuran	34.092	32.288	66.380	7
4	Kaliwiro	28.589	27.975	56.564	6
5	Leksono	24.818	24.346	49.164	5
6	Selomerto	29.012	28.522	57.534	6
7	Kalikajar	39.625	37.766	77.391	8
8	Kertek	49.430	47.546	96.976	10
9	Wonosobo	49.191	48.360	97.551	10
10	Watumalang	30.742	29.450	60.192	6
11	Mojotengah	36.760	34.320	71.080	7
12	Garung	31.670	29.579	61.249	6
13	Kejajar	25.459	23.744	49.203	5
14	Sukoharjo	19.176	18.200	37.376	4
15	Kalibawang	15.269	14.513	29.782	3
	Jumlah	482.688	463.267	945.955	100

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

D. JUMLAH KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, 236 desa dan 29 kelurahan. Secara rinci pembagian desa dan kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.7

Tabel Jumlah Desa dan Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
Wadaslintang	16	1	17
Kepil	20	1	21
Sapuran	16	1	17
Kaliwiro	20	1	21
Leksono	13	1	14
Selomerto	22	2	24
Kalikajar	18	1	19
Kertek	19	2	21
Wonosobo	7	13	20
Watumalang	15	1	16
Mojotengah	16	3	19
Garung	14	1	15

KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TOTAL
Kejajar	15	1	16
Sukoharjo	17	-	17
Kalibawang	8	-	8
JUMLAH	236	29	265

Sumber: Satu Data Wonosobo 2024

E. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 1.1.8
Rincian Perangkat Daerah dan UPTD Serta Dasar Hukum Pembentukan di
Kabupaten Wonosobo

NO.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Sekretariat DPRD • Inspektorat • Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga • Dinas Kesehatan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan • Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi • Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Satuan Polisi Pamong Praja • Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah • Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Kecamatan Wonosobo • Kecamatan Kertek • Kecamatan Selomerto • Kecamatan Leksono • Kecamatan Garung • Kecamatan Kejajar • Kecamatan Mojotengah • Kecamatan Watumalang • Kecamatan Sapuran • Kecamatan Kalikajar • Kecamatan Kepil • Kecamatan Kaliwiro • Kecamatan Wadaslintang • Kecamatan Sukoharjo • Kecamatan Kalibawang 	
2.	UPTD Dinkes : Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo	Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
3.	UPTD Dinkes Kab. Wonosobo : a. Puskesmas Wonosobo 1 b. Puskesmas Wonosobo 2 c. Puskesmas Kertek 1 d. Puskesmas Kertek 2 e. Puskesmas Selomerto 1 f. Puskesmas Selomerto 2 g. Puskesmas Leksono 1 h. Puskesmas Leksono 2 i. Puskesmas Garung j. Puskesmas Kejajar 1 k. Puskesmas Kejajar 2 l. Puskesmas Mojotengah	Peraturan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

	<ul style="list-style-type: none"> m. Puskesmas Watumalang n. Puskesmas Sapuran o. Puskesmas Kalikajar 1 p. Puskesmas Kalikajar 2 q. Puskesmas Kepil 1 r. Puskesmas Kepil 2 s. Puskesmas Kaliwiro t. Puskesmas Wadaslintang 1 u. Puskesmas Wadaslintang 2 v. Puskesmas Sukoharjo 1 w. Puskesmas Sukoharjo 2 x. Puskesmas kalibawang 	
4.	<ul style="list-style-type: none"> a. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo b. UPTD Laboratorium Teknik Kabupaten Wonosobo c. UPTD Pengelolaan Alat Berat Kabupaten Wonosobo d. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah I e. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah II f. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah III g. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah IV h. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi Wilayah V i. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonosobo j. UPTD Balai Benih Pertanian Kabupaten Wonosobo k. UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian Kabupaten Wonosobo l. UPTD Balai Benih Ikan Kabupaten Wonosobo m. UPTD Rumah Pematangan Hewan (RPH) Kabupaten Wonosobo n. UPTD Pasar Induk Kabupaten Wonosobo o. UPTD Pasar Garung Kabupaten Wonosobo p. UPTD Pasar Selomerto Kabupaten Wonosobo 	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo.

	<p>q. UPTD Pasar Kaliwiro Kabupaten Wonosobo</p> <p>r. UPTD Pasar Sapuran Kabupaten Wonosobo</p> <p>s. UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Wonosobo</p> <p>t. UPTD Pengelolaan Obyek Wisata Kabupaten Wonosobo</p>	
5.	<p>UPTD Satuan Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TK NEGERI PEMBINA SAPURAN • TK NEGERI PEMBINA SELOMERTO • TK NEGERI PEMBINA WONOSOBO • SD NEGERI 1 GARUNG • SD NEGERI SITIHARJO • SD NEGERI MENJER • SD NEGERI 3 GARUNG • SD NEGERI SIWURAN • SD NEGERI KURIPAN • SD NEGERI TLOGO • SD NEGERI 2 GARUNG • SD NEGERI 1 MLANDI • SD NEGERI 2 JENGKOL • SD NEGERI 2 SENDANGSARI • SD NEGERI 2 KAYUGIYANG • SD NEGERI 1 JENGKOL • SD NEGERI 2 LENGKONG • SD NEGERI 1 GEMBLENGAN • SD NEGERI MARON • SD NEGERI 1 SENDANGSARI • SD NEGERI 1 LENGKONG • SD NEGERI TEGALSARI • SD NEGERI 2 MARON • SD NEGERI 2 GEMBLENGAN • SD NEGERI LARANGAN • SD NEGERI 2 MLANDI • SD NEGERI MEREGOLANGU • SD NEGERI 2 DEMPEL • SD NEGERI 1 TEMPUREJO • SD NEGERI 1 KALIKARUNG • SD NEGERI 2 TEMPUREJO • SD NEGERI 2 PENGARENGAN • SD NEGERI 1 PENGARENGAN • SD NEGERI 1 KALIBAWANG • SD NEGERI 3 TEMPUREJO 	<p>Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI 1 DEPOK • SD NEGERI 3 DEMPEL • SD NEGERI 2 KALIKARUNG • SD NEGERI 1 DEMPEL • SD NEGERI KALIALANG • SD NEGERI 2 KALIBAWANG • SD NEGERI 3 KALIKARUNG • SD NEGERI 4 KALIKARUNG • SD NEGERI 1 BOWONGSO • SD NEGERI 1 MADURETNO • SD NEGERI 3 KEMBARAN • SD NEGERI 1 PERBOTO • SD NEGERI 1 KALIKAJAR • SD NEGERI 1 KEMBARAN • SD NEGERI 1 MANGUNREJO • SD NEGERI 2 BOWONGSO • SD NEGERI 1 SIMBANG • SD NEGERI 2 PURWOJIWO • SD NEGERI 1 BUTUH • SD NEGERI 1 TEGALOMBO • SD NEGERI 2 KEMBARAN • SD NEGERI 4 BUTUH • SD NEGERI 2 LAMUK • SD NEGERI 1 PURWOJIWO • SD NEGERI 2 MADURETNO • SD NEGERI 1 TEGALOMBO • SD NEGERI 2 KEDALON • SD NEGERI 1 LAMUK • SD NEGERI 1 KALIKUNING • SD NEGERI 2 SIMBANG • SD NEGERI 1 REJOSARI • SD NEGERI 1 KWADUNGAN • SD NEGERI 3 BUTUH • SD NEGERI 3 KWADUNGAN • SD NEGERI 1 KEDALON • SD NEGERI 2 KWADUNGAN • SD NEGERI 2 KARANGDUWUR • SD NEGERI 1 KARANGDUWUR • SD NEGERI 1 WONOSARI • SD NEGERI 2 REJOSARI • SD NEGERI 2 WONOSARI • SD NEGERI 2 BUTUH • SD NEGERI 3 LAMUK • SD NEGERI 3 KALIKAJAR 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI 5 BUTUH • SD NEGERI 2 MANGUNREJO • SD NEGERI 4 KWADUNGAN • SD NEGERI MUNGKUNG • SD NEGERI 2 PERBOTO • SD NEGERI 1 KALIWIRO • SD NEGERI 2 NGADISONO • SD NEGERI 1 TANJUNGANOM • SD NEGERI 1 WINONGSARI • SD NEGERI GRUGU • SD NEGERI SUKORENO • SD NEGERI 1 NGADISONO • SD NEGERI 2 KALIWIRO • SD NEGERI 1 LAMUK • SD NEGERI PURWOSARI • SD NEGERI GAMBARAN • SD NEGERI 2 WINONGSARI • SD NEGERI 2 LAMUK • SD NEGERI 1 TRACAP • SD NEGERI KAUMAN • SD NEGERI 2 PUCUNGKEREK • SD NEGERI CLEDOK • SD NEGERI 1 PUCUNGKEREK • SD NEGERI 1 PESODONGAN • SD NEGERI SELOMANIK • SD NEGERI 3 LAMUK • SD NEGERI 2 TANJUNGANOM • SD NEGERI 2 PESODONGAN • SD NEGERI 1 KEMIRIOMBO • SD NEGERI LEBAK • SD NEGERI 1 KALIGUWO • SD NEGERI 3 KEMIRIOMBO • SD NEGERI 2 TRACAP • SD NEGERI 1 MEDONO • SD NEGERI NGASINAN • SD NEGERI BENDUNGAN • SD NEGERI 1 TAMBI • SD NEGERI 1 SERANG • SD NEGERI 2 TAMBI • SD NEGERI 1 SURENGEDE • SD NEGERI PATAK BANTENG • SD NEGERI 1 BUNTU • SD NEGERI 1 SIKUNANG • SD NEGERI CAMPURSARI 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI 2 PARIKESIT • SD NEGERI 2 SIGEDANG • SD NEGERI 2 SIKUNANG • SD NEGERI 3 SURENGEDE • SD NEGERI IGIRMRANAK • SD NEGERI JOJOGAN • SD NEGERI SEMBUNGAN • SD NEGER 2 SERANG • SD NEGERI 2 BUNTU • SD NEGERI 1 PULOSAREN • SD NEGERI 1 KEPIL • SD NEGERI 2 KEPIL • SD NEGERI BENER • SD NEGERI 1 GONDOWULAN • SD NEGERI 3 GONDOWULAN • SD NEGERI 2 PULOSAREN • SD NEGERI 1 KALIWULUH • SD NEGERI BURAT • SD NEGERI 1 TEGESWETAN • SD NEGERI 2 BERAN • SD NEGERI 1 BERAN • SD NEGERI 3 ROPOH • SD NEGERI 1 JANGKRIKAN • SD NEGERI 1 SIGEDANG • SD NEGERI KEJAJAR • SD NEGERI DIENG • SD NEGERI KREO • SD NEGERI 1 PARIKESIT • SD NEGERI 2 SURENGEDE • SD NEGERI 2 KALIWULUH • SD NEGERI 1 ROPOH • SD NEGERI 2 TEGESWETAN • SD NEGERI 3 GADINGREJO • SD NEGERI 2 KAGUNGAN • SD NEGERI 2 GONDOWULAN • SD NEGERI 2 ROPOH • SD NEGERI 1 GADINGSUKUH • SD NEGERI RANDUSARI • SD NEGERI 1 WARANGAN • SD NEGERI 3 KEPIL • SD NEGERI KAPULOGO • SD NEGERI 4 GADINGREJO • SD NEGERI REJOSARI • SD NEGERI KALIPURU 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI 1 GADINGREJO • SD NEGERI 3 JANGKRIKAN • SD NEGERI 1 TANJUNGANOM • SD NEGERI 3 KALIWULUH • SD NEGERI 2 GADINGSUKUH • SD NEGERI 2 WARANGAN • SD NEGERI 2 TEGALGOT • SD NEGERI 2 JANGKRIKAN • SD NEGERI 1 TEGALGOT • SD NEGERI 1 KAGUNGAN • SD NEGERI 2 TANJUNGANOM • SD NEGERI 3 TANJUNGANOM • SD NEGERI CANDIYASAN • SD NEGERI 1 PAGEREJO • SD NEGERI 2 CANDIMULYO • SD NEGERI 1 RECO • SD NEGERI 2 RECO • SD NEGERI 1 KAPENCAR • SD NEGERI PURBOSONO • SD NEGERI TLOGOMULYO • SD NEGERI DAMARKASIYAN • SD NEGERI 1 CANDIMULYO • SD NEGERI TLOGODALEM • SD NEGERI 2 KARANGLUHUR • SD NEGERI 2 PURWOJATI • SD NEGERI 1 KARANGLUHUR • SD NEGERI 2 KAPENCAR • SD NEGERI 2 PAGEREJO • SD NEGERI 1 NGADIKUSUMAN • SD NEGERI 1 KERTEK • SD NEGERI 3 KERTEK • SD NEGERI 2 BEJIARUM • SD NEGERI 2 BOJASARI • SD NEGERI 1 BOJASARI • SD NEGERI 2 NGADIKUSUMAN • SD NEGERI 2 SINDUPATEN • SD NEGERI BANJAR • SD NEGERI SURENGEDE • SD NEGERI WRINGINANOM • SD NEGERI 1 SUMBERDALEM • SD NEGERI 1 SUDUNGDEWO • SD NEGERI 1 PURWOJATI • SD NEGERI 1 BEJIARUM • SD NEGERI 1 SINDUPATEN 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI TIMBANG • SD NEGERI 1 LEKSONO • SD NEGERI 2 SOJOKERTO • SD NEGERI 1 SELOKROMO • SD NEGERI 1 PACARMULYO • SD NEGERI WONOKERTO • SD NEGERI DURENSAWIT • SD NEGERI 1 JLAMPRANG • SD NEGERI 3 LEKSONO • SD NEGERI 1 KALIMENDONG • SD NEGERI 2 JLAMPRANG • SD NEGERI 1 JONGGOLSARI • SD NEGERI 1 LIPURSARI • SD NEGERI 2 KALIMENDONG • SD NEGERI 1 MANGGIS • SD NEGERI 3 JONGGOLSARI • SD NEGERI 2 BESANI • SD NEGERI 2 SAWANGAN • SD NEGERI 1 BESANI • SD NEGERI 1 SOJOKERTO • SD NEGERI KESENENG • SD NEGERI 1 MUDAL • SD NEGERI 2 SLUKATAN • SD NEGERI GUNTURMADU • SD NEGERI 1 KALIBEBER • SD NEGERI DERONGISOR • SD NEGERI 2 MUDAL • SD NEGERI 1 BUMIREJO • SD NEGERI 1 SAWANGAN • SD NEGERI 1 DERODUWUR • SD NEGERI 1 KRASAK • SD NEGERI 2 KALIBEBER • SD NEGERI SOJOPURO • SD NEGERI CANDIREJO • SD NEGERI ANDONGSILI • SD NEGERI 1 PUNGANGAN • SD NEGERI 2 MOJOSARI • SD NEGERI 2 KRASAK • SD NEGERI 2 PUNGANGAN • SD NEGERI 2 BUMIREJO • SD NEGERI BLEDERAN • SD NEGERI SUKOREJO • SD NEGERI 1 MOJOSARI • SD NEGERI 2 WONOKROMO 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI LARANGAN KULON • SD NEGERI KEBRENGAN • SD NEGERI 1 WONOKROMO • SD NEGERI 1 SLUKATAN • SD NEGERI 1 SAPURAN • SD NEGERI SUROJOYO • SD NEGERI 1 SEDAYU • SD NEGERI 1 PECEKELAN • SD NEGERI 3 BANYUMUDAL • SD NEGERI 1 BATURSARI • SD NEGERI TEMPURANDUWUR • SD NEGERI 2 RIMPAK • SD NEGERI 4 SAPURAN • SD NEGERI 1 BANYUMUDAL • SD NEGERI NGADISALAM • SD NEGERI 2 PECEKELAN • SD NEGERI 1 NGADIREKSO • SD NEGERI 1 RIMPAK • SD NEGERI 2 BATURSARI • SD NEGERI 3 SAPURAN • SD NEGERI 1 TEMPURSARI • SD NEGERI 1 GLAGAH • SD NEGERI KARANGSARI • SD NEGERI 2 TEMPURSARI • SD NEGERI 2 TEMPURANDUWUR • SD NEGERI 1 BOGORAN • SD NEGERI MARONGSARI • SD NEGERI 2 SEDAYU • SD NEGERI JOLONTORO • SD NEGERI 3 BATURSARI • SD NEGERI 2 BOGORAN • SD NEGERI TALUNOMBO • SD NEGERI 2 NGADIKERSO • SD NEGERI 2 GLAGAH • SD NEGERI SELOMERTO • SD NEGERI 1 KALIERANG • SD NEGERI 1 ADWARNO • SD NEGERI TUMENGGUNGAN • SD NEGERI KADIPATEN • SD NEGERI SINDUAGUNG • SD NEGERI 2 KALIERANG • SD NEGERI WONOREJO • SD NEGERI BALEKAMBANG • SD NEGERI WILAYU 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI PAKUNCEN • SD NEGERI NGADIMULYO • SD NEGERI SEMAYU • SD NEGERI 2 KRASAK • SD NEGERI SIMBAREJO • SD NEGERI SIDOREJO • SD NEGERI SUMBERWULAN • SD NEGERI PLOBANGAN • SD NEGERI 1 KARANGREJO • SD NEGERI CANDI • SD NEGERI • KALIPUTIH • SD NEGERI 3 KARANGREJO • SD NEGERI 1 BUMITIRTO • SD NEGERI WULUNGSARI • SD NEGERI KECIS • SD NEGERI 1 KRASAK • SD NEGERI GUNUNG TAWANG • SD NEGERI KAJEKSAN • SD NEGERI GUNUNG TUGEL • SD NEGERI 1 TLOGO • SD NEGERI 2 TLOGO • SD NEGERI PLODONGAN • SD NEGERI KARANGANYAR • SD NEGERI 1 PUCUNGWETAN • SD NEGERI 1 SUKOHARJO • SD NEGERI JEBENG PLAMPITAN • SD NEGERI 3 TLOGO • SD NEGERI 1 KALIBENING • SD NEGERI 2 PUCUNGWETAN • SD NEGERI PULUS • SD NEGERI MERGOSARI • SD NEGERI 2 KALIBENING • SD NEGERI 2 GARUNGLOR • SD NEGERI KUPANGAN • SD NEGERI GUMIWANG • SD NEGERI 2 SUROYUDAN • SD NEGERI 3 SUKOHARJO • SD NEGERI 1 SUROYUDAN • SD NEGERI 2 SUKOHARJO • SD NEGERI SEMPOL • SD NEGERI 1 GARUNGLOR • SD NEGERI 1 ROGOJATI • SD NEGERI 2 ROGOJATI 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI PANERUSAN • SD NEGERI 2 KALIGOWONG • SD NEGERI 2 WADASLINTANG • SD NEGERI 1 WADASLINTANG • SD NEGERI 2 PLUNJARAN • SD NEGERI 1 SOMOGEDE • SD NEGERI 2 GUMELAR • SD NEGERI 2 SOMOGEDE • SD NEGERI 1 BESUKI • SD NEGERI 1 LANCAR • SD NEGERI 2 LANCAR • SD NEGERI 1 NGALIAN • SD NEGERI 1 KALIGOWONG • SD NEGERI 4 NGALIAN • SD NEGERI 2 NGALIAN • SD NEGERI 2 TRIMULYO • SD NEGERI 3 TRIMULYO • SD NEGERI 1 GUMELAR • SD NEGERI 1 TIRIP • SD NEGERI 3 WADASLINTANG • SD NEGERI 2 KARANGANYAR • SD NEGERI 1 TRIMULYO • SD NEGERI 2 KUMEJING • SD NEGERI 2 SUMBEREJO • SD NEGERI 3 BESUKI • SD NEGERI 3 TIRIP • SD NEGERI 2 EROREJO • SD NEGERI 3 KALIGOWONG • SD NEGERI 1 KUMEJING • SD NEGERI 2 TIRIP • SD NEGERI 3 NGALIAN • SD NEGERI 1 EROREJO • SD NEGERI 1 PLUNJARAN • SD NEGERI 2 KALIDADAP • SD NEGERI 1 KALIDADAP • SD NEGERI 2 BESUKI • SD NEGERI 3 GUMELAR • SD NEGERI 1 SUMBEREJO • SD NEGERI 1 KARANGANYAR • SD NEGERI SUMBERSARI • SD NEGERI 1 GONDANG • SD NEGERI KURIPAN • SD NEGERI 1 BINANGUN • SD NEGERI BUMIROSO 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI PASURUHAN • SD NEGERI 3 WONOROTO • SD NEGERI 2 LUMAJANG • SD NEGERI 2 WONOKAMPIR • SD NEGERI 1 BANYUKEMBAR • SD NEGERI 1 LUMAJANG • SD NEGERI 2 WONOROTO • SD NEGERI 4 BINANGUN • SD NEGERI 1 KRINJING • SD NEGERI 2 WATUMALANG • SD NEGERI 3 BINANGUN • SD NEGERI 2 KRINJING • SD NEGERI 1 KALIDESEL • SD NEGERI 2 BANYUKEMBAR • SD NEGERI 1 WONOROTO • SD NEGERI 1 GUMAWANG KIDUL • SD NEGERI 1 WONOKAMPIR • SD NEGERI 1 LIMBANGAN • SD NEGERI 2 BINANGUN • SD NEGERI 3 LUMAJANG • SD NEGERI 3 WONOKAMPIR • SD NEGERI 1 WATUMALANG • SD NEGERI 2 LIMBANGAN • SD NEGERI 2 KALIDESEL • SD NEGERI 1 MUTISARI • SD NEGERI 1 WONOSROYO • SD NEGERI PAGERKUKUH • SD NEGERI 1 WONOSOBO • SD NEGERI SAMBEK • SD NEGERI WONOLELO • SD NEGERI 8 WONOSOBO • SD NEGERI 1 BOMERTO • SD NEGERI 10 WONOSOBO • SD NEGERI 1 KEJIWAN • SD NEGERI TAWANGSARI • SD NEGERI 2 MLIPAK • SD NEGERI 2 TLOGOJATI • SD NEGERI 1 MLIPAK • SD NEGERI 1 ROJOIMO • SD NEGERI 2 WONOSOBO • SD NEGERI JOGOYITNAN • SD NEGERI 2 JLAMPRANG • SD NEGERI 3 JARAKSARI • SD NEGERI 1 JARAKSARI 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SD NEGERI 5 WONOSOBO • SD NEGERI 2 JARAKSARI • SD NEGERI 4 JARAKSARI • SD NEGERI WONOSARI • SD NEGERI 1 JLAMPRANG • SD NEGERI 1 KRAMATAN • SD NEGERI 1 TLOGOJATI • SD NEGERI SARIYOSO • SD NEGERI BUMIRESO • SD NEGERI 2 ROJOIMO • SD NEGERI KALIANGET • SD NEGERI 2 BOMERTO • SD NEGERI PANCURWENING • SMP NEGERI 1 GARUNG • SMP NEGERI 2 GARUNG • SMP NEGERI 1 KALIBAWANG • SMP NEGERI 2 KALIBAWANG • SMP NEGERI 3 KALIBAWANG • SMP NEGERI 4 SATU ATAP KALIBAWANG • SMP NEGERI 1 KALIKAJAR • SMP NEGERI 2 KALIKAJAR • SMP NEGERI 3 KALIKAJAR • SMP NEGERI 4 KALIKAJAR • SMP NEGERI 5 SATU ATAP KALIKAJAR • SMP NEGERI 1 KALIWIRO • SMP NEGERI 2 KALIWIRO • SMP NEGERI 3 KALIWIRO • SMP NEGERI 4 KALIWIRO • SMP NEGERI 5 KALIWIRO • SMP NEGERI 6 SATU ATAP KALIWIRO • SMP NEGERI 7 SATU ATAP KALIWIRO • SMP NEGERI 1 KEJAJAR • SMP NEGERI 2 KEJAJAR • SMP NEGERI 3 SATU ATAP KEJAJAR • SMP NEGERI 1 KEPIL • SMP NEGERI 2 KEPIL • SMP NEGERI 3 KEPIL • SMP NEGERI 4 KEPIL • SMP NEGERI 5 KEPIL 	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SMP NEGERI 6 SATU ATAP KEPIL • SMP NEGERI 7 SATU ATAP KEPIL • SMP NEGERI 1 KERTEK • SMP NEGERI 2 KERTEK • SMP NEGERI 3 KERTEK • SMP NEGERI 4 KERTEK • SMP NEGERI 1 LEKSONO • SMP NEGERI 2 LEKSONO • SMP NEGERI 3 LEKSONO • SMP NEGERI 1 MOJOTENGAH • SMP NEGERI 2 MOJOTENGAH • SMP NEGERI 3 MOJOTENGAH • SMP NEGERI 1 SAPURAN • SMP NEGERI 2 SAPURAN • SMP NEGERI 3 SATU ATAP SAPURAN • SMP NEGERI 4 SAPURAN • SMP NEGERI 5 SATU ATAP SAPURAN • SMP NEGERI 1 SELOMERTO • SMP NEGERI 2 SELOMERTO • SMP NEGERI 3 SELOMERTO • SMP NEGERI 1 SUKOHARJO • SMP NEGERI 2 SUKOHARJO • SMP NEGERI 3 SUKOHARJO • SMP NEGERI 4 SATU ATAP SUKOHARJO • SMP NEGERI 5 SATU ATAP SUKOHARJO • SMP NEGERI 1 WADASLINTANG • SMP NEGERI 10 SATU ATAP WADASLINTANG • SMP NEGERI 2 WADASLINTANG • SMP NEGERI 3 WADASLINTANG • SMP NEGERI 4 WADASLINTANG • SMP NEGERI 5 WADASLINTANG • SMP NEGERI 6 WADASLINTANG • SMP NEGERI 7 SATU ATAP WADASLINTANG • SMP NEGERI 8 SATU ATAP WADASLINTANG • SMP NEGERI 9 SATU ATAP WADASLINTANG • SMP NEGERI 1 WATUMALANG 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • SMP NEGERI 2 WATUMALANG • SMP NEGERI 3 WATUMALANG • SMP NEGERI 4 SATU ATAP WATUMALANG • SMP NEGERI 5 WATUMALANG • SMP NEGERI 6 SATU ATAP WATUMALANG • SMP NEGERI 1 WONOSOBO • SMP NEGERI 2 WONOSOBO • SMP NEGERI 3 WONOSOBO • SMP NEGERI 4 WONOSOBO 	
--	---	--

F. RINCIAN ASN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 1.1.9

Tabel Rincian ASN Berdasarkan Urusan dan Fungsi di Kabupaten Wonosobo

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Sekretariat Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	19	53	66	138
2.	Sekretariat DPRD	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	6	3	18	27
3.	Inspektorat	Urusan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	10	30	4	44
4.	Badan Kepegawaian Daerah	Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	7	15	8	30

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik	6	3	6	15
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran	8	16	13	37
7.	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Fungsi Penunjang Keuangan	24	1	27	52
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah	8	23	6	37
9.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan	3	15	8	26
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	7	24	6	37
11.	Dinas Kesehatan	Urusan pemerintahan bidang kesehatan	9	793	60	862
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik	6	15	8	29
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan pemerintahan bidang Lingkungan	7	12	52	71

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Hidup dan bidang Kehutanan				
14.	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Urusan pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian dan bidang Kelautan dan Perikanan	16	133	15	164
15.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan	8	10	15	33
16.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Urusan pemerintahan bidang Pariwisata Umum dan Penataan Ruang	12	30	50	92
17.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi Sumber Daya Mineral	3	5	8	16
18.	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olahraga	20	4.626	105	4.748
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	9	11	29
20.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	21	32	64
21.	Dinas Perumahan, Kawasan	Urusan pemerintahan bidang Perumahan	11	6	29	46

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
	Permukiman Dan Perhubungan	dan Kawasan Permukiman, bidang Perhubungan dan bidang Pertanahan				
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	9	10	26
23.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Dan Transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi	7	17	5	29
24.	Kecamatan Garung	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	11	1	9	21
25.	Kecamatan Kalibawang	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	6	1	3	10
26.	Kecamatan Kalikajar	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	11	1	4	16
27.	Kecamatan Kaliwiro	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	10	2	7	19
28.	Kecamatan Kejajar	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	9	1	21	31
29.	Kecamatan Kepil	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan –	8	1	10	19

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		administrasi pemerintahan				
30.	Kecamatan Kertek	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	14	1	12	27
31.	Kecamatan Leksono	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	10	1	6	17
32.	Kecamatan Mojotengah	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	16	1	8	25
33.	Kecamatan Sapuran	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	10	2	8	20
34.	Kecamatan Selomerto	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	11	1	8	20
35.	Kecamatan Sukoharjo	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	7	1	6	14
36.	Kecamatan Wadaslintang	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	10	2	7	19
37.	Kecamatan Watumalang	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan –	9	2	7	18

NO.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		administrasi pemerintahan				
38.	Kecamatan Wonosobo	Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang kewilayahan – administrasi pemerintahan	47	1	13	61
39.	Rumah Sakit Umum Daerah KRT Setjonegoro	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	14	-	28	42
40.	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	6	17	33
Total			437	6.251	736	7.424

G. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Data APBD Kabupaten Wonosobo selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1.10

Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo

Uraian	2024
Pendapatan	2.148.706.436.540
Pendapatan Asli Daerah	314.598.106.120
Dana Perimbangan	1.348.082.448.585
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.381.382.835
Belanja	2.239.354.766.390
Belanja Langsung	-
Belanja Tidak Langsung	-
Belanja Operasi	1.575.880.003.829
Belanja Modal	258.946.744.491
Belanja Tidak Terduga	2.120.000.000
Belanja Transfer	402.408.018.070
Pembiayaan	90.648.329.850
Pembiayaan Penerimaan	98.025.712.685
Pembiayaan Pengeluaran	7.377.382.835

Sumber: Satu Data Wonosobo, 2024

Tabel 1.1.11
Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
PENDAPATAN DAERAH	2.148.706.436.540	2.105.841.974.383	98,01
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	181.485.964.354	179.509.357.626	98,91
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.135.960.000	1.828.739.317	85,62
Urusan pemerintahan pilihan	17.708.680.000	14.002.673.164	79,07
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	358.000.000	413.886.000	115,61
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.944.965.837.871	1.907.880.334.841	98,09
Unsur Kewilayahan	2.051.994.315	2.206.983.435	107,55
Belanja Daerah	2.239.354.766.390	2.162.787.509.404	96,58
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	1.350.606.549.137	1.303.768.378.462	96,53
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	153.414.647.439	144.372.059.026	94,11
Urusan Pemerintahan Pilihan	33.141.280.137	31.820.073.642	96,01
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	94.212.315.714	87.289.991.118	92,65
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	478.615.764.231	471.131.224.870	98,44
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	9.322.100.122	9.024.890.013	98,81
Unsur Kewilayahan	78.978.094.838	74.846.823.791	94,77
Unsur Pemerintahan Umum	41.064.014.772	40.534.068.482	98,71

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo, 2024

H. Alokasi Anggaran Dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan Dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 1.1.12

Jumlah Desa dan Kelurahan Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Wonosobo

NO	Usuran Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.350.606.549.137	1.303.768.378.462
1.	PENDIDIKAN		709.880.797.265	698.689.238.073
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	514.132.094.451	507.580.123.048
		Program Pengelolaan Pendidikan	177.978.702.814	173.503.599.846
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	400.000.000	395.226.325
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.710.000.000	16.551.366.354
		Program Pengembangan Kurikulum	260.000.000	258.988.500
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	200.000.000	199.934.000
2.	KESEHATAN		379.857.352.851	359.108.994.129
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	276.440.816.559	263.112.996.846
		Program Pemenuhan Upaya	98.808.045.427	91.754.005.506

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.161.591.305	1.026.325.000
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.465.679.480	1.045.765.609
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.981.220.080	1.797.132.860
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		187.404.374.120	175.873.382.046
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.128.621.547	12.386.386.992
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	9.151.250.000	8.798.904.761
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.623.264.000	15.605.323.121
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.501.497.000	19.453.744.873
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	350.000.000	328.636.534

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penataan Bangunan Gedung	763.850.000	754.228.279
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.390.000.000	2.377.708.158
		Program Penyelenggaraan Jalan	125.615.891.573	115.512.649.156
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	9.316.472.669	9.092.412.640
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	850.000.000	632.297.347
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		36.601.234.595	35.774.903.066
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.312.527.095	6.834.671.633
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.692.682.500	13.542.552.795
		Program Pengembangan Perumahan	611.500.000	607.301.473
		Program Pengelolaan Pelayaran	75.000.000	74.095.422
		Program Kawasan Permukiman	2.431.525.000	2.422.651.640
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	67.200.000	64.892.957
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	360.000.000	358.126.524

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	12.000.800.000	11.843.201.912
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000	27.408.710
5.	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		15.313.480.902	14.486.503.779
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.734.870.902	9.971.161.457
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.953.610.000	2.944.147.224
		Program Penanggulangan Bencana	1.395.000.000	1.345.533.098
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	230.000.000	225.662.000
6.	SOSIAL		21.549.309.404	19.835.357.369
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.257.067.922	3.958.655.966

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Daerah Kabupaten/Kota		
		Program Pemberdayaan Sosial	836.200.000	795.926.969
		Program Penataan Desa	1.522.200.000	1.510.044.179
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	385.000.000	373.645.406
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.390.336.000	5.297.673.301
		Program Rehabilitasi Sosial	900.000.000	780.088.781
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	840.000.000	835.215.184
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.238.505.482	6.115.439.333
		Program Penanganan Bencana	135.000.000	123.690.250
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	45.000.000	44.978.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			153.414.647.439	144.372.059.026
7.	TENAGA KERJA		19.320.126.941	18.320.173.767
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.542.302.120	4.996.062.985
		Program Perencanaan Dan	5.419.002.000	5.208.440.843

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Pembangunan Industri		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000	6.959.780
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.917.282.000	7.678.308.030
		Program Penempatan Tenaga Kerja	246.540.821	245.453.199
		Program Hubungan Industrial	185.000.000	184.948.930
8.	PANGAN		58.941.702.587	55.761.085.910
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.885.398.933	21.230.694.368
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.364.003.654	7.496.641.535
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	40.000.000,00	39.050.400,00
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.068.000.000	25.657.177.740
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	135.000.000	132.588.595
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	525.000.000	388.122.446
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.650.000	24.783.070

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	601.150.000	510.507.756
		Program Penyuluhan Pertanian	297.500.000	281.520.000
9.	LINGKUNGAN HIDUP		25.018.971.052	22.986.071.669
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.560.198.738	8.196.833.457
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	176.107.500	171.766.655
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	538.261.400	503.453.624
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.700.297.914	1.675.134.782
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.000.000	33.895.713
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	46.950.000	42.017.980

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000	98.319.500
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000	5.173.050
		Program Pengelolaan Persampahan	13.852.155.500	12.259.476.908
10.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		8.038.896.387	7.656.213.298
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.617.947.027	6.248.771.044
		Program Pendaftaran Penduduk	1.033.499.360	1.024.976.099
		Program Pencatatan Sipil	177.250.000	174.401.035
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	210.200.000	208.065.120
11.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		19.717.669.137	18.843.962.686
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.343.023.458	5.012.659.443
		Program Pengendalian Penduduk	598.257.643	549.892.829

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	705.654.292	705.599.989
		Program Perlindungan Perempuan	110.000.000	109.657.220
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.986.661.000	7.529.744.422
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.709.800.000	4.672.136.039
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	136.272.744	136.272.744
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	18.000.000	18.000.000
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	110.000.000	110.000.000
13.	KOMUNIKASI & INFORMATIKA		10.117.499.812	9.703.227.707
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.325.199.812	4.944.154.027
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	20.000.000	19.951.150
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.146.300.000	3.120.999.836

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	56.000.000	55.921.088
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.570.000.000	1.562.201.606
14.	PENANAMAN MODAL		5.693.140.286	5.091.749.069
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.698.253.286	4.126.705.557
		Program Promosi Penanaman Modal	33.200.000	33.200.000
		Program Pelayanan Penanaman Modal	350.000.000	347.680.272
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	611.687.000	584.163.240
15.	KEARSIPAN		6.566.641.237	6.009.574.920
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.998.161.237	4.543.362.533
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.294.300.000	1.218.026.717
		Program Pengelolaan Arsip	253.000.000	227.185.670
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	21.180.000	21.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			33.141.280.137	31.820.073.642
16.	PARIWISATA		18.137.474.181	17.446.153.739
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.114.273.181	4.614.739.709

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.449.201.000	7.373.353.550
		Program Pengembangan Kebudayaan	2.686.000.000	2.678.364.582
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	50.000.000	47.957.200
		Program Pemasaran Pariwisata	1.200.000.000	1.192.885.946
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	170.000.000	166.163.372
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.468.000.000	1.372.689.380
17	PERDAGANGAN		15.003.805.956	14.373.919.903
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.766.725.911	10.241.301.472
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	14.100.000	13.364.550
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	43.692.000	42.734.124
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	731.433.375	723.828.395

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.288.887.855	1.284.222.085
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	27.065.549	27.058.000
		Program Pengembangan Ekspor	7.150.000	7.089.640
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	525.170.000	522.143.461
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	105.257.135	105.016.544
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	12.150.000	11.770.700
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	690.000.000	619.121.661
		Program Pengembangan UMKM	792.174.131	776.269.271
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			94.212.315.714	87.289.991.118
18.	SEKRETARIAT DAERAH		41.897.308.223	38.984.868.359
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34.882.104.736	32.537.867.180
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.054.465.311	4.885.910.161

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.960.738.176	1.561.091.018
19.	SEKRETARIAT DPRD		52.315.007.491	48.305.122.759
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	47.625.517.491	44.109.893.149
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			478.615.764.231	471.131.224.870
20.	PERENCANAAN		8.790.830.277	8.123.681.281
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.845.235.077	6.253.436.224
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	394.000.000	362.809.882
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	641.000.000	617.842.884
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	910.595.200	889.592.291
21.	KEUANGAN		463.236.920.827	456.867.496.729
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.573.977.566	50.734.920.518
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	405.414.135.030	403.018.247.077
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	914.423.900	906.236.648

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.334.384.331	2.208.092.486
22.	KEPEGAWAIAN		6.588.013.127	6.140.046.860
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.215.901.461	4.802.959.110
		Program Kepegawaian Daerah	1.372.111.666	1.337.087.750
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			9.322.100.122	9.024.890.013
23.	INSPEKTORAT		9.322.100.122	9.024.890.013
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.453.493.053	8.179.180.794
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	626.787.069	612.731.719
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	241.820.000	232.977.500
UNSUR KEWILAYAHAN			78.978.094.838	74.846.823.791
24.	Kecamatan		78.978.094.838	74.846.823.791
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.974.436.016	50.262.514.176
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.291.817.869	1.248.512.233
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.578.127.967	18.362.691.997

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.901.780.918	1.823.097.088
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.199.171.653	2.154.591.201
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.032.760.415	995.417.096
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			41.064.014.772	40.534.068.482
25.	Kesatuan Bangsa Dan Politik		41.064.014.772	40.534.068.482
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.150.980.272	2.783.887.732
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.024.590.000	2.009.464.680
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32.699.443.800	32.687.835.960
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.370.000.000	1.367.949.660
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	250.000.000	224.830.000
		Program Peningkatan	1.569.000.700	1.460.100.450

NO	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
		Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			105.403.095.520	105.407.245.519,91
26.	Keuangan		105.403.095.520	105.407.245.519,91

Sumber : Satu Data Wonosobo, 2024

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari segala perubahan tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek. Tiap aspek dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis. Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat terwujud. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap Identifikasi Masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian masalah tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari OPD.

Permasalahan strategis berdasarkan RKPDP Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- 1) Belum optimalnya kualitas guru
- 2) Belum optimalnya implementasi sekolah inklusi
- 3) Rendahnya partisipasi sekolah PAUD (APS PAUD)
- 4) Belum optimalnya standar nasional sarpras pendidikan dasar
- 5) Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun
- 6) Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah
- 7) Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- 1) Masih rendahnya angka kelangsungan hidup ibu melahirkan dan bayi
- 2) Belum optimalnya perencanaan dan penanganan kegawat daruratan
- 3) Masih terbatasnya layanan, sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan
- 4) Masih tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit
- 5) Masih rendahnya status gizi masyarakat
- 6) Masih tingginya kasus stunting
- 7) Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 8) Belum semua industri pangan memiliki standar keamanan pangan dan higienitas sanitasi

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Belum optimalnya tata kelola perencanaan, pemrograman dan penganggaran kegiatan penyelenggaraan jalan
- 2) Kondisi topografi menuntut penanganan secara khusus
- 3) Intensitas curah hujan, kerawanan bencana memicu penurunan kondisi kemantapan jalan
- 4) Belum optimalnya kinerja BPSAMS dalam pengelolaan air minum perdesaan
- 5) Berkurangnya sumber air baku
- 6) Belum adanya regulasi (Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik)
- 7) Saluran irigasi masih banyak yang multifungsi sebagai saluran drainase dan saluran air limbah domestik
- 8) Intensitas curah hujan dan kerawanan bencana memicu penurunan kondisi jaringan irigasi
- 9) Belum optimalnya tata kelola drainase
- 10) Belum optimalnya penataan bangunan gedung strategis
- 11) Belum optimalnya masyarakat dalam mengakses layanan PBG-SLF
- 12) Belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
- 13) Belum tersedianya aturan legal rencana tata ruang dalam skala rinci

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- 1) Belum optimalnya tata kelola perencanaan, pemrograman dan penganggaran kegiatan penyelenggaraan jalan
- 2) Masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses hunian layak
- 3) Tingginya angka backlog rumah
- 4) Belum optimalnya penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh
- 5) Tingginya potensi rumah terkena bencana

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Masih kurangnya jumlah tenaga Linmas dalam mendukung pemilu
- 2) Masih tingginya angka pelanggaran perda/perkada
- 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kantrantibmas
- 4) Masih belum optimalnya warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan sosial (keterampilan, management, promosi usaha)
- 2) Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial (Ketersediaan data;
- 3) Keterbatasan sarpras dan SDM)
- 4) Belum adanya fasilitas shelter yang standar
- 5) Belum optimalnya pemberian perlindungan dan jaminan sosial
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penetapan sasaran program

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

- 1) Terbatasnya kesempatan dan penempatan kerja
- 2) Masih rendahnya jumlah masyarakat miskin yang mengikuti pelatihan kewirausahaan atau start up wirausaha baru
- 3) Masih kurangnya tenaga kerja berkualitas
- 4) Masih rendahnya jiwa kewirausahaan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Cakupan layanan konseling belum optimal
- 2) Masih adanya kasus kekerasan pada anak dan perempuan

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Masih panjangnya saluran distribusi pangan
- 2) Masih rendahnya cakupan Desa Mandiri Pangan

- 3) Masih beredarnya pangan non ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)
- 4) Kualitas dan mutu pangan yang relatif rendah, Harga bahan pangan yang tidak stabil

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Rendahnya aset tanah pemerintah daerah yang bersertifikat
- 2) Belum optimalnya tata kelola aset

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Belum optimalnya pengelolaan sampah di sumber sampah
- 2) Masih tingginya luasan lahan kritis di luar kawasan hutan
- 3) Masih tingginya pencemaran air dan penurunan debit mata air

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Masih rendahnya kepemilikan akta kematian
- 2) Pemanfaatan data kependudukan masih terbatas
- 3) Kepemilikan dokumen kependudukan penduduk rentan masih rendah

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan masih rendah.
- 2) Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
- 3) Lemahnya kelembagaan Bumdes
- 4) Belum optimalnya sistem administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan dan informasi desa / kelurahan

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- 1) Prevalensi KB aktif (CPR) masih didominasi oleh penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek
- 2) Rendahnya persentase kesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- 3) Tingginya angka unmet need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)
- 4) CPR masih rendah
- 5) Tingginya angka drop out KB
- 6) Tingginya jumlah kelahiran Angka Kelahiran menurut umur (ASFR) pada wanita umur 15-19 tahun

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum/transportasi publik
- 2) Banyaknya potensi daerah rawan kecelakaan utamanya pada daerah dataran tinggi

- 3) Belum optimalnya pelayanan terminal tipe C
- 4) Belum optimalnya layanan angkutan umum
- 5) Terbatasnya sarana dan prasarana penyeberangan waduk
- 6) Terbatasnya fasilitas kelengkapan lalu lintas jalan
- 7) Belum optimalnya penataan parkir
- 8) Belum tersedianya fasilitas parkir sistem elektronik
- 9) Masih rendahnya V/C Rasio pada jalan kabupaten

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya layanan informasi publik terkait program dan kebijakan pemerintah
- 2) Belum optimalnya pengelolaan SPBE
- 3) Belum optimalnya pengelolaan informasi publik

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM

- 1) Jumlah Koperasi yang memiliki badan hukum masih sedikit.
- 2) Kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk UMKM belum terjaga.
- 3) Masih rendahnya kesadaran pelaku UMKM untuk mengajukan HAKI atas produk UMKM dan kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan
- 4) Masih minimnya koperasi aktif dan koperasi sehat
- 5) Masih minimnya koperasi pertanian
- 6) Masih minimnya jumlah UMKM naik kelas
- 7) Masih minimnya skema pendanaan bagi UKM dan pemasaran produk UKM

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Masih rendahnya pertumbuhan investasi daerah
- 2) Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu
- 2) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga
- 3) Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional
- 4) Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- 5) Masih rendahnya wirausaha pemuda

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- 1) Data statistik sektoral belum terintegrasi
- 2) Masih minimnya data sektoral yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Belum optimalnya pengelolaan keamanan data dan informasi pada masing-masing perangkat daerah

p. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya, termasuk untuk wisata sejarah/budaya

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- 1) Masih minimnya jumlah referensi digital dibandingkan dengan jumlah koleksi buku dan judul buku
- 2) Menurunnya jumlah kunjungan perpustakaan
- 3) Belum semua desa/ kelurahan mempunyai perpustakaan desa/ kelurahan

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- 1) Belum semua perangkat daerah menerapkan arsip secara baku
- 2) Belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun
- 3) Masih minimnya pembinaan kearsipan bagi unit pengelola arsip (organisasi masyarakat, organisasi politik, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan kecamatan)

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

- 1) Masih rendahnya produksi ikan budidaya dan perikanan tangkap
- 2) Minimnya Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang memproduksi secara kontinyu
- 3) Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- 1) Masih rendahnya kunjungan wisatawan
- 2) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 3) Masih rendahnya rata-rata lama tinggal wisatawan
- 4) Masih minimnya pelaku ekonomi kreatif yang menjadi wirausaha

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- 1) Ketergantungan petani pada sarana pertanian dari pabrikan yang cukup tinggi (bibit/benih, pupuk, obat-obatan, pakan)
- 2) Masih minimnya produk pertanian, perkebunan dan peternakan yang tersertifikasi/terstandarisasi
- 3) Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas
- 4) Tenaga kerja sektor pertanian semakin terbatas
- 5) Belum optimalnya penggunaan teknologi/inovasi pertanian
- 6) Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

- 1) Masih rendahnya komoditas produk ekspor
- 2) Sarana distribusi perdagangan belum optimal

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

- 1) Masih rendahnya kapasitas produksi industri pengolahan skala kecil
- 2) Masih rendahnya industri pengolahan yang bersertifikasi halal
- 3) Belum optimalnya kelembagaan industri pengolahan
- 4) Masih rendahnya industri pengolahan yang mempunyai izin usaha

f. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Belum optimalnya tingkat kesiapan lahan di satuan permukiman

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

- 1) Belum optimalnya kualitas kebijakan pemerintahan
- 2) Indeks tata kelola PBJ rendah

b. Sekretariat DPRD

Masih minimnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

- 1) Belum optimalnya capaian kinerja pembangunan
- 2) Masih rendahnya implementasi pendanaan inovatif

b. Keuangan

- 1) Proporsi belanja pegawai masih diatas 30%
- 2) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah
- 3) Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset daerah

c. Kepegawaian

- 1) Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 2) Masih rendahnya Sistem Merit

d. Penelitian dan Pengembangan

- 1) Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
- 2) Masih minimnya inovasi daerah

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

- 1) Masih adanya hasil temuan yang belum ditindaklanjuti
- 2) Belum optimalnya penerapan MRI
- 3) Masih minimnya hasil reuiu APIP yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah
- 4) Masih minimnya unit pelayanan yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

- 5) Masih adanya perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko
- 6) Masih minimnya jumlah perangkat daerah yang berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK) dan berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM)

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik
- 2) Belum optimalnya fungsi koordinasi wilayah kecamatan

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

- 1) Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu cenderung menurun
- 2) Masih rendahnya masyarakat yang mengikuti pendidikan politik
- 3) Masih adanya konflik SARA yang mengganggu toleransi
- 4) belum optimalnya penerapan nilai-nilai demokrasi

Tabel 1.1.14
Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023 dan 2024

		2023	2024
TARGET REALISASI INVESTASI	RENSTRA	Rp300.000.000.000	Rp310.000.000.000
REALISASI INVESTASI	LKPM	Rp441.772.009.781	Rp291.939.829.556
	USAHA MIKRO	Rp373.210.522.159	Rp441.902.780.539
	JUMLAH REALISASI	Rp814.982.531.940	Rp733.842.610.095

Sumber : Satu Data Wonosobo, 2024

Berdasarkan data tersebut, Realisasi Investasi Tahun 2024 mencapai target sebesar 236,72 %, namun mengalami penurunan sebesar Rp. 81.139.921.845 dibandingkan Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi investasi yang berasal dari LKPM tahun 2023 sebesar Rp441.772.009.781 terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp27.757.319.569 dan PMDN sebesar Rp414.014.690.212;
2. Realisasi investasi yang berasal dari LKPM tahun 2024 sebesar Rp291.939.829.556 terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp56.243.603.632 dan PMDN sebesar Rp235.696.225.924.

Beberapa penyebab yang menjadi faktor turunnya nilai realisasi investasi pada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi Makro: Pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi tinggi, atau ketidakstabilan nilai tukar mata uang dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modal;
2. Iklim Investasi yang Kurang Mendukung: Regulasi, birokrasi dan ketidakpastian hukum yang belum jelas sehingga membuat investor enggan berinvestasi;
3. Persaingan Antar Daerah: Daerah lain mungkin menawarkan insentif atau fasilitas yang lebih menarik, sehingga investor memilih untuk berinvestasi di tempat lain;
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di suatu daerah juga dapat mempengaruhi keputusan investor;
5. Permasalahan Lahan: Kesulitan dalam memperoleh lahan, sengketa kepemilikan, atau harga lahan yang tinggi dapat menjadi penghambat investasi;
6. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha menengah besar di Kabupaten Wonosobo,
7. Kesadaran Pelaku Usaha Menengah Besar dalam melakukan Pelaporan LKPM belum optimal. Beberapa pelaku usaha tidak bisa melakukan Pelaporan LKPM karena kesalahan penginputan modal diawal pembuatan NIB,
8. Wonosobo belum mempunyai regulasi mengenai RDTR sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha dan belum memiliki Regulasi Perbup Insentif dan kemudahan penanaman modal untuk menarik calon investor.

a. Ketimpangan antar kelompok

Pembangunan daerah yang hanya dilaksanakan dan dinikmati oleh sebagian wilayah dan golongan masyarakat tertentu akan menimbulkan gejala ketimpangan. Pembangunan harus dilaksanakan merata dan tersebar ke seluruh wilayah, terutama wilayah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi supaya tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan pendekatan distribusi pengeluaran, kriteria ketimpangan versi bank dunia di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 kategori moderat (sedang) dimana pada kelompok 40% pendapatan terendah hanya menikmati 19,35% dari total pendapatan masyarakat. Berikut data untuk melihat ketimpangan antar kelompok pengeluaran dihitung menggunakan kriteria ketimpangan versi bank dunia.

Tabel 1.1.14
Tabel Ketimpangan antar Kelompok dengan Kriteria Ketimpangan
Versi Bank Dunia Tahun 2024

Karesidenan Kedu	20% pengeluaran atas	40% pengeluaran tengah	40% pengeluaran bawah
Jawa Tengah	45,07	36,18	18,74
Kabupaten Kebumen	42,22	37,40	20,38
Kabupaten Purworejo	42,54	36,69	20,76
Kabupaten Wonosobo	44,07	36,58	19,35
Kabupaten Magelang	43,69	37,28	19,03
Kabupaten Temanggung	44,84	35,64	19,52
Kota Magelang	49,32	34,62	16,07

Sumber : Satu Data Wonosobo, 2024

Kondisi ini mengindikasikan bahwa antar wilayah di Kabupaten Wonosobo kondisinya semakin baik antar wilayah Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi wilayah Kabupaten Wonosobo yang memiliki persentase kondisi baik sebesar 50%. Selain itu, Kabupaten Wonosobo juga memiliki kondisi topografi yang subur dan terletak pada ketinggian antara 1.400 hingga 2.143 mdpl, menjadikan wilayah ini sebagai daerah yang subur dan memiliki potensi untuk dikembangkan.

b. Angka Kemiskinan masih tinggi

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 15,28%, menurun 0,30 % terhadap persentase penduduk miskin tahun 2023. Jumlah pendudukan miskin pada tahun 2024 sebesar 121,49 ribu orang, menurun 2,21 ribu orang terhadap jumlah penduduk miskin tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 2,41% menurun 0,19% terhadap indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,60%, menurun 0,03% terhadap indeks keparahan kemiskinan tahun 2023. Garis kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp456.351/kapita/bulan meningkat dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2023 sebesar Rp425.105/kapita/bulan.

c. Kurangnya Kesejahteraan Petani

Sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 menghadapi beberapa tantangan, berdasarkan analisis LQ, sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama di Kabupaten Wonosobo yang perlu ditingkatkan. Kondisi pertanian di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari beberapa

indikator. Pada Agustus 2024, inflasi *year on year (y-on-y)* di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,77. Namun pada umumnya kondisi perekonomian mereka masih miskin. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti sistem pertanian yang masih tradisional, tidak adanya kemitraan dalam hal tata niaga atau pemasaran, kurangnya pengetahuan pengelolaan hasil perikanan dan pendanaan, kualitas komoditas pertanian masih rendah, belum banyak diversifikasi hasil pertanian dan yang terakhir masalah distribusi pemasaran. Sebagian besar komoditas pertanian di Kabupaten Wonosobo dipasarkan melalui tengkulak. Tengkulak memiliki peranan paling penting dalam rantai pemasaran hasil pertanian. Tengkulak sering mempermainkan harga beli hasil petani. Sehingga harga beli dari petani rendah sedangkan harga jual di pasaran sangat tinggi. Petani mendapatkan akses yang mudah dalam mendapatkan modal pinjaman melalui tengkulak. Namun petani tidak terlalu memperhitungkan kerugian yang mereka alami diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah harga standar di pasaran.

d. Koperasi dan UKM

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) jumlah koperasi aktif masih belum maksimal, kurangnya SDM koperasi sesuai dengan standar keahlian teknis,; (b) Masih rendahnya aplikasi IPTEKS dalam sistem produksi UMKM sehingga kurang mendukung daya saingnya; (c) belum tersedianya kebijakan yang mendukung bagi perkembangan dan keberlanjutan UMKM; (e) Masih kurangnya kualitas SDM dan daya saing pemasaran (promosi) produk UMKM, baik pada bidang sandang, pangan, kerajinan, dan jasa; (f) Masih rendahnya ketersediaan dan aksesibilitas UMKM terhadap permodalan lembaga keuangan/pembiayaan mikro; (g) Belum optimalnya kemitraan usaha antara koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha lainnya; (h) Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam mengakses pasar; (i) Masih kurangnya kemampuan koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi.

e. Ketahanan Pangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Ketahanan Pangan Dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; (b) Ketergantungan bahan pangan dari luar daerah yang masih besar; (c) Keamanan dan

keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang; (d) Masih rendahnya konsumsi pangan berbasis lokal yang sehat dan aman bagi anak-anak sekolah; (e) Sering terjadi fluktuasi harga dari berbagai komoditas; (f) Luas lahan pertanian semakin berkurang akibat alih fungsi lahan; (g) Sebagian besar masyarakat masih tergantung pada konsumsi beras; (h) Masih adanya wilayah rawan pangan karena kemiskinan maupun bencana alam; (i) Masih rendahnya konsumsi protein hewani.

f. Pertanian

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan pertanian dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas serta pemasaran hasil pertanian (perkebunan/peternakan/perikanan); (b) Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan pemanfaatan pekarangan dalam mendukung daya tahan pangan di masyarakat; (c) Kelembagaan tani/ternak belum optimal; (d) Kualitas produk pertanian masih rendah; (e) Produk pertanian kurang bersaing di pasar internasional; (f) Kepemilikan lahan pertanian sedikit.

g. Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara kewenangan, pertambangan sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Kewenangan pemerintah daerah terkait ESDM hanya pada pemanfaatan energi terbarukan, dalam hal ini bisa pada pemanfaatan langsung energi panas bumi. Pemanfaatan langsung pada energi panas bumi selama ini belum dilakukan secara teknis oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Energi dan Sumber Daya Mineral dari berbagai sumber adalah kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terus mengalami penurunan.

h. Perikanan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya; (b) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan penduduk; (c) Kelembagaan kelompok tani ikan belum optimal.

i. Perdagangan

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perdagangan dari berbagai sumber adalah sebagai berikut: (a) Masih banyaknya peredaran barang dan jasa yang belum terstandarisasi dan ada yang belum aman; (b) Masih kurangnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan; (c) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pelaku

usaha UMKM; (d) Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan; (e) Sistem distribusi barang kepokmas belum efektif dan efisien; (f) Masih minimnya ragam komoditas ekspor non migas dengan nilai tambah yang rendah; (g) Masih rendahnya kesadaran pemakaian produk dalam negeri.

j. Industri

Permasalahannya yaitu:

- a. Penurunan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB;
- b. Belum optimalnya pertumbuhan jumlah usaha;
- c. Ketergantungan bahan baku impor yang tinggi;
- d. Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri masih rendah.;
- e. Rendahnya daya saing industri lokal;
- f. Lemahnya struktur industri;
- g. Kurangnya akses permodalan;
- h. Kurang luasnya jaringan pemasaran;
- i. Kualitas kuantitas kontinuitas hasil industri belum stabil.

6. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

- Angka melanjutkan lulusan SD dan SMP ke jenjang SMP dan juga SMA Kabupaten Wonosobo masih rendah, sehingga perlu ada penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah;
- Belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas baik sarana prasarana maupun layanan pendidikan itu sendiri. Pemanfaatan dana BOS yang belum optimal juga menghambat efektivitas peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar. Selain itu mutu, relevansi dan daya saing pendidikan yang masih relatif rendah, akan menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetensi tinggi;
- Lokasi sarana pendidikan yang memiliki kualitas baik yang semakin jauh dengan pemukiman, sehingga masyarakat pinggiran tidak mampu mengakses pendidikan dengan kualitas baik;
- Pendidikan berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan IT dan Pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang. Selain itu kemampuan siswa Kabupaten Wonosobo dalam

menganalisis, bernalar dan berkeaktifitas masih rendah, cenderung untuk analisis dengan cara menghafal;

- Persentase Guru SD/MI/SDLB yang memenuhi yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV masih relatif rendah;
- Rendahnya kualitas sarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium; dan
- Integrasi antara pendidikan (formal atau non Formal) dengan ketersediaan lapangan kerja belum optimal.

b. Kesehatan

- Penderita HIV setiap tahun terus mengalami peningkatan;
- Dokter Umum dan Dokter spesialis di Kabupaten Wonosobo belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk di Kabupaten Wonosobo; dan
- Kapasitas pelayanan Puskesmas belum optimal.

c. Perempuan dan Anak

- Kurangnya edukasi perempuan di Kabupaten Wonosobo;
- Hukum tentang kekerasan perempuan dan anak masih kurang tegas;
- Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
- Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;

d. Kepemudaan dan Olahraga:

- Rendahnya rasio gedung olahraga, juga diikuti oleh minimnya pembinaan olahraga sehingga berimbas pada minimnya prestasi olahraga di kalangan pemuda;
- Tingginya tingkat pengangguran terbuka; dan
- Masih rendahnya kapasitas dan kualitas kelembagaan kepemudaan

e. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PMKS meliputi anak balita terlantar, anak korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan, anak penyandang disabilitas, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, lanjut usia tindak kekerasan, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang cacat bukan kusta, tuna susila, eks narapidana, pekerja migran bermasalah dan korban NAPZA.

Permasalahan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih belum optimal.

f. Ketenagakerjaan

- Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja; dan
- Pencari tenaga kerja belum kompetitif, sehingga perlu difasilitasi pendidikan keterampilan sesuai standarisasi pasar tenaga kerja.

g. Kearsipan dan Perpustakaan

- Jumlah arsip dalam wujud digitalisasi/aplikasi teknologi informasi masih sangat sedikit dan belum optimal.
- Pengelolaan/manajemen Perpustakaan, layanan perpustakaan daerah dan perpustakaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Wonosobo belum optimal.

h. Kebudayaan dan Pariwisata

- Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata tergolong meningkat;
- Manajemen pariwisata kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, seperti telaga warna yang saat ini hanya memiliki warna hijau akibat matinya alga merah dan biru dampak pestisida dari pertanian warga;
- Pelestarian nilai luhur, seni, bahasa dan sastra semakin tergerus oleh arus globalisasi. Semakin banyak anak yang kurang lancar Bahasa Jawa, khususnya Krama Inggil, orang tua lebih sering mengajarkan bahasa Indonesia. Banyak masyarakat Wonosobo yang kurang tertarik menyaksikan seni tradisional Wonosobo, seperti Tari Lengger.

7. Bidang Infrastruktur dan penataan ruang

- a. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya penegakan peraturan perundangan di bidang tata ruang;
- c. Tekanan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian lingkungan;
- d. Penggunaan Lahan masih belum sesuai tata ruang wilayah. Penggunaan lahan di kawasan Dieng yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian, meskipun seharusnya sebagai kawasan konservasi;
- e. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum optimal;

- f. Kondisi jaringan pedestrian yang kurang memadai dan tempat parkir yang tidak tersedia secara layak;
- g. Akses transportasi umum belum tersebar di semua wilayah dan belum nyaman, sehingga masyarakat Wonosobo terbiasa menggunakan motor daripada moda transportasi umum;
- h. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; dan
- i. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang belum optimal.

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dengan memperhatikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2021 – 2026, dan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta isu-isu strategis baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun global, maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2021 – 2026 adalah: **TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA**

Visi **Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera**, akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
- b. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
- c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.
- d. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Misi TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA

akan dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan demokrasi, membangun harmoni sosial dalam masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik;

2. meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;
4. mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata; dan
5. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Kelima misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tersebut apabila dikaitkan dengan misi pada RPJMN 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1.15

Keselarasn RPJMN dengan RPJMD Wonosobo Tahun 2021-2026

Misi RPJMN 2020-2024	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera
MISI	
Peningkatan Kualitas manusia Indonesia	Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan Pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi
Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberdayaan dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang

Misi RPJMN 2020-2024	Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026
Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat
Sinergi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, maka kerangka logis RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1.16

Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Wonosobo

No	RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026
VISI		
	Membangun Wonosobo Asri dan Bermartabat	▪ Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera
MISI		
1	Mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang sejahtera lahir dan batin berdasar Pancasila, disertai kokohnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi;

No	RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026
		<p>Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern;</p> <p>Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata;</p>
2	Mewujudkan Lingkungan hidup Kabupaten Wonosobo yang subur, indah dan lestari	Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.
3	Mewujudkan pemerintahan yang selalu didukung oleh partisipasi rakyat, serta kehidupan masyarakat yang demokratis	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;

RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023:

Tabel 1.1.17

Keselarasn Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 Dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Wonosobo
	2018-2023	Tahun 2021-2026
VISI		
	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi	Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera
MISI		
1	Misi 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
2	Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Misi 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
3	Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.	Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi. Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata
4	Misi 4: Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.	Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan Pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern

No	RPJMD Provinsi Jawa Tengah	RPJMD Kabupaten Wonosobo
	2018-2023	Tahun 2021-2026
		Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang

Dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, RTRW Kabupaten Wonosobo, RTRW Provinsi Jawa Tengah. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Adapun penjabaran unsur visi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026 ke dalam misi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.1.18

Penerjemahan Unsur Visi Ke Dalam Misi RPJMD Kabupaten Wonosobo 2021-2026

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Pembangunan daerah yang berdaya saing didasarkan pada elemen utama pembangunan masyarakat yang mampu meningkatkan taraf hidup, mampu berkompetisi dengan daerah lain, mampu memenuhi kebutuhan daerah, mampu menyediakan lapangan kerja, serta pembangunan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kebersamaan, gotong-royong dan kerja sama semua pihak sehingga Kabupaten Wonosobo dapat mengangkat harkat dan martabatnya dalam berbagai bidang.
Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi sosial, dan lingkungan fisik yang lebih baik dan didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, kreatif, berdaya saing, berakhlak mulia, serta berwawasan global.
Sejahtera	Meningkatkan pembangunan masyarakat yang adil dan makmur dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Tujuan ini merupakan wujud dari

Unsur Visi	Penjelasan
	keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik, mampu menyelaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehingga kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin dapat diwujudkan

Perumusan prioritas RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Tengah, permasalahan pembangunan/isu strategis Kabupaten Wonosobo, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Keselarasan antara prioritas daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dengan prioritas nasional RKP tahun 2024 ditunjukkan pada persandingan antara Prioritas Daerah dengan Prioritas Provinsi Jateng dan Prioritas Nasional yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.19

Keselarasn Antara PN RKP 2024 dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PN.1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	PP. 1 Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas	PD 2. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata
PN.2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PP. 3 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	PD. 5 Penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan
PN.5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar		PD. 1 Penguatan infrastruktur berkelanjutan sesuai prioritas wilayah pengembangan
PN.6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim		
PN.3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PP. 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	PD. 3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH	PRIORITAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PN.4 Revolusi mental dan saing; pembangunan kebudayaan	PP. 4 Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif,	PD. 4 Penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah
PN.7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		

Sumber: Satu Data Wonosobo, 2024 (RKPD 2024)

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja. Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan dan 5 (lima) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum dan Non Urusan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan. Program ini diarahkan pada perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup dan Peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD 3-6 tahun, Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A, Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B, Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A, Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B, Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani, Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal, Persentase sekolah ramah anak, Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan, Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan, persentase PAUD (TK/RA/KB/SPS yang

terakreditasi, Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini, Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, Persentase Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI, persentase Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs, Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar, Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik, Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4. Dalam rangka percepatan pencapaian kinerja program dan mendukung kinerja daerah, beberapa implementasi yang akan dilaksanakan sekaligus menjadi program unggulan daerah antara lain yaitu Pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan ramah VIII-1 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 HAM melalui Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah Inklusi dan Tim Konsultasi/ Assesment dan Gerakan kembali ke sekolah/Pengembalian Anak ke Sekolah.

- 2) Program Pengembangan Kurikulum Program ini diarahkan pada penguatan kurikulum yang inklusif, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir Assesment Nasional, persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal dan persentase PAUD yang melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal.
- 3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio kecukupan guru kelas SD dan rasio ketercukupan Guru SMP.
- 4) Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi dan persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar

- b) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan.
 - 2) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar, Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat dan Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat produksi pangan (SPP-IRT).
 - 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Program ini diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Puskesmas Yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dan Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk).
 - 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program ini diarahkan pada optimalisasi peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio posyandu per satuan balita, Persentase posyandu dengan strata mandiri, Persentase poskestren aktif dan Cakupan desa siaga aktif strata mandiri
 - 5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan/ Puskesmas untuk mencapai indikator Rata-rata Indeks kepuasan layanan puskesmas, lama tunggu pelayanan obat racikan, dan lama tunggu pelayanan rawat jalan.
- c) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Program Penyelenggaraan Jalan Program ini diarahkan pada peningkatan kinerja pelayanan jalan kabupaten sesuai dengan kondisi geografis dan tematik kawasan dan peningkatan aksesibilitas wilayah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani, persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik.
 - 2) Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) Program ini diarahkan pada Revitalisasi tata kelola sistem sumberdaya air. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik.

- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program ini diarahkan pada peningkatan akses air minum layak yang berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan air minum layak.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program ini diarahkan pada percepatan Peningkatan akses layanan pengolahan air limbah domestik layak.
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat.
- 7) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program ini diarahkan pada penguatan profesionalisme jasa konstruksi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Rasio tenaga operator/teknisi/analisis bidang konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi.
- 9) Program Pengembangan Permukiman Program ini diarahkan pada peningkatan layanan kualitas infrastruktur permukiman. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase jumlah dokumen teknis kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang terverifikasi tepat waktu sesuai peraturan
- 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program ini diarahkan pada peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang berkualitas.
- 11) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang didukung sarana prasarana memadai.

- d) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 1) Program Pengembangan Perumahan Program ini diarahkan pada Fasilitasi penyediaan akses rumah layak huni.
 - 2) Program Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada percepatan penanganan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase luas kawasan permukiman kumuh di kabupaten yang ditangani dan persentase penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh sampai dinyatakan sah (legal).
 - 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Program ini diarahkan pada Optimalisasi pencegahan kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang tertangani.
 - 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana utilitas yang terpadu dan berkelanjutan.
 - 5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga penyedia perumahan.
- e) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan persentase Penegakan Perda, persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara.
 - 2) Program Penanggulangan Bencana Program ini diarahkan pada perkuatan kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta persentase desa dan kelurahan tangguh bencana.
 - 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Program ini diarahkan pada percepatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang

tanggguh. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time) dan Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time).

- f) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
 - 1) Program Rehabilitasi Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
 - 2) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program ini diarahkan pada penguatan tata kelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk ketepatan sasaran dan intervensi program.
 - 3) Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kelengkapan TMP dalam kondisi baik.
 - 4) Program Pemberdayaan Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan peran lembaga dan masyarakat dalam kemandirian PPKS.
 - 5) Program Penanganan Bencana Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.
- 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan:
 - 1) Program Penempatan Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada pengembangan start up wirausaha baru bagi masyarakat miskin secara berkelanjutan, perluasan dan penempatan lapangan kerja dan penumbuhan peluang kewirausahaan.
 - 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program ini diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja.
 - 3) Program Hubungan Industrial Program ini diarahkan pada perlindungan tenaga kerja.
 - 4) Program Perencanaan tenaga kerja Program ini diarahkan pada perluasan dan penempatan lapangan kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase dokumen ketenagakerjaan yang diimplementasikan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan.
- 2) Program Kualitas Keluarga Program ini diarahkan pada peningkatan layanan konseling Keluarga.
- 3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan fasilitas publik yang ramah anak dan inklusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa ramah anak.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam sistem informasi yang terupdate
- 5) Program Perlindungan Perempuan Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak Program ini diarahkan pada peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu rasio desa ber lumbung pangan, persentase desa mandiri pangan.
- 2) Program Pengawasan Keamanan Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase bahan pangan ASUH.
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja VIII-9 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu ketersediaan pangan per kapita/hari, persentase cadangan pangan utama (beras) dan persentase cadangan pangan utama
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan, distribusi akses pangan, mutu dan

keamanan pangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa berstatus rawan pangan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

- 1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program ini diarahkan Optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi.
- 2) Program Penatagunaan Tanah Program ini diarahkan Optimalisasi penatagunaan tanah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan pada optimalisasi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program ini diarahkan pada peningkatan layanan publik dalam bidang lingkungan hidup. P
- 4) Program Pengelolaan Persampahan Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang didukung sarana prasarana memadai.
- 5) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program ini diarahkan pada Peningkatan pengelolaan B3 dan bahan B3 oleh kegiatan dan/atau usaha penghasil B3.
- 6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Program ini diarahkan pada upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam gerakan lingkungan hidup.
- 7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan untuk pengembangan instrumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi.
- 8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program ini diarahkan untuk peningkatan layanan publik dalam bidang lingkungan hidup.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- 1) Program Pendaftaran Penduduk Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.
- 2) Program Pencatatan Sipil Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi dan penyederhanaan sistem layanan untuk pemenuhan hak kependudukan.
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa.
- 2) Program Penataan Desa Program ini diarahkan peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur skala perdesaan.
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa Program ini diarahkan pada pengembangan kawasan perdesaan dan perbatasan prioritas. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kawasan perdesaan dilegalisasi, Persentase Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk.
- 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada penguatan tata kelola administrasi pembangunan desa dan Optimalisasi pengelolaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

- 1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas layanan kesehatan reproduksi remaja.
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49, cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta Drop out KB dan Kepesertaan KB Pria.
- 3) Program Pengendalian Penduduk Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akses serta keterjangkauan layanan KB yang merata dan berkeadilan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai

indikator kinerja yaitu rata-rata jumlah anak per keluarga dan Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan.
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran Program ini diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase dermaga penyeberangan waduk dalam kondisi baik.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Program ini diarahkan pada peningkatan layanan dan pemanfaatan komunikasi informasi publik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Aksesibilitas Website, Nilai Informasi Tersedia Setiap Saat dan Nilai Kelembagaan PPID.
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program ini diarahkan pada implementasi e-government untuk mendukung smart city. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Nilai Kebijakan Internal SPBE, Nilai Tata Kelola SPBE, Nilai Manajemen SPBE dan Nilai Layanan SPBE.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM

- 1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan koperasi dan perluasan kemitraan usaha,.
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro Program ini diarahkan pada penguatan kelembagaan UMKM dan perluasan kemitraan usaha serta peningkatan akses permodalan, pengelolaan usaha, pemasaran bagi masyarakat miskin.
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas koperasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase KSP/USP koperasi sehat.
- 4) Program Pengembangan UMKM Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas UMKM. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase unit usaha mikro naik kelas dan pertumbuhan omset usaha mikro.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

- 1) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu.
- 2) Program Pelayanan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada percepatan layanan perizinan satu pintu.
- 3) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 4) Program Promosi Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif.
- 5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program ini diarahkan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha yang berizin sesuai peruntukannya.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan.
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Program ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda serta kemitraan.
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan sistem pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan dan pengembangan olahraga rekreasi.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

- Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan data sektoral.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program ini diarahkan pada pengelolaan data statistik dan keamanan sistem informasi pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Keamanan Informasi.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.

- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.
 - 3) Program Pengelolaan Permuseuman Program ini diarahkan pada Optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kenaikan koleksi embrio museum cagar budaya atau museum cagar budaya
 - 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Program ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya berbasis kearifan lokal.
- q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
- 1) Program Pembinaan Perpustakaan Program ini diarahkan pada transformasi layanan perpustakaan yang inklusif.
 - 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Program ini diarahkan pada Pemerataan layanan perpustakaan untuk membangun kesadaran literasi.
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
- 1) Program Pengelolaan Arsip Program ini diarahkan pada peningkatan akses dan layanan arsip.
 - 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program ini diarahkan pada peningkatan upaya pelestarian pengembangan dan pemanfaatan arsip.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program ini diarahkan pada peningkatan SDM dan teknologi perikanan serta peningkatan sarpras, budidaya dan produksi perikanan
 - 2) Program pengelolaan perikanan tangkap, Program ini diarahkan pada peningkatan sarpras budidaya dan produksi perikanan
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
 - 1) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas pelaku pariwisata/ekonomi kreatif melalui standarisasi dan sertifikasi
 - 2) Program Pemasaran Pariwisata, Program ini diarahkan peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata
 - 3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program ini diarahkan pada peningkatan daya tarik, sarpras dan promosi pariwisata dan pengembangan desa wisata berbasis agroindustri lokal

- 4) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Program ini diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- 1) Program Penyuluhan Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan kelembagaan dan kapasitas petani, peningkatan keterampilan petani ruta miskin/buruh tani serta peningkatan partisipasi petani ruta miskin/buruh tani dalam kelembagaan petani.
 - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program ini diarahkan diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif.
 - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program ini diarahkan peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
 - 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan akses saprodi melalui pengembangan teknologi dan inovasi saprodi yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
 - 5) Program Perizinan Usaha Pertanian, Program ini diarahkan pada peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, perkebunan, dan peternakan
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- 1) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program ini diarahkan pada penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan.
 - 3) Program Pengembangan Ekspor, Program ini diarahkan pada promosi dan proteksi produk lokal.
 - 4) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program ini diarahkan pada promosi dan proteksi produk lokal.
 - 5) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen.
 - 6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen.

- e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
 - 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha dan kualitas produk industri pengolahan, peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan dan dan peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.
 - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program ini diarahkan pada peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk industri pengolahan.
 - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, Program ini diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk melalui integrasi usaha dari hulu sampai hilir berbasis kawasan, potensi lokal dan agroindustri.
 - f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Program ini diarahkan pada perluasan dan penempatan lapangan kerja, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase transmigran yang telah mencapai tahap kemandirian di satuan permukiman.
4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
- a. Sekretariat Daerah
 - 1) Program Perekonomian dan Pembangunan, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan.
 - 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - 3) Program Administrasi Umum Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas manajemen pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - b. Sekretariat DPRD
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi dan layanan DPRD bagi mitra kerja/pemangku kepentingan.
5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
- a. Perencanaan
 - 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu,

- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial, dengan pengembangan skema pendanaan inovatif dan penguatan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan.
- b. Keuangan
 - 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini diarahkan pada peningkatan efektivitas pengelolaan Keuangan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase kesesuaian program VIII-22 RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 APBD terhadap RKPD, persentase silpa terhadap APBD, persentase penyerapan belanja transfer dan persentase perangkat daerah yang mengirimkan laporan keuangan tepat waktu.
 - 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program ini diarahkan pada pendayagunaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan persentase tanah aset pemda yang bersertifikat.
 - 3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program ini diarahkan pada digitalisasi pengelolaan administrasi pendapatan daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan persentase kenaikan PAD.
 - c. Kepegawaian dan Diklat
 - Program Kepegawaian Daerah Program ini diarahkan pada implementasi manajemen ASN. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase layanan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi, persentase penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN, persentase pengembangan kompetensi ASN berdasarkan pemetaan kompetensi, persentase ketersediaan dokumen perencanaan kepegawaian dan persentase ASN berkinerja baik
 - d. Penelitian dan Pengembangan
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program ini diarahkan pada penguatan proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial, dengan pengembangan skema pendanaan inovatif dan penguatan sinergi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan dan peningkatan produk inovasi.
6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - a. Inspektorat Daerah
 - 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program

ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan persentase tindak lanjut hasil review APIP.

- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Program ini diarahkan pada peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase perangkat daerah yang memiliki profil manajemen risiko, persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan persentase perangkat daerah berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program ini diarahkan pada pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan PATEN dan IKM kelurahan
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase lembaga masyarakat aktif.
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala daerah yang dilaksanakan
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban tingkat kecamatan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Program ini diarahkan pada peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa Dan Politik

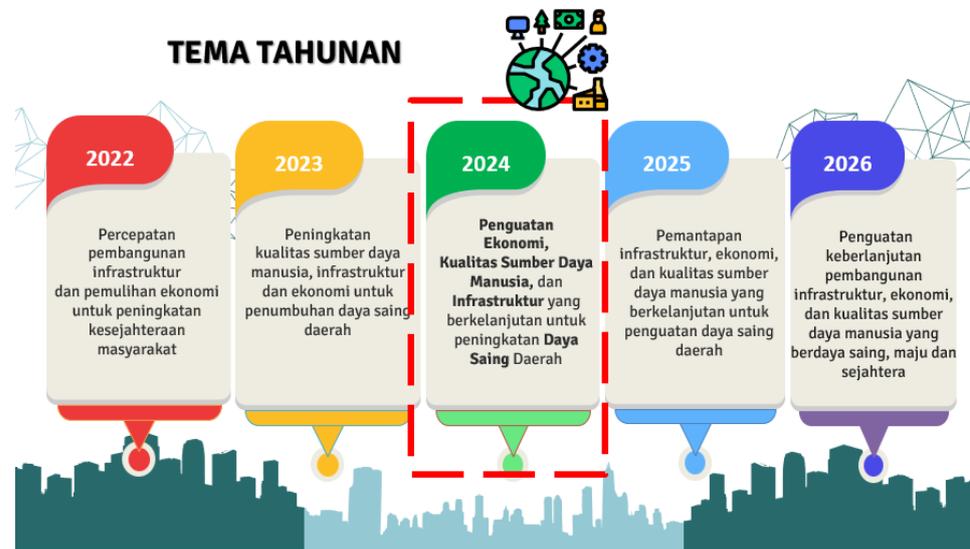
- 1) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program ini diarahkan pada penguatan pendidikan politik yang inklusi.
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Program ini diarahkan pada penguatan sinergi dalam memelihara keharmonisan kehidupan bermasyarakat.
- 3) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Program ini diarahkan pada peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini keamanan.
- 4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter.
- 5) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program ini diarahkan pada peningkatan peran organisasi masyarakat sipil untuk penguatan karakter.

9. Non Urusan

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini diarahkan untuk pengembangan inovasi pelayanan publik untuk kemudahan layanan dan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik, persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja, cakupan pelayanan administrasi perkantoran, persentase perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu dan persentase perangkat daerah menyusun dokumen evaluasi tepat waktu.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN.

Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka pembangunan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 diarahkan pada “Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”.



Gambar 1.1.3
Arah Kebijakan Tahunan Kabupaten Wonosobo

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, kemajuan yang dicapai tahun 2021 dan 2022 dan perkiraan tahun 2023, serta berbagai masalah, isu strategis, maka pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 diprioritaskan pada:

- Penguatan infrastruktur berkelanjutan sesuai prioritas wilayah pengembangan;
- Penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata;
- peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing;
- d. penguatan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah;
- e. penguatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Untuk mempertajam prioritas pembangunan tersebut dirumuskan fokus dan prioritas program pembangunan sebagai berikut:

- a. Penguatan infrastruktur berkelanjutan sesuai prioritas wilayah pengembangan yang difokuskan pada:
 - 1) Mempercepat peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui implementasi Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran, dengan prioritas pada:
 - penguatan penyelenggaraan jalan penghubung sentra produksi pangan (pertanian dan perikanan) yang mendukung pariwisata pada Wilayah Pengembangan (WP) WP Kalibawang Kaliwiro Wadaslintang (Bakalintang) serta pada Wilayah Pengembangan Watumalang Sukoharjo Leksono (Watusole)
 - penghubung destinasi pariwisata dan sentra produksi pangan pada WP Kejajar Garung Mojotengah (Jagatengah), pusat-pusat industri pertanian pada WP Kalikajar Sapuran Kepil (Jarankepil), serta penghubung antar kecamatan pada WP Wonosobo Kertek Selomerto (Sobokerto) dan WP Kejajar Garung Mojotengah (Jagatengah).
 - 2) Meningkatkan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air dengan prioritas pada
 - peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku diprioritaskan pada desa stunting yang tidak mendapatkan layanan PDAM
 - 3) Memperluas cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi dengan prinsip kolaborasi dengan prioritas pada:
 - percepatan capaian akses sanitasi layak dan aman diprioritaskan pada area beresiko sanitasi 3 dan 4 pada desa P3KE dan stunting
 - 4) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air terpadu dan berkelanjutan, dengan prioritas pada:
 - optimalisasi peran Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Komisi Irigasi
 - penguatan kapasitas dan kondisi jaringan irigasi diprioritaskan pada Wilayah Pengembangan Watumalang, Sukoharjo, Leksono (WP Watusole) dan Wilayah Pengembangan Wonosobo, Kertek dan Selomerto (WP Sobokerto)
 - 5) Mengurangi titik lokasi limpasan dengan prioritas pada:
 - penguatan operasi dan pemeliharaan saluran drainase diprioritaskan pada kawasan perkotaan Wilayah Pengembangan

Wonosobo, Kertek dan Selomerto (WP Sobokerto) dan Wilayah Pengembangan Kejajar, Garung dan Mojotengah (WP Jagatengah)

- 6) Menyelesaikan penataan bangunan gedung strategis dengan prioritas pada:
 - percepatan penyelesaian penataan bangunan gedung perkantoran Blok Jogonegoro
- 7) Meningkatkan Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP) dalam layanan Persetujuan Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi (PBG-SLF) dengan prioritas pada :
 - penguatan layanan PBG-SLF melalui SAKEP
- 8) Meningkatkan harmonisasi penataan kota di lokasi strategis, dengan prioritas pada:
 - peningkatan pedestrian Jl. T.Jogonegoro
- 9) Meningkatkan penataan kawasan perkotaan terpadu melalui implementasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan sejenisnya, dengan prioritas pada:
 - percepatan legalisasi RDTR
- 10) Mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan prioritas pada:
 - kolaborasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh diprioritaskan pada kawasan perkotaan Wilayah Pengembangan Wonosobo, Kertek dan Selomerto (WP Sobokerto) dan pada WP Kalibawang Kaliwiro Wadaslintang (Bakalintang).
 - fasilitasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin diprioritaskan pada desa Pensasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)
 - percepatan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
- 11) Meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan dan transportasi melalui peningkatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan, dengan prioritas pada:
 - penguatan manajemen rekayasa lalu lintas dan penerapan parkir elektronik
- 12) Mendorong internalisasi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam penyelenggaraan infrastruktur dengan mengikuti program Gender Equality and Social Inclusion in Infrastructure (Gesit)

- b. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada Sektor Pertanian dan Pariwisata yang difokuskan pada:
- 1) Mendorong usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan bagi rumah tangga miskin dengan prioritas pada:
 - peningkatan pelatihan keterampilan bagi rumah tangga miskin desil 1 dan 2
 - peningkatan wirausaha bagi rumah tangga miskin desil 3 dan 4
 - peningkatan akses permodalan bagi rumah tangga miskin
 - 2) Meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas pangan, dengan prioritas pada:
 - peningkatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan marginal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat diprioritaskan pada desa P3KE dan rawan pangan
 - Peningkatan kualitas pangan melalui diversifikasi pangan bergizi, seimbang, dan aman, serta mutu dan keamanan pangan segar diprioritaskan pada desa P3KE dan stunting
 - peningkatan dan perbaikan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien melalui pembangunan jaringan data/informasi dan analisis distribusi pangan
 - 3) Meningkatkan manajemen koperasi, dengan prioritas pada:
 - Penguatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan, pendampingan dan pengawasan koperasi
 - 4) Meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Kecil Mikro (UKM), dengan prioritas pada:
 - peningkatan kapasitas dan produktivitas UKM melalui penyediaan skema pendanaan dan pemasaran
 - pengembangan Klinik Bisnis/ Inkubator Bisnis menjadi UMKM Center/PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)
 - 5) Memperbaiki iklim investasi dan kepastian usaha, dengan prioritas pada:
 - peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perizinan terintegrasi yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perizinan berusaha
 - peningkatan minat investasi, pengawasan penanaman modal, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha

- 6) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan, dengan prioritas pada:
 - peningkatan produksi benih unggul melalui revitalisasi dan perbaikan tata kelola Balai Benih Ikan (BBI) dan unit Pembenihan rakyat (UPR) diprioritaskan pada BBI Kenjer dan BBI Sudungdewo
- 7) Meningkatkan dan mengoptimalkan daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas dan kelembagaan pariwisata, dengan prioritas pada:
 - peningkatan promosi pariwisata melalui media sosial,
 - peningkatan atraksi, aksesibilitas dan amenitas dengan prioritas di WP Kejajar Garung Mojotengah (Jagatengah) yang berorientasi konservasi
 - pengembangan ekonomi kreatif di WP Sobokerto, WP Bakalintang, dan WP Jagatengah
 - peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
 - penerapan e-ticketing obyek wisata
 - Implementasi Geopark di Kawasan Geosite Telaga Menjer
- 8) Meningkatkan pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya, dengan prioritas pada:
 - perlindungan warisan budaya
 - sertifikasi pelaku kesenian tradisional
 - pengembangan seni budaya berbasis kearifan lokal
- 9) Meningkatkan daya saing produksi pertanian dengan prioritas pada:
 - peningkatan produksi, produktivitas, akses sarana produksi didukung sistem pertanian modern yang ramah lingkungan serta mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian
 - peningkatan keterampilan budidaya pertanian bagi petani miskin/buruh tani desil 1 di lokus P3KE
- 10) Memperbaiki tata niaga perdagangan dengan prioritas pada:
 - penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan dengan prioritas pada Pasar Garung, Pasar Kejajar dan Pasar Sumberan
 - penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Masjid Jami'
 - peningkatan ekspor melalui pendampingan tata niaga ekspor dan standarisasi kualitas dan promosi produk komoditas ekspor
 - perbaikan sistem distribusi perdagangan barang, khususnya Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) melalui pengawasan dan pengendalian distribusi barang
 - pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Panggotan Kaliwiro

- 11) Meningkatkan produksi dan produktivitas industri pengolahan dengan prioritas pada:
 - peningkatan produksi dan produktivitas industri kecil menengah melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan industri berbahan baku hasil pertanian (singkong dan kelapa) pada Kecamatan Mojotengah, Watumalang dan WP Bakalintang
 - 12) Mendorong kemandirian transmigran di satuan permukiman, dengan prioritas pada:
 - pengembangan kemandirian transmigran melalui peningkatan kemampuan dalam usaha tani
- c. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing yang difokuskan pada:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan untuk menghasilkan SDM yang berkarakter dengan prioritas pada:
 - peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan fokus pada pemenuhan kurikulum merdeka
 - implementasi sekolah inklusi
 - pemenuhan sarpras standar nasional pada pendidikan dasar sesuai kewenangan kabupaten
 - perluasan pendidikan non formal untuk meningkatkan literasi, kemampuan keaksaraan dan numerasi fokus pada wilayah dengan rata-rata lama sekolah rendah dan miskin ekstrem
 - 2) Meningkatkan kualitas kesehatan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan, dengan prioritas pada:
 - pemenuhan sarpras layanan ibu melahirkan dan bayi di puskesmas.
 - penguatan sistem rujukan dan kegawatdaruratan
 - peningkatan deteksi dini untuk pencegahan dan pengendalian penyakit
 - pemberdayaan masyarakat untuk kewaspadaan dini deteksi penyakit
 - peningkatan intervensi spesifik melalui peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat fokus pada keluarga risiko stunting
 - peningkatan cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui peningkatan cakupan desa ODF dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

- 3) Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan layanan rehabilitasi sosial, dengan prioritas pada:
 - peningkatan kesejahteraan dan kemandirian PPKS
 - peningkatan cakupan jaminan sosial
 - pemenuhan layanan shelter (sarpras, SDM)
- 4) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan prioritas pada:
 - peningkatan sistem perlindungan perempuan dan anak
- 5) Meningkatkan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pendapatan keluarga dengan prioritas pada:
 - peningkatan kesempatan kerja perempuan dan usaha ekonomi produktif, permodalan serta partisipasi dalam kelembagaan sosial ekonomi
- 6) Meningkatkan keberlanjutan pembangunan perdesaan, dengan prioritas pada:
 - penguatan tata kelola pembangunan desa
 - implementasi pembangunan kawasan perdesaan Kanigara (Burat, Bener, Gadingrejo) dan Kembang Sindoro (Candiyasan, Purbosono, Candimulyo, Pagerejo, Tlogomulyo, Damarkasian, Tlogojati, Sojopuro, Keseneng)
- 7) Meningkatkan kelembagaan ekonomi skala desa, dengan prioritas pada:
 - Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes)
- 8) Meningkatkan upaya pendewasaan usia perkawinan dengan prioritas pada:
 - peningkatan peran lintas sektor dalam pencegahan pernikahan usia anak dan pencegahan stunting.
 - peningkatan dukungan pada pembangunan keluarga
- 9) Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga dengan prioritas pada:
 - Peningkatan standarisasi pembinaan keolahragaan (metode pembibitan usia dini, kompetisi, sarana dan prasarana, dan organisasi keolahragaan.
 - Perluasan akses partisipasi bagi pemuda dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi
- 10) Meningkatkan daya saing tenaga kerja dengan prioritas pada:
 - perluasan BLK komunitas
 - peningkatan kompetensi tenaga kerja (skill dan sertifikasi)

- 11) Meningkatkan peran perpustakaan dengan prioritas pada:
 - Optimalisasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan perpustakaan desa sebagai pusat belajar masyarakat
 - Perluasan transformasi perpustakaan
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan dan konduktivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah
 - 1) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kanrantibmas) dengan prioritas pada:
 - Peningkatan kapasitas linmas pada pengamanan pelaksanaan pemilu serentak;
 - Peningkatan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda/perkada serta peningkatan ketertiban dan keamanan;
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan.
 - 2) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik dengan prioritas pada:
 - Penguatan Partai Politik
 - Peningkatan Pendidik Politik
 - 3) Meningkatkan toleransi terhadap keberagaman, dengan prioritas pada:
 - Penguatan sinergitas penanganan konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)
 - 4) Meningkatkan pengelolaan dokumen kependudukan, dengan prioritas pada:
 - Percepatan updating data kependudukan
 - 5) Meningkatkan pemenuhan hak atas administrasi penduduk untuk pelayanan publik, dengan prioritas pada:
 - penjangkauan layanan pada kelompok miskin dan rentan
 - 6) Mendorong sinergitas pemanfaatan aset tanah dengan prioritas pada:
 - Penguatan kolaborasi reforma agraria dan perbaikan legalitas dan administrasi pertanahan aset pemerintah daerah prioritas pada lahan aset pemda dan Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia (PT. KAI)
 - 7) Meningkatkan tata kelola informasi, dengan prioritas pada:
 - Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
 - Optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu
 - Peningkatan akses informasi publik

- 8) Meningkatkan tata kelola satu data, dengan prioritas pada:
 - Pengelolaan satu data yang terintegrasi
- 9) Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan daerah dengan prioritas pada:
 - peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan
 - penguatan perencanaan yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS) dengan pengembangan skema pendanaan inovatif
- 10) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan prioritas pada:
 - peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah
 - peningkatan penataan dan pemanfaatan aset daerah serta penyelesaian aset-aset bermasalah
- 11) Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, dengan prioritas pada:
 - pengembangan aplikasi retribusi dan pemutakhiran basis data retribusi dan pendapatan daerah
 - pemutakhiran/updating peraturan daerah (perda) tentang retribusi dan pendapatan daerah
 - optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan
 - standarisasi kerjasama pemanfaatan aset daerah
- 12) Mengefektifkan peran legislatif dalam penyusunan kebijakan, dengan prioritas pada:
 - Peningkatan peran legislatif dalam penyusunan perda inisiatif
- 13) Meningkatkan manajemen ASN dengan prioritas pada:
 - implementasi Manajemen ASN berbasis sistem merit
- 14) Mengoptimalkan riset dan inovasi daerah dengan prioritas pada:
 - Penguatan kelembagaan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah
- 15) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan administrasi umum dengan prioritas pada:
 - perumusan kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan, pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dan administrasi umum serta penyelarasan terhadap regulasi untuk percepatan pencapaian sasaran daerah
 - pemantauan dan pengendalian inflasi daerah
 - percepatan proses pengadaan barang dan jasa kegiatan pemerintahan (lelang T-1)

- 16) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis risiko dengan prioritas pada:
 - penerapan manajemen risiko pada penyelenggaraan pemerintahan
 - 17) Meningkatkan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dengan prioritas pada:
 - peningkatan akses dan layanan arsip
 - 18) Meningkatkan koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan dengan prioritas pada:
 - peningkatan fungsi koordinasi kewilayahan, pemberdayaan masyarakat
- e. Penguatan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang difokuskan pada:
- 1) Mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan prioritas pada:
 - optimalisasi kolaborasi aksi konservasi lingkungan prioritas pada WP Jagatengah dan atau sentra produksi pangan pada Sub Das Serijo, Sub Das Tulis dan Sub Das Begaluh
 - 2) Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang berkelanjutan, dengan prioritas pada
 - revitalisasi TPA Wonorejo dan fasilitasi TPS LB3
 - pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) prioritas pada desa area beresiko sanitasi 3 dan 4
 - revitalisasi tata kelola persampahan pada sumber sampah prioritas pada desa wisata
 - 3) Meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana dan kebakaran, dengan prioritas pada:
 - perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana melalui peningkatan layanan penanganan darurat bencana
 - percepatan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang tangguh melalui peningkatan sarana prasarana penanggulangan kebakaran

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.1.3.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk mewujudkan pelayanan bermutu pada masyarakat yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, masuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini sebagai tolok ukur pemberian pelayanan dasar kepada masyarakat terutama pada Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM. Maka dari itu SPM dapat diartikan sebagai pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar disebutkan dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

Penerapan SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam menentukan target tahunan pencapaian SPM harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pada perhitungan pembiayaan, pemerintah daerah melakukan pemetaan pembiayaan karena terdapat sumber pembiayaan yang dapat digunakan dalam penerapan SPM. Hal ini ditujukan untuk tercapainya efektivitas penerapan SPM serta meningkatkan peran serta seluruh elemen untuk bersama-sama mewujudkan penyediaan layanan dasar sehingga akan berdampak pada peningkatan jumlah capaian layanan SPM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, SPM diharapkan dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dasar. Kebijakan pembangunan diintegrasikan dengan rencana pencapaian SPM dan alokasi pendanaan diarahkan untuk prioritas pencapaian penyediaan layanan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

1.1.3.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Ham;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 66);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 28).

1.1.3.3. KEBIJAKAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, bahwa kebijakan umum dan program pembangunan merupakan suatu jembatan untuk menghubungkan antara rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan umum merupakan arah kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai sasaran yang terukur dari masing-masing sasaran dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sedangkan program pembangunan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau bersama masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah untuk tahun 2021-2026 adalah "Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera". Adapun penyusunan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo yang akan ditempuh dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
Misi 1 : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.	Membangun harmoni sosial dalam masyarakat, Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat,	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan Perda dan Perkada	100%
				Jumlah kasus yang ditindak lanjuti	100%
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif,	Program pengelolaan pendidikan	APK PAUD 3-6 tahun	61,52 angka
				Angka partisipasi kasar	100 angka

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.		terjangkau, dan bermutu		(APK) SD/ MI/ paket A	
				Angka partisipasi kasar (APK) SMP/ MTs/ paket B	94 angka
				Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A	99,49 angka
				Angka partisipasi murni (APM) SMP/ MTs/ paket B	82,84 angka
				Persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah yang tertangani	35%
				Persentase anak usia pendidikan dasar dengan disabilitas yang terlayani pendidikan formal	21%
				Persentase sekolah ramah anak	28%
				Persentase sarpras SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	80,13%
				Persentase sarpras SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan	79,09%
				Persentase PAUD (TK/ RA/KB/SPS)	60,54%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				yang terakreditasi	
				Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	77,07%
				Persentase anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	43,68%
				Persentase warga negara usia 7-12 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI	100%
				Persentase warga negara usia 13-15 tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Persentase kenaikan akreditasi sekolah jenjang pendidikan dasar	27,83%
				Persentase pendidik jenjang pendidikan dasar dengan kualifikasi pendidikan S1/D4 dan bersertifikat pendidik	62,28%
				Persentase pendidik PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1/D4	42,83%
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang memenuhi tingkat kompetensi mahir assesment nasional	45%
				Persentase sekolah jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan pembelajaran muatan lokal	100%
				Persentase PAUD yang melaksanakan	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				pembelajaran muatan lokal	
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio kecukupan guru kelas SD	1 angka
				Rasio ketercukupan guru SMP	0,96 angka
			Program Pengendalian perizinan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan non formal terakreditasi	55,56%
				Persentase kenaikan akreditasi sekolah yang diselenggarakan masyarakat jenjang pendidikan dasar	5,51%
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat,	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase puskesmas terakreditasi utama dan paripurna	37,5%
				Persentase puskesmas yang memiliki sarana dan prasarana sesuai standar SPM	86,29%
				Rasio bed rawat inap per satuan penduduk	0,72 angka
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional	98,63%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	98,46%
				Indeks kepuasan pelanggan labkesda	87 angka
				Rata-rata capaian SPM puskesmas	88,33 angka
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,4%
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	99,91%
				Cakupan penduduk yang	83,67 angka

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				memiliki jaminan kesehatan	
				Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin	98,78 angka
				Persentase desa ODF	62,59%
				Persentase sarana air minum yang sesuai standar	79,65%
				Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	77,5%
				Bed occupancy ratio/tingkat pemakaian bed pasien di RS	65 angka
				Baku mutu limbah cair: COD (Chemical Oxygen Demand)	80 angka
				Prevalensi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	9,72 angka
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	100 angka
				Prevalensi bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	3,67 angka

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Prevalensi gizi buruk pada anak balita	0,18 angka
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	2,27 angka
				Persentase orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	75%
				Persentase orang berisiko HIV yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar	98,58%
				Persentase penduduk usia produktif (15-59) tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80%
				Persentase penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	85,1%
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	37,16%
				Persentase penderita DM yang mendapat	100%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	88%
				Persentase merokok penduduk usia <18 tahun	5%
				Angka kesakitan penyakit menular	3 angka
				Angka kesakitan penyakit tidak menular	13 angka
				Persentase faskes dasar dan rujukan yang terintegrasi dengan layanan PSC 119	100%
				Persentase puskesmas dengan layanan pendaftaran online	100%
				Persentase kasus gawat darurat yang ditangani dengan SPGDT (Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu)	100%
			Program Peningkatan Kapasitas	Persentase puskesmas yang memiliki tenaga	36,27%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
			Sumber Daya Manusia Kesehatan	kesehatan sesuai standar	
				Rasio dokter per satuan penduduk (per 10.000 penduduk)	2%
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	93,84%
				Persentase makanan di kantin sekolah dan industri rumah tangga yang memenuhi syarat	97%
				Persentase industri rumah tangga pangan yang memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	83,71%
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita	1%
				Persentase posyandu dengan strata mandiri	80%
				Persentase poskestren aktif	80%
				Cakupan desa siaga aktif strata mandiri	26,41 angka
				Persentase PPKS yang terlayani	76%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
		Meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	jaminan sosial (%)	
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social di luar panti (%)	100%
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100%
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100
Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.	Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas, Meningkatkan perkembangan wilayah	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Limbah Domestik Layak	62,52 %
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Fasilitas Sanitasi (Tempat BAB)	95 %
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki	13,16 %

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Akses Sanitasi Aman	
		Meningkatnya layanan akses air minum layak,	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Layanan Air Minum Layak	100,00 %
		Tersedianya perumahan dan kawasan pemukiman layak huni,	Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	100%
				Jumlah rumah tangga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tanggap terhadap perubahan iklim dan mengurangi tingkat risiko bencana yang terintegrasi dari hulu ke hilir	Terwujudnya wilayah yang berketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	40%
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,4%

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0,71%
				Persentase desa dan kelurahan tangguh bencana	5,66%
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh unit damkar dalam waktu tanggap (response time)	70%
				Persentase layanan pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan yang dibentuk dan dilatih oleh unit damkar dalam waktu tanggap (Response Time)	20%

1.1.3.4. ARAH KEBIJAKAN

Penjabaran program pembangunan sebagai implementasi dari kebijakan umum pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2021-2026 yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

Urusan ini mempunyai arah kebijakan sebagaimana tabel di bawah ini:

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	Menjamin pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun		
	Rata rata lama sekolah		

b. Urusan Kesehatan

Arah Kebijakan Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan sasaran penerapan paradigma sehat dan peningkatan kesehatan yang salah satunya fokus pada pengembangan layanan kesehatan dasar, sarana, prasarana dan penanganan kegawatdaruratan	Angka keselamatan ibu	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan
	Angka kelangsungan hidup bayi	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan ibu bayi baru lahir	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan
	Prevalensi stunting	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan anak usia balita dan anak usia sekolah dasar	Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat secara berkelanjutan
	Angka kesakitan	Menjamin pemenuhan SPM pada pelayanan kesehatan usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, ODGJ, penderita DM, terduga TB dan orang beresiko HIV	Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta kedaruratan kesehatan
	Persentase ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat	Menjamin pemenuhan SPM pada sarana	Peningkatan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan

	Kesehatan (SPA) di Puskesmas	prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas	
--	------------------------------	---	--

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah kebijakan dari Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Integrasi dan Sinkronisasi program pemicu kesehatan dengan lokasi program layanan akses air limbah domestik	Indeks Sanitasi	Memperluas cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi dengan prinsip kolaborasi melalui percepatan peningkatan akses layanan prinsip kolaborasi melalui percepatan peningkatan akses layanan pengelolaan air limbah domestik layak	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Percepatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bagi desa/kawasan dengan tingkat cakupan akses sanitasi rendah/ di bawah rata-rata Kabupaten Wonosobo			
Percepatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disesuaikan karakteristik fisik wilayah			
Percepatan implementasi layanan lumpur tinja terjadwal dan tidak terjadwal			
Peningkatan kerjasama pendanaan dengan berbagai pihak bagi perluasan akses sanitasi			
Peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pasokan air baku	Indeks Layanan Air Minum	Meningkatnya cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum melalui peningkatan akses layanan air minum layak yang berkelanjutan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Penerapan pendekatan berbasis masyarakat di kawasan perdesaan dan kawasan yang tidak terjangkau pelayanan PDAM			

Koordinasi dan sinkronisasi upaya penyelamatan konservasi mata air dan kawasan resapan air			
Fasilitasi kerjasama kolaborasi untuk perluasan akses air minum			

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH Jumlah rumah tidak layak huni Jumlah rumah yang tidak dihuni Rasio rumah dan KK Jumlah rumah pembangunan baru 	<ul style="list-style-type: none"> Pengalokasian anggaran penerapan SPM Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencapaian SPM Pendataan dan penghitungan kebutuhan yang dilakukan secara berkelanjutan Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur pengembangan wilayah yang berkualitas

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Arah Kebijakan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan penegakan peraturan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penanganan gangguan tibumtranmas yang diselesaikan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengalokasian anggaran penerapan SPM Meningkatkan pemenuhan SPM 	"Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemulihan Ekonomi untuk Peningkatan Kesejahteraan

	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan • Persentase titik-titik lokasi yang bebas pelanggaran peraturan daerah 	terkait gangguan tibumtranmas	Masyarakat"
--	--	-------------------------------	-------------

f. Urusan Sosial

Arah Kebijakan Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Menurunkan Angka Kemiskinan	Cakupan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan terhadap jumlah keseluruhan PPKS	Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Percepatan Pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti	
		Pemberian layanan rehabilitasi sosial pada saat tanggap darurat bencana dan pasca tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	

1.1.3.5. KEBIJAKAN ANGGARAN SPM

Pada Tahun 2024, penganggaran kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan Minimal per urusan dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Urusan	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Lainnya
1.	Pendidikan		63.229.177.440	
2.	Kesehatan		5.525.430.735	
3.	Pekerjaan Umum		35.124.761.000	
4.	Perumahan Rakyat		611.500.000	
5.	Trantibumlinmas		5.484.438.627	
6.	Sosial		830.000.000	
	Jumlah		110.805.307.802	

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1
Tabel Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	70,18	70,63	0,64
2.	Angka Kemiskinan	15,58%	15,28%	1,96
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,95%	4,02%	0,23
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,30	4,57	6,28
5.	PDRB Per Kapita	Rp. 25.650.000	Rp.27.190.000	6,004
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,355	0,334	6,29

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 (diolah)

A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks ini dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM merupakan indeks komposit (gabungan) hasil agregasi tiga jenis indeks yang masing-masing mewakili dimensi pembangunan manusia, yakni indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup.

Gambar 2.1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Perubahan nilai IPM di Kabupaten Wonosobo dari gambar diatas menunjukkan bahwa nilai dari komponen penilaian IPM terus mengalami kenaikan sampai tahun 2024. IPM Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan dari 70,18 pada tahun 2023 menjadi 70,63 pada tahun 2024, tumbuh 0,64 persen atau meningkat sebesar 0,45 poin dibandingkan capaian tahun 2023 yang sebesar 70,18. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Wonosobo rata-rata tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun, komponen tersebut diantaranya Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata lama sekolah serta Pengeluaran perkapita Disesuaikan. Keempat komponen tersebut menunjukkan perubahan nilai menuju nilai yang lebih baik pada tahun 2021 sampai tahun 2024 memang tidak sepesat pada pertumbuhan sebelumnya. Hal tersebut dipicu oleh melambatnya pertumbuhan pada hampir semua dimensi pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perubahan komponen penyusunannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Wonosobo
Menurut Komponen Tahun 2021-2024

Komponen	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	73,82	73,89	74,01	74,25
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,76	11,78	11,80	11,81
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,82	6,88	6,89	6,90
Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (PPP)	Rp.000	10.760	11.108	11.577	11.980
IPM *)	Angka	69,24	69,69	70,18	70,63

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024 (diolah)

Secara umum IPM Tahun 2024 mengalami kenaikan. Angka Harapan Hidup selama empat tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2024, telah mengalami peningkatan sebesar 0,43 tahun, atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Sedangkan angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2021 hingga 2024, telah mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen per tahun, sementara angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga meningkat sebesar 0,33 persen per tahun. Untuk pengeluaran per kapita di tahun 2024 yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Wonosobo mencapai Rp. 11.980 ribu per orang per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp.11.577 ribu per orang per tahun atau kenaikannya sebesar 3,48 persen.

Perbandingan pencapaian pembangunan manusia tingkat kabupaten/kota se-Karesidenan Kedu tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se-Karesidenan Kedu
Tahun 2021-2024

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Magelang	70,23	70,96	71,56	72,10
2.	Kota Magelang	79,43	80,39	81,17	82,15
3.	Kabupaten Purworejo	73,06	73,67	74,35	75,16
4.	Kabupaten Temanggung	69,88	70,77	71,33	71,86
5.	Kabupaten Kebumen	70,56	71,29	71,88	72,48
6.	Kabupaten Wonosobo	69,24	69,69	70,18	70,63

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dibandingkan dengan kabupaten/ kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, nilai IPM Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berada di urutan ke 6 terendah dengan kenaikan

dari tahun 2023 hingga tahun 2024 sebesar 0,45 poin, sedangkan untuk IPM dengan kenaikan tertinggi dari Kota Magelang sebesar 0,98 poin.

Gambaran lebih detail tentang IPM akan dijelaskan melalui komponen angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita sebagai berikut:

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan dari 74,01 pada tahun 2023 menjadi 74,25 pada tahun 2024, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan pada tahun 2024 dapat bertahan hidup hingga usia 74 tahun. Kenaikan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Gambar 2.2
Indeks Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Pada tahun 2024 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Harapan Hidup tertinggi adalah Kota Magelang (77,54) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (74,25). Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1.4
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan
Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024

Nama Wilayah	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota se Eks- Karesidenan Kedu, Nasional dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	74,47	74,57	74,69	74,91
Kabupaten Kebumen	73,55	73,70	74,98	75,22
Kabupaten Purworejo	74,87	75,03	75,37	75,64
Kabupaten Wonosobo	73,82	73,89	74,01	74,25
Kabupaten Magelang	73,88	74,03	74,44	74,68
Kabupaten Temanggung	75,64	75,70	75,77	75,94
Kota Magelang	76,93	77,02	77,22	77,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Selama periode 2021 hingga 2024, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo telah meningkat rata-rata 0,13 persen per tahun.

Kenaikan Angka Harapan Lama di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Gambar 2.3
Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Pada tahun 2024 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Harapan Lama Sekolah tertinggi adalah Kota Magelang (14,62) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (11,81). Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1.5
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Wilayah Eks
Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024

Nama Tempat	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85	12,86
Kabupaten Kebumen	13,35	13,36	13,37	13,39
Kabupaten Purworejo	13,50	13,51	13,53	13,55
Kabupaten Wonosobo	11,75	11,76	11,80	11,81
Kabupaten Magelang	12,55	12,58	12,61	12,62
Kabupaten Temanggung	12,32	12,55	12,61	12,62
Kota Magelang	14,15	14,31	14,40	14,62

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

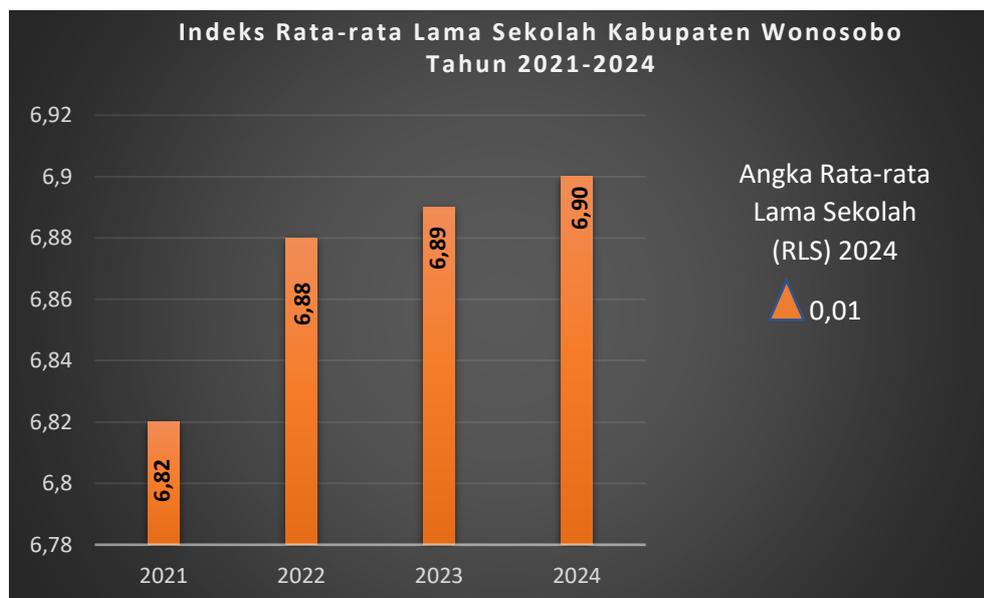
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 sebesar 11,81 Tahun mengalami peningkatan 0,01 poin dari tahun 2023. Nilai tersebut masih dibawah nilai provinsi pada tahun 2024 sebesar 12,86 Tahun. Nilai Harapan Lama Sekolah 11,81 tahun mempunyai arti bahwa anak usia 7 tahun pada tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo hanya memiliki peluang untuk sekolah sampai ke jenjang SMA di saat anak-anak di kabupaten lain setidaknya berpeluang sekolah sampai dengan perguruan tinggi. Nilai tertinggi Harapan Lama Sekolah se Eks Karesidenan Kedu adalah Kota Magelang dengan nilai sebesar 14,62.

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo dari kurun waktu 2021-2024 semakin meningkat dari 6,76 tahun menjadi 6,88 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Wonosobo memiliki pendidikan tertinggi sampai kelas 1 SMP (kelas 7).

Kenaikan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Gambar 2.4
Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Pada tahun 2024 Kabupaten/ Kota se Eks Karesidenan Kedu Angka Rata-rata Lama Sekolah tertinggi adalah Kota Magelang (11,43) dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo (6,90).

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1.6
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/ Kota Wilayah Eks
Karesidenan Kedu dibandingkan Provinsi Tahun 2024

Nama Tempat	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Tahun)			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01	8,02
Kabupaten Kebumen	7,55	7,85	7,86	7,87
Kabupaten Purworejo	8,21	8,32	8,46	8,65
Kabupaten Wonosobo	6,82	6,88	6,89	6,90
Kabupaten Magelang	7,79	7,81	7,82	7,83
Kabupaten Temanggung	7,24	7,25	7,50	7,53
Kota Magelang	10,39	10,62	11,20	11,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Wonosobo dengan daerah lain di eks-

Karesidenan Kedu memiliki nilai yang paling rendah dengan nilai 6,90. Nilai tersebut juga dibawah dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Nilai rata-rata lama sekolah tertinggi di eks-Karesidenan Kedu berada di Kota Magelang dengan nilai 11,43 meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya senilai 0,23 poin.

4) Pengeluaran Riil Per Kapita disesuaikan

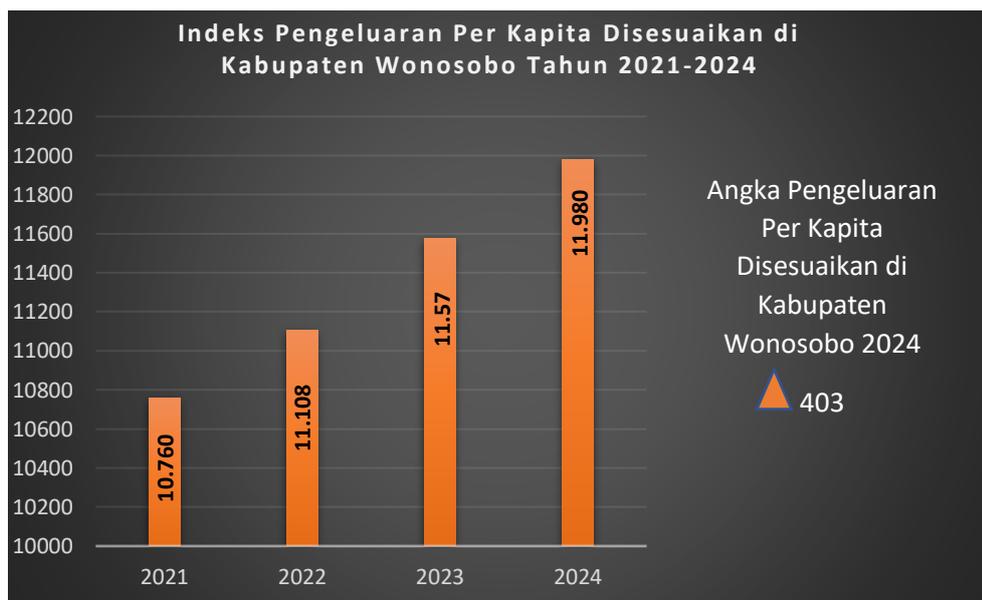
Standar hidup layak menjelaskan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya konsumsi per- kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat jika terjadi peningkatan konsumsi riil perkapita, yaitu peningkatan nominal pengeluaran rumah tangga lebih tinggi dari tingkat inflasi pada periode yang sama.

Pengeluaran per-kapita di Wonosobo meningkat dari Rp11.577 pada tahun 2023 menjadi Rp11.980 pada tahun 2024. Pengeluaran per Kapita ini masih dibawah Pengeluaran per Kapita Provinsi Jawa Tengah yang bernilai Rp12.276 juta.

Kenaikan Angka Pengeluaran Per Kapita disesuaikan di Kabupaten Wonosobo selama tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

Gambar 2.5

Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Nilai Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2024 Kabupaten/Kota se Eks Karesidenan Kedu Disesuaikan tertinggi adalah Kota Magelang dengan nilai 13.619 dan terendah adalah Kabupaten Wonosobo dengan nilai 11.980. Perbandingan Nilai Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.1.7
Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/ Kota Wilayah
Eks Karesidenan Kedu terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Nama Tempat	Pengeluaran Riil Per Kapita per Tahun Kabupaten/Kota se Eks-Karesidenan Kedu dan Jawa Tengah (Ribuan Rupiah)			
	2021	2022	2023	2024
Jawa Tengah	11.034	11.377	11.835	12.276
Kabupaten Kebumen	9.028	9.282	9.374	10.176
Kabupaten Purworejo	10.275	10.671	11.110	11.584
Kabupaten Wonosobo	10.760	11.108	11.577	11.980
Kabupaten Magelang	9.440	10.011	10.493	10.926
Kabupaten Temanggung	9.408	9.773	10.108	10.519
Kota Magelang	12.349	12.816	13.175	13.619

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

B. ANGKA KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan isu Global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian utama. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang berperan dalam menyediakan data kemiskinan, telah menggunakan modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sejak tahun 1976 Pengukuran angka kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh sebab itu, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan juga dapat dilihat menggunakan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin tinggi.

1. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin 123,70 ribu jiwa dan ditahun 2024 turun menjadi 121,49 ribu jiwa. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2021 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.8
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024 (Ribu Jiwa)

Angka Kemiskinan				
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)				
Kabupaten	2021	2022	2023	2024
Wonosobo	139,67	128,11	123,70	121,49

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

2. Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo, mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu dari 15,58 di tahun 2023 menjadi 15,28 di tahun 2024 menurun 0,30 persen terhadap persentase penduduk miskin tahun 2023.

Tabel 2.1.9
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024

Wilayah	Angka Kemiskinan			
	Persentase Penduduk Miskin			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Wonosobo	17,67	16,17	15,58	15,28
Kabupaten Magelang	11,91	11,09	10,96	10,83
Kabupaten Kebumen	17,83	16,41	16,34	15,71
Kabupaten Purworejo	12,40	11,53	11,33	10,87
Kabupaten Temanggung	10,17	9,33	9,26	8,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Posisi persentase kemiskinan di eks-Karesidenan Kedu dengan melihat Tabel diatas menunjukkan bahwa Persentase penurunan kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Kebumen dengan penurunan senilai 0,63 sedangkan persentase penurunan kemiskinan terendah adalah Kabupaten Magelang dengan penurunan senilai 0,13.

3. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 tercatat Rp456.351,-/kapita/bulan meningkat dibandingkan dengan garis kemiskinan tahun 2023 yaitu sebesar Rp425.105,-/kapita/bulan. Artinya, Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 meningkat sebesar 7,40 persen dibandingkan dengan tahun 2023. Tabel 2.1.10 dibawah ini menyajikan perkembangan Garis Kemiskinan pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.1.10

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2023	425.105
2024	456.351
Perubahan 2023-2024 (%)	7,40

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024)

Sedangkan GKNM merupakan Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, Pendidikan dan kesehatan. Paket Komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten/Kota se- Eks Karesidenan Kedu pada periode Tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1.11 dibawah ini:

Tabel 2.1.11

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021-2024

NAMA WILAYAH	GARIS KEMISKINAN (Rp/Kapita/Bulan)			
	2021	2022	2023	2024
Kab. Magelang	353.608,00	377.497,00	411.129,00	431.289,00
Kab. Purworejo	376.127,00	393.731,00	427.622,00	459.253,00
Kab. Kebumen	390.599,00	416.004,00	451.678,00	471.824,00
Kab. Wonosobo	373.474,00	399.180,00	425.105,00	456.351,00
Kab. Temanggung	336.034,00	354.012,00	388.369,00	416.086,00
Kota Magelang	537.783,00	575.130,00	602.794,00	626.614,00

(Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024)

Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp **456.351,00** dengan kenaikan sebesar **31.246,00**. Sedangkan peningkatan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021-2024 adalah Kota Magelang dengan peningkatan sebesar 626.614,00 sedangkan kenaikan tertinggi adalah Kabupaten Purworejo dengan kenaikan sebesar 31.631,00. Tren garis kemiskinan selalu meningkat seiring dengan laju inflasi yang menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, akan tetapi juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus dapat menurunkan tingkat kedalaman dan keparahannya. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin.

Tabel 2.1.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Persen (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Wonosobo	2,75	3,18	2,60	2,41

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Pada periode 2023-2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 2,41, turun dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 2,60.

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada 2024 mengalami penurunan dari 0,63 pada tahun 2023 menjadi 0,60 pada tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.13
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024

Wilayah	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Persen (%)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Wonosobo	0,65	0,86	0,63	0,60

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mendekati angka nol yang artinya semakin rendah kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin. Dengan demikian dapat disimpulkan, turunnya angka kemiskinan di Kabupaten Wonosobo juga bersamaan dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan semakin mendekatnya gap atau ketimpangan antara pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan.

C. ANGKA PENGANGGURAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen yang berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru.

Tabel 2.1.14
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonosobo
Tahun 2021-2024

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Wonosobo	5,26	5,01	4,95	4,02

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Wonosobo di tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,93 persen.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI

Kabupaten Wonosobo sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 931.142 jiwa atau 2,44 persen dari total penduduk di seluruh Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,57 persen.

Gambar 2.6
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

E. PENDAPATAN PER KAPITA

PDRB adalah salah satu data yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan regional, PDRB per kapita, perubahan/ pergeseran struktur perekonomian, tingkat inflasi dan kemakmuran penduduk suatu daerah.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 2.1.15
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wonosobo ADHB
Menurut Pengeluaran 2021-2024 (Persen)

PDRB Pengeluaran Sektor	Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	76,27	76,87	78,09	78,17
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	1,93	1,99	2,04	2,25

PDRB Pengeluaran Sektor	Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,77	7,24	7,06	6,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	19,54	19,05	18,61	19,02
Perubahan Inventori	1,46	1,74	1,73	1,02
Net Ekspor Barang dan Jasa	-6,97	-6,89	-7,52	-7,28
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

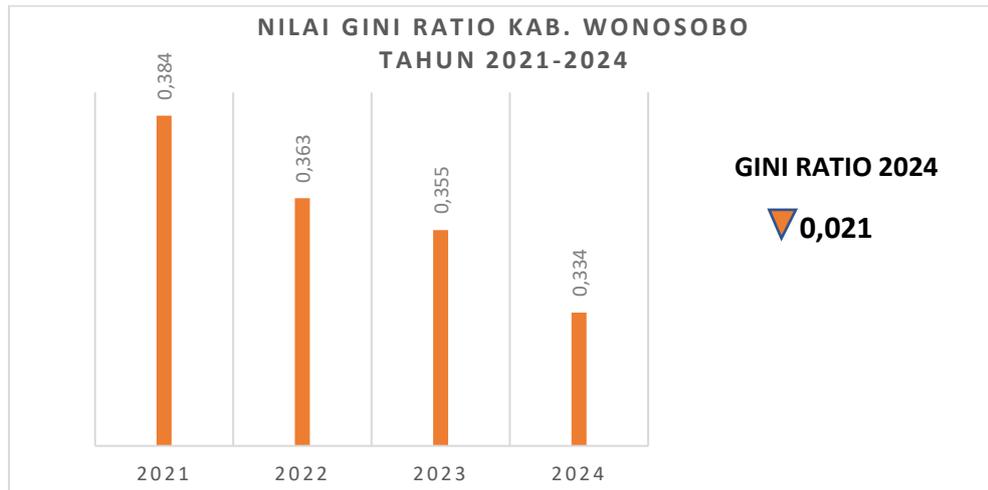
Distribusi PDRB Kabupaten Wonosobo dari tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan di beberapa sektor seperti sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami kenaikan sebesar 0,08 Persen, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga mengalami kenaikan sebesar 0,21 Persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto mengalami kenaikan sebesar 0,41 Persen. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan ada di sektor Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,24 Persen dan sektor Perubahan Inventori mengalami penurunan sebesar 0,71 Persen. Angka PDRB riil per kapita dapat menjadi indikator yang menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

F. KETIMPANGAN PENDAPATAN

Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo selama periode tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Pada tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan menurun 0,008 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,355 sedangkan di tahun 2024 nilai Gini Ratio turun senilai 0,334, angka ini menurun 0,021.

Nilai Penurunan Gini Ratio Kabupaten Wonosobo dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.7
Nilai Gini Ratio Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen penduduk berpendapatan rendah;
- ketimpangan sedang jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen penduduk berpendapatan menengah;
- serta ketimpangan rendah jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 20 persen penduduk berpendapatan tinggi;

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut distribusi pengeluaran kriteria Bank Dunia tahun 2023 dan 2024 dapat kami sajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1.16
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Wonosobo (Persen), 2023 dan 2024

Distribusi Pengeluaran Kriteria Bank Dunia	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan	
	2023	2024
40 persen penduduk berpendapatan rendah/ 40 percent of low-income residents	19,35	20,27
40 persen penduduk berpendapatan menengah/ 40 percent of medium income residents	36,67	37,90
20 persen penduduk berpendapatan tinggi/ 20 percent of high income residents	43,98	41,83
Jumlah/Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Wonosobo, 2024

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator kinerja kunci masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Indikator kinerja kunci tersebut dituangkan dalam jenis indikator kinerja kunci keluaran dan indikator kinerja kunci hasil yang disajikan pada setiap urusan. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

A. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

Untuk laporan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Wonosobo pada Tahun 2024, sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 bertempat di Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk pelaporan Indikator Kinerja Kunci (IKK) hanya dilakukan untuk IKK Makro dan IKK Outcome, sedangkan untuk IKK Keluaran pada SILPPD tidak dilakukan pengentrian karena tidak menjadi komponen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 2.2.1

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan	1	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	25.179	89,844	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	28.025		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	87.166	99,88	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	87.265		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	41.738	92,681	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
				Jumlah anak usia 13-15 Tahun pada kabupaten yang bersangkutan	45.034		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	5.218	53,55	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	9.743			
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah Daya Tampung rumah sakit rujukan	743	0,785	Dinas Kesehatan	
				Jumlah penduduk di kabupaten/kota	945.955			
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	5	100	Dinas Kesehatan	
				Jumlah RS di Kabupaten Kota	5			
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	9.007	96,300	Dinas Kesehatan	
				Jumlah ibu hamil di Kabupaten/kota	9.353			
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	9.312	99,946	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	9.317			
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	9.180	98,171	Dinas Kesehatan
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	9.351		
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	48.415	95,62	Dinas Kesehatan
				Jumlah balita di kabupaten/kota	50.628		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	118.367	89,469	Dinas Kesehatan
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	132.299		
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	370.207	60,986	Dinas Kesehatan
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	607.034		
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	108.736	81,219	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/kota	133.879			
		10 Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108.795	100	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	108.795			
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	7.978	100	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	7.978			
		12 Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	2.475	100	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	2.475			
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.738	100	Dinas Kesehatan	
			Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	11.738			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
		14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	13.356	100	Dinas Kesehatan	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	13.356			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (ha)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi Kewenangan Kabupaten
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/Kota	1			
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/kota (m)	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kabupaten Wonosobo tidak memiliki WS yang menjadi Kewenangan Kabupaten
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan Kab/kota (m)	1			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) di tahun eksisting	14.871,51	70,648	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	21.050			
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kab/kota	232.467	97,11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kab/kota tersebut	239.385			
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	180.711	70,64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			Jumlah rumah di Kabupaten	255.800			
		6 Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	204	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	204			
		7 Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap	631.775	65,93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Panjang jalan keseluruhan di wilayah kab/ kota	958.314			
		8 Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	427	94,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kab/kota	452			
		9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	242	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tidak ada kecelakaan konstruksi
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	242			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	28	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	28				
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	0	0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Surat Pernyataan bahwa Tahun 2024 tidak terdapat fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah
				Jumlah total rumah tangga relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	1				
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	11,09	12,32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
				Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	90,02				
		4		Jumlah unit rumah tidak layak huni	20.122	7,866	Dinas Perumahan, Kawasan		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah total unit rumah kab/kota	255.800		Permukiman dan Perhubungan		
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	3.498	61,95	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan		
			Jumlah unit rumah kab/kota	5.646				
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	100	100	Satpol PP	
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100				
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi ditegakkan	21	100	Satpol PP	
				Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi	21			
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	31.291	100	BPBD	
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan.	31.291			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	2.934	100	BPBD	
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang ditetapkan.	2.934			
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	11.576	100	BPBD	
				Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana: 2.341	11.576			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah	71	100	BPBD	
			Jumlah kejadian kebakaran di kab/kota	71				
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		27,7	BPBD	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	4.530	83,61	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Populasi jumlah penyandang disabilitas terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	5.418			
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	157	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kab/kota	157			

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 2.2.2

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	8	100	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kab/kota	8			
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	12.439	2,41	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan	514.910		
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	16.109.380.000.000	3.128.581.693,8883	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
				Jumlah tenaga kerja	514.910		
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	228	100	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
				Jumlah perusahaan	228		
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	2.385	74,65	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	3.195		Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	60.017.568.077	89,10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	67.356.375.558		
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	29	100	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	29		
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	64	18,63	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA		
		Jumlah penduduk perempuan	343.516				
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya	Jumlah cadangan pangan	9,67	44,62	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Jumlah kebutuhan pangan	21,67		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)						
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi	67,59	97,57	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
			Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	69,27				
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	6.687	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	6.687			
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	156.794	98,87	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan	158.584			
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	0	0	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Jumlah penerima tanah obyek landreform	1			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	0	0	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
				Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	1			
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	9	100		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	9			
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA30%) + (IKD30%) + (ITH40%)		71,11	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Total volume sampah yang dapat ditangani	67.734,36	51	Dinas Lingkungan Hidup	
				Total volume timbunan sampah kabupaten/kota	132.810,96			
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan izin PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	0	0		Dinas Lingkungan Hidup
				Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	205			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	705.135	99,08	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	711.632			
		2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	145.276	61,87		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah anak usia 0-17 tahun	234.311			
		3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	243.141	98,68		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah usia anak 0-18 tahun	246.388			
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4	26,67		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Jumlah OPD	15			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun	20	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
				Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n)	20			
		2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun	7	25,92		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	27			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$		2,23	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/ mCPR</i>)	Jumlah peserta KB aktif modern	106.358	73,78	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
				Jumlah pasangan usia subur	144.147		
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	10.119	7,02	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
Jumlah pasangan usia subur	144.147						
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	1		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		2	V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	V/C ratio di jalan kabupaten /kota	0,428		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	25	64,10	Diskominfo
				Jumlah OPD	39		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			disediakan oleh Dinas Kominfo				
		2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	9	81,82	Diskominfo
				Jumlah layanan publik	11		
		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas dan pemerintah daerah kabupaten/kota	606.148	92,47	Diskominfo
				Jumlah penduduk	655.499		
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	153	67,40	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Jumlah seluruh koperasi	227		
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	17.508	55,68	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Jumlah usaha mikro keseluruhan	31.442		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	-81.139.921.845	-9,95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)
				Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	814.982.531.940			
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten/kota	6.715	3,136	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	214.083			
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	76.144	35,567	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
				Jumlah pemuda (umur 16-30) di kabupaten/kota	214.083			
		3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		19	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	39	100	Diskominfo	data OPD yang terdapat pada portal http://satudata.wonosobokab.go.id/ Diskominfo wsb
				Jumlah OPD	39			
		2	Persentase OPD yang menggunakan data	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik	39	100	Diskominfo	data OPD yang terdapat pada portal

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	39		http://satudata.wonosobokab.go.id/ Diskominfo wsb	
21	Persandian	1 Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	417	64,65	Diskominfo	Jumlah nilai per area keamanan informasi : 417 dan Jumlah area penilaian : 645
			Jumlah area penilaian	645			
22	Kebudayaan	1 Terlestariannya cagar budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	108	33,13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
			Jumlah cagar budaya yang terdata	326			
23	Perpustakaan	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		78,14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
		2 Indeks pembangunan literasi masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	$\sum_{ALM}^{UPLM} x100$	74,65	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
24	Kearsipan	1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	$T = (a + i + s + j)/4$ T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	T = Tingkat ketersediaan arsip = 100 %

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>		<p>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100% i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 100% s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik = 100% j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 100 %</p>
		<p>2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan</p>	<p>$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p>	16,67	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		publik dan kesejahteraan rakyat	<p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>		

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 2.2.3

Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
Urusan Pemerintahan Pilihan								
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota.	9.512,07	93,19	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
				Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan.	10.206,81			
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	794	128,896	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah wisatawan tahun n-1	616			
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan tahun n-1	692.519	39,73	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah wisatawan tahun n-1	1.743.050			
		3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	166.150	36,04	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				Jumlah kamar yang tersedia	460.995			
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai Kontribusi sektor pariwisata pada PDRB.	845,14	3,376	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(Dalam Miliar)
				Total PDRB Berlaku	25.028,17			
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total Realisasi PAD sektor pariwisata.	22.879.097.314	7,486	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
			Total Realisasi PAD	305.608.852 .228			
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	224.428,72	661,463	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
			Luas panen	33.929,13			
		2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya	-223	-58,68	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	380		
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan TAHURA			100	Kewenangan Provinsi
2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga						
3	Pemulihan ekosistem pada TAHURA						
4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA						
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	0	0	Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2019 tidak ada Urusan ESDM yang dilaksanakan Perangkat Daerah
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	1			
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	161	100	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota	161		Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	
		2	Persentase kinerja pupuk	Realisasi	18.605,202	49,82	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				RDKK	37.339,686		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan	3.090	18,76	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/ kota	16.471		
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	1.052	5,47	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	19.207		

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	64,7	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	4.952	100	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	
			Jumlah izin yang dikeluarkan	4.952				
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Tahun 2024 DPMPTSP tidak mengeluarkan IPI
			Jumlah izin yang dikeluarkan	1				

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dan DPMPTSP	Tahun 2024 tidak dikeluarkan IUKI dan IPKI
				Jumlah izin yang dikeluarkan	1			
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : a. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) b. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) c. Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: a. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) b. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)		85,71	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
32	Transmigrasi	- -	-	-	-	-	Tidak terdapat kawasan transmigrasi di Kabupaten Wonosobo

C. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2.2.4

Indikator Kinerja Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
33	Perencanaan dan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	232.274.079.364	10,74	BPPKAD
				Jumlah APBD	2.162.787.509.404		
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	307.365.225.961	14,60	BPPKAD
				Jumlah Pendapatan pada APBD	2.105.841.974.383		
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Inspektorat	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja		Sumber Data	Keterangan		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Inspektorat		
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – <i>transfer expenditures</i> Jumlah belanja APBD	1.760.857.593.334 2.162.787.509.404	81,416	BPPKAD	
		6	Opini laporan keuangan	Opini laporan keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	BPPKAD	
34	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang Ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	0	0	Bagian PBJ	Tidak terdapat Kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah yang ditandatangani pada kuartal pertama di tahun 2024
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	2.476			
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	2.476	56,646	Bagian PBJ	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif	4.371			
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan	220.453.484.547	12,87	Bagian PBJ	
			Total belanja operasi dan modal	1.712.692.153.437			
		4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	-98.701.010.382	-14,11	Bagian PBJ	
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	699.303.348.950			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
35	Kepegawaian	1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas	893	61,54	BKD	
			Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	1.451			
		2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	524	36,11	BKD	
			Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.451			
		3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	318	60,68	BKD	
			Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	524			
36	Manajemen Keuangan	1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja	2.162.787.509.404	3,42	BPPKAD	
			Total belanja APBD	2.239.354.766.390			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi	307.365.225.961	2,30	BPPKAD
				Total PAD dalam APBD	314.598.106.120		
		3	Assets Management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	1. Ya	BPPKAD	
				2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)	2. Ya		
3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)	3. Ya						
4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4. Ya						
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	33.706.944.828,91	1,525	BPPKAD
				Total belanja anggaran tahun sebelumnya	2.210.013.276.667		
37	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.104.821.378.915	96,64	BPPKAD
				Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	2.177.890.038.038		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja			Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
		2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di <i>website</i> pemda	174	100	Kominfo	
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	174			

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah telah mewajibkan semua entitas pemerintahan untuk melaporkan kinerja sebagai pertanggungjawaban atas APBN/APBD yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan kinerja ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dengan pendanaannya melalui APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas akuntabilitas kinerja, dari tingkat pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sampai dengan perangkat daerah.

Lebih lanjut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan untuk mendukung kualitas penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, dimana penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi Kinerja.

Namun demikian sesuai arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021, bahwa pemerintah kabupaten/kota dan provinsi tidak menyusun laporan kinerja tersendiri, namun disusun menjadi satu dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal tersebut sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan laporan. Informasi laporan kinerja pemerintah daerah yang terdapat dalam LPPD tetap mencakup perencanaan kinerja dan capaian akuntabilitas kinerja. Kaidah penyusunan uraian laporan kinerja yang menjadi bagian dalam LPPD tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pertama Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang mengusung visi Bupati dan Wakil Bupati yaitu "Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera", kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program dan kegiatan indikatif beserta rencana pendanaannya yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sebagai respon atas kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

2.3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penetapan indikator dan target kinerja Daerah melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2024 bermaksud untuk memberikan gambaran tentang target pencapaian Visi dan Misi Daerah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026. Tingkat keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran dan indikator program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur secara spesifik baik secara kuantitatif dan/atau kualitatif tingkat capaian kinerja program dan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja menjadi dasar penilaian kinerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator tersebut menjadi parameter prioritas pembangunan dan juga sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi RPJMD.

Pada praktiknya, target indikator kinerja tahunan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati. Perjanjian Kinerja Bupati Wonosobo Tahun 2024 terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis dan 41 (empat puluh satu) indikator kinerja, serta target untuk pencapaian tahun 2024. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran menjadi dasar laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tema pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2024, yaitu "Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah" sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Wonosobo

No	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik	Indeks Hak Politik	Angka	70,27
2	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Angka	84
3	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas)	Indeks Rasa Aman	Angka	83

No	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	77
		Nilai SAKIP	Angka	68,64
		Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,55
5	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Indeks Merit	Angka	270
		Indeks SPBE	Angka	3,54
6	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	98,26
7	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai ketercapaian SPM layanan dasar	Angka	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90,88
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	%	3,00-4,50
		Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	%	3,50-5,00
		Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	%	2,50-4,00
9	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran belanja (<i>Spending of money</i>) wisatawan	(Rp/orang)	800.000
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi daerah	trilyun Rp	3,8
11	Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	Persentase usaha mikro naik kelas	%	5,35
		Pertumbuhan koperasi sehat	%	2,33
		pertumbuhan strata BUMDes	%	20
12	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah	Rp/bln	399.483
13	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,90-3,50
14	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	10,52
15	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	72,72
16	Meningkatkannya kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	65,22
		Indeks Desa Membangun (IDM)	%	0,721
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,91
17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	53,88

No	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	64,5
19	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Indeks Sanitasi	Angka	64,58
20	Meningkatnya layanan akses air minum layak	Indeks layanan air minum	Angka	89
21	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	66,95
22	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Angka	72
23	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	75
24	Meningkatnya aksesibilitas wilayah, konektivitas wilayah dan penataan ruang wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Angka	1,08
		Rasio Konektivitas Wilayah	Angka	97
		Indeks Penataan Ruang	Angka	83
25	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	51,16
		Indeks Kualitas Udara	Angka	90,57
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	56,21
26	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	%	53,51
27	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,84

Di samping sasaran strategis, indikator kinerja dan target, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 juga mencantumkan program dan anggaran tahun 2024. Program dan anggaran tersebut sebagai pendukung utama upaya pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.

Tabel 2.3.2
Program dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 175.349.687.440
2	Program Pengembangan Kurikulum	Rp 260.000.000
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rp 200.000.000
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 400.000.000
5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 13.920.000.000
6	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 200.000.000
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 92.236.026.972
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 1.201.591.305
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 1.390.679.480
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 1.756.295.700

No	Program	Anggaran
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 8.161.250.000
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 15.583.264.000
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 19.036.497.000
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp 350.000.000
15	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 813.120.000
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 1.450.000.000
17	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 111.705.349.380
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 30.000.000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 750.000.000
20	Program Pengembangan Perumahan	Rp 610.000.000
21	Program Kawasan Permukiman	Rp 2.275.600.000
22	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 360.000.000
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 10.669.500.000
24	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 50.000.000
25	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 50.000.000
26	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 11.953.622.500
27	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 75.000.000
28	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 2.953.610.000
29	Program Penanggulangan Bencana	Rp 1.395.000.000
30	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 180.000.000
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 836.200.000
32	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 900.000.000
33	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 5.483.172.600
34	Program Penanganan Bencana	Rp 135.000.000
35	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 45.000.000
36	Program Penataan Desa	Rp 75.000.000
37	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 385.000.000
38	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 8.274.800.000
39	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 840.000.000
40	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 10.000.000
41	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.920.000.000
42	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 230.000.000
43	Program Hubungan Industrial	Rp 185.000.000
44	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 5.269.002.000
45	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 16.540.821
46	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Rp 135.000.000
47	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 25.650.000
48	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 40.000.000

No	Program	Anggaran
49	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 500.000.000
50	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 5.830.448.400
51	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 27.068.000.000
52	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 601.150.000
53	Program Penyuluh Pertanian	Rp 297.500.000
54	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 176.107.500
55	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 538.261.400
56	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 1.700.297.914
57	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 35.000.000
58	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 46.950.000
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 100.000.000
60	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 10.000.000
61	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 13.342.155.500
62	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 1.132.999.360
63	Program Pencatatan Sipil	Rp 192.250.000
64	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 170.100.000
65	Program Pengurusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 570.654.292
66	Program Perlindungan Perempuan	Rp 110.000.000
67	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 598.257.643
68	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 18.000.000
69	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 110.000.000
70	Program Pengendalian Penduduk	Rp 136.272.744
71	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7.836.661.000
72	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 4.709.800.000
73	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 3.111.300.000
74	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 1.433.000.000
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 56.000.000
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 20.000.000
77	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 33.200.000
78	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 350.000.000
79	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 611.687.000
80	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1.294.300.000
81	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp 21.180.000
82	Program Pengelolaan Arsip	Rp 253.000.000
83	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 1.271.000.000
84	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 50.000.000
85	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 7.013.201.000
86	Program Pemasaran Pariwisata	Rp 650.000.000

No	Program	Anggaran
87	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp 170.000.000
88	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 1.668.000.000
89	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 43.692.000
90	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 27.065.549
91	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp 525.170.000
92	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 500.000.000
93	Program Pembangunan Umkm	Rp 557.174.131
94	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 8.100.000
95	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 735.783.375
96	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 1.062.887.855
97	Program Pengembangan Ekspor	Rp 12.150.000
98	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 97.257.135
99	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 12.150.000
100	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 4.552.713.311
101	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 1.960.738.176
102	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Rp 4.552.713.311
103	Program Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 491.000.000
104	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 810.592.200
105	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 394.000.000
106	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 401.920.999.400
107	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 864.423.900
108	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.767.801.331
109	Program Kepegawaian Daerah	Rp 1.044.200.000
110	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 591.062.069
111	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 125.000.000
112	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 1.179.507.869
113	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 18.290.011.436
114	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 1.851.180.918
115	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 2.013.896.022
116	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 1.358.179.046
117	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 1.075.000.000
118	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 31.507.557.800
119	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 2.100.000.000
120	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 175.000.000

No	Program	Anggaran
121	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 789.823.700
122	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.042.980.350.319

2.3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024

Tahun 2024 adalah tahun ketiga perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Dalam perencanaan kinerja memuat sasaran dan indikator sasaran Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) atas penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2023 ini berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 mengacu arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta memperhatikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024, sehingga terdapat penyesuaian-penyesuaian target atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Terdapat 41 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh OPD.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- (1) Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- (2) Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, sehingga menggunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{target}(\text{realisasi}-\text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Tabel 2.3.3
Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023	2024				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pemenuhan hak-hak politik	Indeks Hak Politik	Angka	66,42	70,27	70	99,62%	Sangat Tinggi	70,27	99,62%
2	Meningkatnya toleransi kehidupan bermasyarakat	Indeks Toleransi	Angka	73	84	79,87	95,08%	Sangat Tinggi	87	91,80%
3	Meningkatnya Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas)	Indeks Rasa Aman	Angka	74,78	83	75,44	90,89%	Sangat Tinggi	85	88,75%
4	Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	76,44	77	81,06	105,27%	Sangat Tinggi	80	101,33%
		Nilai SAKIP	Angka	66,96	68,64	67,04	97,67%	Sangat Tinggi	72,47	92,51%
		Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,53	3,55	2,83	79,72%	Tinggi	3,59	78,83%
5	Mewujudkan pemerintahan yang kapabel	Indeks Merit	Angka	267	270	289,5	107,22%	Sangat Tinggi	300	96,50%
		Indeks SPBE	Angka	3,54	3,54	3,79	107,06%	Sangat Tinggi	3,02	125,50%
6	Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Angka	98,26	98,26	97,61	99,34%	Sangat Tinggi	95	102,75%
7		Nilai ketercapaian	Angka	100	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	100	100,00%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023	2024				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya pelayanan publik	SPM layanan dasa								
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	89,74	90,88	90,85	99,97%	Sangat Tinggi	84,5	107,51%
8	Meningkatnya pertumbuhan sektor dominan	Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	%	0,49	3,00-4,50	5,21	2234,67%	Sangat Tinggi	2,00-4,00	3352,00%
		Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	%	4,68	2,50-4,00	1,42	40,57%	Rendah	3,50-5,00	28,40%
		Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	%	4,36	2,50-4,00	3,35	134%	Sangat Tinggi	2,50-4,00	83,75%
9	Berkembangnya potensi sektor pariwisata	Rata-rata pengeluaran belanja (<i>Spending of money</i>) wisatawan	(Rp/orang)	1.054.759	800.000	928.143	116,02%	Sangat Tinggi	1.000.000	92,81%
10	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi daerah	milyar	8,1	3,1	7,37	237,89%	Sangat Tinggi	3,9	189,09%
11	Meningkatnya pertumbuhan UMKM, koperasi dan lembaga ekonomi desa	Persentase usaha mikro naik kelas	%	0,99	5,35	0,021	0,39%	Sangat Rendah	0,021	3,50%
		Pertumbuhan koperasi sehat	%	2,48	2,33	2,44	104,7%	Sangat Tinggi	2,33	104,72%
		pertumbuhan strata BUMDes	%	21,59	20	17,97	89,85%	Tinggi	16,67	107,80%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023	2024				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah	Rp/bln	459.976	399.483	496.875	124,38%	Sangat Tinggi	401.392	123,79%
13	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,95	2,90-3,50	4,02	99,50%	Sangat Tinggi	2,90-3,50	85,14%
14	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	10,16	10,52	10,17	96,67%	Sangat Tinggi	10,69	95,14%
15	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Angka	74,01	72,72	74,25	102,10%	Sangat Tinggi	72,72	102,10%
16	Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan dalam dimensi sosial	Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	79,74	65,22	82,65	126,72%	Sangat Tinggi	65,22	126,72%
		Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,7748	0,721	0,793	109,99%	Sangat Tinggi	0,721	109,99%
		Indeks Pembangunan Gender	Angka	92,65	92,91	92,65	99,72%	Sangat Tinggi	92,96	99,67%
17	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	51,4	53,88	53,1	98,55%	Sangat Tinggi	54	98,33%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023	2024				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	64,14	64,5	65,93	102,22%	Sangat Tinggi	65	101,43%
19	Meningkatnya layanan akses air limbah domestik layak	Indeks Sanitasi	Angka	45,5	64,58	54,5	84,39%	Tinggi	77,08	70,71%
20	Meningkatnya layanan akses air minum layak	Indeks layanan air minum	Angka	87,74	89	83,17	93,45%	Sangat Tinggi	91	91,40%
21	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Angka	65,79	66,95	64,71	96,65%	Sangat Tinggi	69,8	92,71%
22	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Angka	69,65	72	92,8	128,89%	Sangat Tinggi	75,15	123,49%
23	Tersedianya perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni	%	87,36	75	99,44	132,59%	Sangat Tinggi	75	132,59%
24	Meningkatnya aksesibilitas wilayah, konektivitas wilayah dan penataan ruang wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	Angka	1,08	1,08	1,08	100,00%	Sangat Tinggi	1,26	85,71%
		Rasio Konektivitas Wilayah	Angka	100	97	100	100	Sangat Tinggi	97	103,09%
		Indeks Penataan Ruang	Angka	66,75	83	82,2	99,04%	Sangat Tinggi	93,25	88,15%
25	Meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	52,5	51,16	51,15	99,98%	Sangat Tinggi	51,16	99,98%
		Indeks Kualitas Udara	Angka	88,6	90,57	92,05	101,63%	Sangat Tinggi	91,9	100,16%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	47,92	56,21	66,67	118,61%	Tinggi	57,55	115,85%

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	2023	2024				Target Akhir RPJMD	Capaian terhadap Target Akhir RPJMD
				Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah yang terkelola	%	41,04	53,51	51	95,31%	Tinggi	60	85,00%
27	Meningkatnya ketahanan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,88	0,84	0,9	107,14%	Sangat Tinggi	0,84	107,14%

Mencermati tabel di atas, berdasarkan perencanaan kinerja sebagaimana telah didokumentasikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian/realisasi kinerja masing-masing indikator telah dapat disajikan. Capaian kinerja dapat diklasifikasikan dalam skala nilai peringkat kinerja yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tabel 2.3.4
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja tersebut, realisasi/capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 dapat diklasifikasikan dalam tabel rekapitulasi skala capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.3.5
Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sangat Tinggi	36	87,80%
2	Tinggi	3	7,32%
3	Sedang	0	0,00%
4	Rendah	1	0,00%
5	Sangat Rendah	1	4,88%
	JUMLAH	41	100,00%

Terdapat 36 indikator sasaran dengan capaian masuk kriteria "sangat tinggi", 3 indikator dalam kriteria "tinggi", 1 indikator "rendah" yaitu Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB dan 1 indikator masuk kriteria capaian "sangat rendah" yaitu Persentase usaha mikro naik kelas. Hal tersebut tentunya menjadi catatan penting bagi Daerah dalam upaya akselerasi kinerja untuk tahun berikutnya.

Selanjutnya penjelasan tentang pencapaian masing-masing indikator sasaran sebagaimana uraian-uraian sebagai berikut:

1) Indeks Hak Politik

Indeks politik umumnya merujuk pada alat ukur atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam politik, baik tingkat kebebasan politik, stabilitas politik, kualitas pemerintahan, serta tingkat partisipasi politik.

Indeks Hak Politik Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 70, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 70,27 dengan capaian 99,62%, namun demikian Indeks Hak Politik Tahun 2024 meningkat sebesar 5,9% dibandingkan dengan Indeks Hak Politik Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 66,42. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 70,23, Indeks Hak Politik Tahun 2024 telah mencapai 99,62%. Tabel berikut merupakan gambaran perkembangan Indeks Hak Politik dari tahun 2021-2024 di Wonosobo:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Hak Politik	66,42	66,42	66,42	70

Sasaran meningkatnya pemenuhan hak-hak politik didukung dengan pelaksanaan program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik. Meningkatnya capaian Indeks Hak Politik Tahun 2024 dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula dan Masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran partisipasi dalam pemilu. Selanjutnya untuk meningkatkan realisasi kinerja Indeks Politik perlu dilakukan 1) Peningkatan kualitas sarana prasarana yang inklusif agar penyandang disabilitas dapat mengakses TPU sehingga mendorong persentase pemilih,2).Melakukan pemberdayaan organisasi masyarakat untuk membantu mendukung memperjuangkan hak politik, kebebasan sipil dan HAM, 3) Menambah intensitas kegiatan pendidikan politik melalui berbagai media baik daring maupun luring.

2) Indeks Toleransi

Indeks toleransi adalah ukuran nilai toleransi masyarakat dalam menerima perbedaan agama dan suku di lingkungannya. Indeks toleransi juga dapat diartikan sebagai tolak ukur kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tentram. Indeks toleransi dapat dihitung dengan mempertimbangkan aspek dan indikator tertentu. Penimbang untuk aspek dan indikator tersebut didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Indeks toleransi dapat diukur melalui:

- Memeriksa seberapa besar kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin dan dilindungi;
- Menghitung rata-rata potensi konflik agama, gangguan dari kelompok radikal, dan sosial yang tertangani;
- Melakukan survei dan eksperimen yang memerlukan data statistik.

Indeks Toleransi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 79,87, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 84 dengan capaian 95,08%, namun demikian Indeks Toleransi Tahun 2024 meningkat sebesar 9,41% dibandingkan dengan Indeks Toleransi Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 73. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 87, Indeks Toleransi Tahun 2024 telah mencapai 91,80%. Tabel berikut merupakan gambaran perkembangan Indeks Toleransi dari tahun 2021-2024 di Wonosobo

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Toleransi	79,5	81	73	79,87

Dalam mencapai kinerja, Indeks Toleransi untuk membangun harmoni sosial dalam masyarakat didukung dengan program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya dan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan *leading sector* badan kesatuan bangsa dan politik.

Di tingkat nasional Indeks Toleransi berkorelasi dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). IKUB Nasional pada tahun 2024 tercapai sebesar 76,47. Jika dibandingkan dengan capaian nasional, Indeks Toleransi Kabupaten Wonosobo telah tercapai lebih dari realisasi nasional.

Tingginya capaian Indeks Toleransi di Kabupaten Wonosobo tidak lepas dari upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah dengan menyelenggarakan kegiatan lintas agama yang cukup tinggi intensitasnya serta penguatan sistem demokrasi. Penguatan sistem demokrasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan program peningkatan partisipasi publik dalam pemilu serta upaya penanganan konflik sosial. Penanganan konflik di Tahun 2024 sendiri telah tercapai 100% berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja capaian Indeks Toleransi perlu dilakukan upaya internalisasi pendidikan multikultural dan toleransi pada lembaga pendidikan dasar maupun menengah serta meningkatkan internalisasi budaya toleransi melalui berbagai media baik daring ataupun luring.

3) Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah alat ukur yang menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat di suatu wilayah, yang penting bagi penilaian kualitas hidup dan kebijakan pembangunan. Indeks Rasa Aman mengukur persepsi masyarakat terhadap keamanan di lingkungan mereka, yang berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Indeks ini merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan kebijakan pembangunan daerah. Indeks ini dapat mencakup aspek seperti keamanan fisik, keamanan dari kejahatan, dan rasa aman secara umum.

Indeks Rasa Aman Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 75,44, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 83 dengan capaian 90,89% namun demikian Indeks Rasa Aman Tahun 2024 meningkat sebesar 0,88% dibandingkan dengan Indeks Rasa Aman Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 74,78. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 85, Indeks Rasa Aman Tahun 2024 telah mencapai 88,75%. Berikut merupakan data perkembangan Indeks Rasa Aman Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Rasa Aman	81,5	73,84	74,78	75,44

Dalam mencapai kinerja, Indeks Rasa Aman untuk meningkatkan kantrantibmas didukung dengan program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial. Upaya dalam mewujudkan kinerja tingkat keamanan dan kenyamanan dilakukan dengan metode kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal terutama jika terdapat *event-event* besar seperti pesta demokrasi (pemilu), hari libur nasional, cuti besar dan kegiatan keagamaan maupun sosial. Namun demikian belum tercapainya target Indeks Rasa Aman disebabkan beberapa faktor seperti 1). Kerentanan Bencana, terkait dengan kondisi geografis Kabupaten Wonosobo yang rawan kebencanaan terutama tanah longsor; 2). Kejadian kriminalitas yang masih terjadi di masyarakat.

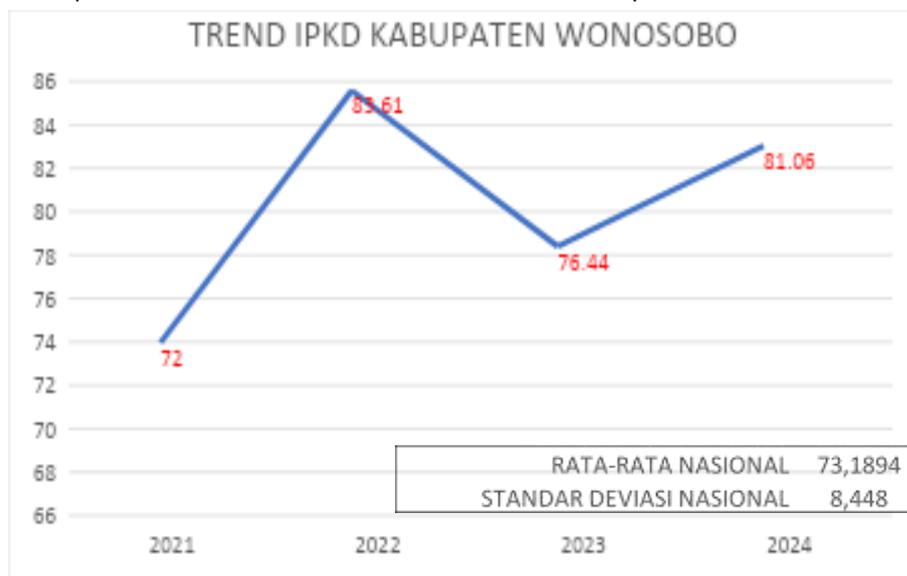
Sebagai upaya untuk memperkuat capaian Indeks Rasa Aman, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan penguatan kerawanan bencana melalui evaluasi dan atau penyusunan ulang dokumen kontijensi bencana untuk mempercepat *respon time* serta mendorong penguatan keamanan sosial melalui kolaborasi pentahelix.

4) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah, yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. IPKD mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keuangan daerah dalam periode tertentu. Adapun dimensi-dimensi yang digunakan untuk mengukur IPKD adalah: (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) kondisi keuangan daerah, dan (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi Daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/39 Tahun 2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 81,0614 (B). Angka ini lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar 77 dengan capaian 105,27%. IPKD Tahun 2024 juga

meningkat sebesar 6,05% dibandingkan IPKD Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 76,44. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 80, IPKD Tahun 2024 telah mencapai 101,33%.



Gambar 2.3.1

Trend Nilai IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan IPKD Tahun 2024 berdasarkan kluster menurut kemampuan keuangan daerah, yaitu: kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah “rendah”, kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah “sedang”, kota dengan kemampuan keuangan daerah “sedang”, dan kota dengan kemampuan keuangan daerah “tinggi”. Kabupaten Wonosobo masuk dalam kluster kabupaten dengan kemampuan keuangan daerah rendah, dimana dalam kluster tersebut terdiri dari 25 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan kluster tersebut IPKD Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berada pada ranking 8 dari 25 kabupaten dengan nilai 81,0614 (B) atau predikat “perlu perbaikan”. Sebagai perbandingan, bahwa untuk kluster ini rata-rata nasional sebesar 73.1894 dengan standar deviasi nasional 8,4480.

Tabel 2.3.6

Daftar IPKD Tahun 2024 Kluster Kabupaten dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah” di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	TOTAL	PREDIKAT	NILAI
1	GROBOGAN	12,282	19,8276	14,4828	20	5,4381	15	87,0301	Baik	A
2	KUDUS	13,974	20	15	15	6,5522	15	85,5263	Baik	A
3	PURWOREJO	14,271	20	14,4828	15	5,0854	15	83,8395	Baik	A
4	SEMARANG	8,888	20	13,9655	20	5,9027	15	83,7562	Baik	A
5	BLORA	13,069	20	15	15	5,0487	15	83,1172	Baik	A
6	DEMAK	12,64	20	13,9655	15	5,9205	15	82,5258	Baik	A
7	TEGAL	12,693	20	14,4828	15	4,9117	15	82,0875	Baik	A

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	TOTAL	PREDIKAT	NILAI
8	WONOSOBO	12,399	14,6552	14,4828	20	4,5246	15	81,0614	Perlu Perbaikan	B
9	MAGELANG	10,893	20	15	15	4,7409	15	80,6337	Perlu Perbaikan	B
10	BOYOLALI	9,373	20	10,0862	20	5,8074	15	80,2666	Perlu Perbaikan	B
11	BATANG	10,845	20	14,7414	15	4,5263	15	80,1129	Perlu Perbaikan	B
12	KLATEN	9,61	20	14,7414	15	4,6348	15	78,9865	Perlu Perbaikan	B
13	KARANGANYAR	5,43	19,8276	11,6379	20	6,5655	15	78,4614	Perlu Perbaikan	B
14	WONOGIRI	12,517	15	15	15	4,1242	15	76,6408	Perlu Perbaikan	B
15	JEPARA	10,654	15	14,4828	15	6,1096	15	76,246	Perlu Perbaikan	B
16	BANJARNEGARA	7,213	20	13,9655	15	4,8577	15	76,0363	Perlu Perbaikan	B
17	PATI	10,769	15	13,9655	15	6,0964	15	75,8311	Perlu Perbaikan	B
18	BANYUMAS	11,616	15	15	15	3,7305	15	75,3467	Perlu Perbaikan	B
19	SRAGEN	14,455	15	10,8621	15	4,5896	15	74,9064	Perlu Perbaikan	B
20	CILACAP	11,169	15	12,1552	15	5,7848	15	74,109	Perlu Perbaikan	B
21	TEMANGGUNG	10,675	15	14,7414	15	3,2468	15	73,6632	Perlu Perbaikan	B
22	PEKALONGAN	9,484	14,8276	14,4828	15	4,4841	15	73,2789	Perlu Perbaikan	B
23	KEBUMEN	12,587	15	15	10	4,6657	15	72,253	Perlu Perbaikan	B
24	PEMALANG	6,528	19,8276	14,7414	15	4,026	10	70,1277	Perlu Perbaikan	B
25	PURBALINGGA	9,37	15	5,9483	5	3,4029	15	63,7212	Sangat Perlu Perbaikan	C

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/39 Tahun 2024

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan ukuran melihat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Implementasinya didukung dengan beberapa program penunjang yakni : program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengelolaan pendapatan daerah, program

penyelesaian sengketa tanah garapan, program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, program perekonomian dan pembangunan serta program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd. Dengan capaian target IKPD Kabupaten Wonosobo yang masih berada di level "Butuh Perbaikan", maka diperlukan penguatan capaian IKPD Tahun 2025 melalui:

- Penyusunan dan/atau perbaikan sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel baik melalui *maintenance* sistem yang sudah ada ataupun menciptakan inovasi yang mendukung;
- Peningkatan kapasitas dan peran Aparat Pengawas Internal. Sampai dengan Tahun 2024 upaya pemenuhan SDM pada Inspektorat terus dilakukan agar fungsi pengawasan keuangan dapat dilakukan secara maksimal;
- Peningkatan kualitas perencanaan dengan melakukan pemenuhan-pemenuhan arahan pemerintah pusat seperti proporsi perjalanan dinas, anggaran belanja pegawai serta upaya-upaya terkait untuk meningkatkan Penerimaan PAD.

5) Nilai SAKIP

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah hasil evaluasi/penilaian atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan setiap tahun oleh KEMENPANRB. SAKIP sendiri merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Evaluasi SAKIP dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah, melalui: analisis sistem yang ada, memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, memberikan solusi atas masalah yang ditemukan, monitoring terhadap sistem yang ada, dan mengumpulkan data dari luar instansi. Sedangkan komponen evaluasi SAKIP terdiri atas: (1) perencanaan kinerja, (2) pengukuran kinerja, (2) pelaporan kinerja, dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil dari evaluasi SAKIP berupa nilai dan predikat yang diberikan kepada masing-masing instansi pemerintah, dengan kategori:

- AA (90-100)
- A (80-90)
- BB (70-80)
- B (60-70)
- D (0-30)
- CC (30-50)

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPANRB Nomor: B/234/AA.05/2024 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 67,04 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi

AKIP sudah baik pada tingkat pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.



Gambar 2.3.2

Trend Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo 2020-2024

Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 67,04 dengan predikat “B”, berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 68,64, atau dengan capaian sebesar 97,67%. Namun demikian nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 66,96. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026, Nilai SAKIP telah mencapai 92,51%. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, capaian Nilai SAKIP Tahun 2024 dibandingkan target masuk dalam kategori kinerja “sangat tinggi”.

Tabel 2.3.7

Nilai SAKIP Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	KOMPONEN PENILAIAN				Nilai SAKIP 2024
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
1	Banyumas	25,58	25,38	12,65	18,18	81,79
2	Wonogiri	24,72	22,26	12,82	17,89	77,69
3	Cilacap	23,99	23,06	11,7	16,73	75,48
4	Kota Magelang	24,53	22,03	11,27	17,19	75,02
5	Kudus	23,33	22,68	11,85	15,34	73,2

NO	KABUPATEN/KOTA	KOMPONEN PENILAIAN				Nilai SAKIP 2024
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	
6	Kota Semarang	23,17	22,45	10,66	16,84	73,12
7	Kota Pekalongan	23,3	20,09	11,59	18,04	73,02
8	Kota Surakarta	22,34	21,04	11,57	17,05	72
9	Kendal	23,22	18,67	10,46	17,44	69,79
10	Karanganyar	23,84	18,79	10,75	15,93	69,31
11	Demak	21,75	19,59	11,45	16,31	69,1
12	Boyolali	22,33	19,5	11,36	15,77	68,96
13	Batang	23,16	18,73	9,47	17,59	68,95
14	Kota Tegal	23,02	19,62	11,2	14,73	68,57
15	Pemalang	22,35	20,34	10,36	15,37	68,42
16	Purbalingga	22,84	18,67	10,71	15,88	68,1
17	Kebumen	22,9	21,19	10,06	13,39	67,54
18	Wonosobo	21,83	22,39	9,32	13,5	67,04
19	Blora	21,37	22,12	9,74	13,8	67,03
20	Sukoharjo	21,9	17,82	10,87	16,35	66,94
21	Klaten	21,52	19,41	10,9	14,9	66,73
22	Kota Salatiga	22,94	18,56	11,09	13,95	66,54
23	Temanggung	21,2	17,76	10,88	16,52	66,36
24	Jepara	23,87	18,01	11,16	12,99	66,03
25	Grobogan	23,02	19,16	9,65	14,1	65,93
26	Pati	21,24	21,85	9,33	13,47	65,89
27	Pekalongan	23,36	17,36	11,54	13,43	65,69
28	Banjarnegara	22,65	19,2	10,59	13,24	65,68
29	Purworejo	21,05	17,61	10,73	16,19	65,58
30	Tegal	21,81	19,4	10,22	14,15	65,58
31	Sragen	22,44	17,88	11,13	14,07	65,52
32	Rembang	23,45	19,47	11,06	11,37	65,35
33	Brebes	21,73	21,87	8,86	11,83	64,29
34	Magelang	21,34	18,38	11,31	12,54	63,57
35	Semarang	22,28	19,14	10,76	10,79	62,97

Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan tabel di atas, hasil monitoring dan evaluasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nilai SAKIP Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat ke-18. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah baik namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan.

Terwujudnya Indeks SAKIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mencapai pemerintahan yang kapabel didukung dengan program-program berupa Program

Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peningkatan nilai SAKIP di Tahun 2024 tidak terlepas dari upaya-upaya perbaikan atas catatan Hasil Evaluasi Eksternal yang dilakukan oleh KemenpanRB, salah satunya penyusunan kebijakan tentang Evaluasi SAKIP serta peningkatan pelaporan IKU Perangkat Daerah sesuai dengan format sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya strategi untuk peningkatan realisasi AKIP Kabupaten Wonosobo di Tahun 2025 dilakukan upaya sebagai berikut:

- Melakukan integrasi sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan pada BAPPEDA, Bagian Organisasi, Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat;
- Perbaikan penyusunan Cascading Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan memperhatikan indikator SMART;
- Penyusunan Kebijakan terkait dengan SAKIP; serta
- Memperkuat peran Tim SAKIP Kabupaten Wonosobo dalam hal pendampingan, monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah.

6) Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan survei untuk menilai pandangan masyarakat terhadap tingkat korupsi dalam pemerintahan. Fokusnya melibatkan aspek integritas penyelenggara pemerintah, transparansi kebijakan, dan efektivitas mekanisme anti-korupsi. IPAK menyusun indeks yang mencerminkan persepsi anti-korupsi di suatu wilayah, bertujuan mengakomodasi harapan masyarakat dan menilai kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Instrumen ini mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mencapai layanan publik yang bersih dan adil.

Dalam mencapai target kinerja, Indeks Persepsi Anti Korupsi didukung dengan program penyelenggaraan pengawasan. Indeks Persepsi Anti Korupsi guna mewujudkan transparansi informasi pulndeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 2,83, angka ini lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 3,55 dengan capaian 79,72%, Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2024 juga menurun sebesar 19,83% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 3,53. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 3,59, IPAK Tahun 2024 telah mencapai 78,83%. Berikut merupakan tabel perkembangan IPAK dari Tahun 2021-2024 di Kabupaten Wonosobo:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Persepsi Korupsi	3,49	3,53	3,53	2,83

Jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 3,85, realisasi IPAK di Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah. Menurunnya capaian IPAK Tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat, pengusaha, dan ahli cenderung melihat bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang belum dapat diatasi dengan efektif. Hal tersebut mendorong menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegakan hukum.

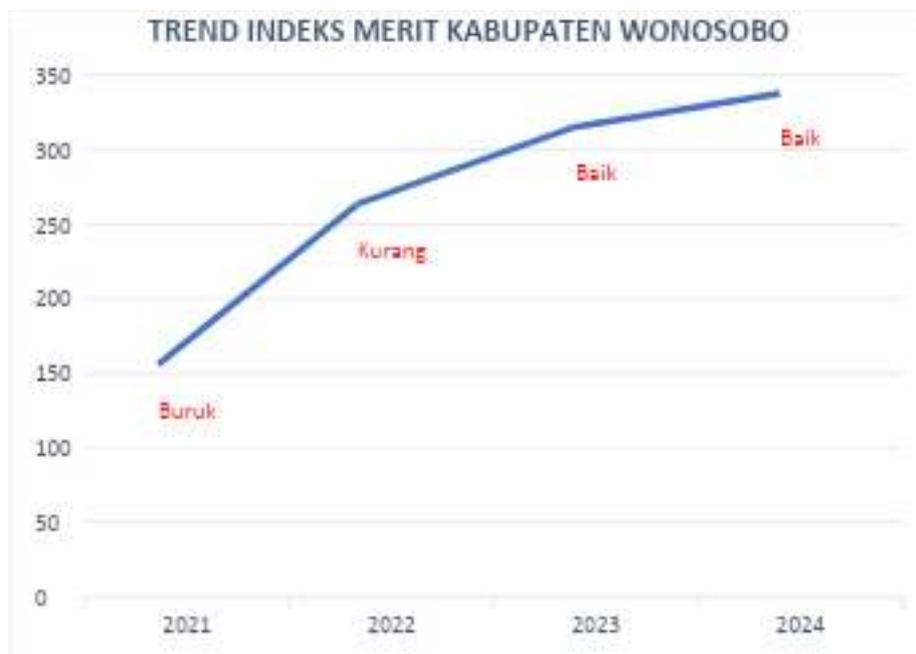
Selanjutnya untuk meningkatkan nilai IPAK Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2025 perlu dilakukan beberapa upaya berupa: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran pengadaan, laporan keuangan serta sistem pengawasan yang terbuka. Strategi peningkatan akuntabilitas dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin berkembang, sehingga memungkinkan masyarakat mengakses informasi dimanapun -kapanpun. Selain teknologi informasi dapat pula dilakukan melalui intensitas pengguna PPID Perangkat Daerah sebagai salah satu sumber informasi resmi dari masing-masing Perangkat Daerah. 2). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan melalui keikutsertaan dalam forum perencanaan maupun pengawasan kebijakan, dan 3) Menyelenggarakan program edukasi antikorupsi dan penyuluhan/kampanye kesadaran korupsi pada lembaga pendidikan maupun media sosial dan media massa serta meningkatkan kolaborasi pentahelix.

7) Indeks Merit

Salah satu indikator utama untuk melihat bagaimana kualitas manajemen ASN yang baik adalah dengan melihat penerapan sistem merit. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonosobo, ditetapkan sasaran terwujudnya pemerintahan yang kapabel dengan indikator Indeks Merit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, prinsip dasar sistem merit adalah manajemen ASN yang mendasar pada kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas dan moralitas. Sedangkan agenda strategis penyempurnaan Undang-undang ASN adalah percepatan transformasi birokrasi dan manajemen ASN, penguatan pengawasan sistem merit, dan digitalisasi manajemen ASN (transformasi komponen manajemen ASN). Penyempurnaan Manajemen Talenta ASN yaitu sistem manajemen karir ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk

menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi.



Gambar 2.3.3

Trend Indeks Merit Kabupaten Wonosobo 2021-2024

Pada tahun 2024 Indeks Merit dalam Kabupaten Wonosobo berada pada angka 289,5 dengan kategori "Baik". Hasil ini melebihi target yang ditetapkan sebesar 270, sehingga capaian realisasi Indeks Merit dibandingkan target tahun 2024 sebesar 107,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 267, maka terdapat trend kenaikan Indeks Merit sebesar 8,43%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 300, *progress* Indeks Merit tahun 2024 telah mencapai angka 96,50%. Dalam pencapaian target kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, Indeks Merit didukung dengan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengelolaan Arsip.

Selanjutnya memperhatikan peta kualitas merit sistem di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo berada pada peringkat 11 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Kemudian jika melihat capaian Indeks Merit pada daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo, Magelang dan Purworejo berada di atas capaian Indeks Merit tahun 2024, sedangkan Temanggung, Kebumen, Banjarnegara, dan Batang berada di bawah. Berdasarkan rilis dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah baru terdapat 2 kota berpredikat "Sangat Baik" yaitu Kota Magelang dan Kota Pekalongan, serta masih terdapat 1 kabupaten berpredikat "Kurang" yaitu Kabupaten Rembang.

Tabel 2.3.8

Indeks Merit Tahun 2024 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Indeks Merit 2024	Predikat	No	Kabupaten/Kota	Indeks Merit 2024	Predikat
1	Kota Magelang	337,5	Sangat Baik	19	Tegal	271,5	Baik
2	Kota Pekalongan	327,0	Sangat Baik	20	Banjarnegara	270,5	Baik
3	Cilacap	320,0	Baik	21	Brebes	270,5	Baik
4	Wonogiri	312,5	Baik	22	Jepara	265,5	Baik
5	Kota Semarang	312,0	Baik	23	Klaten	265,5	Baik
6	Kota Surakarta	310,5	Baik	24	Kota Tegal	262,5	Baik
7	Sukoharjo	307,0	Baik	25	Pemalang	262,5	Baik
8	Purworejo	302,0	Baik	26	Pekalongan	262,0	Baik
9	Magelang	293,0	Baik	27	Blora	261,5	Baik
10	Banyumas	290,5	Baik	28	Semarang	260,0	Baik
11	Wonosobo	289,5	Baik	29	Temanggung	258,0	Baik
12	Sragen	282,5	Baik	30	Karanganyar	257,0	Baik
13	Demak	282,0	Baik	31	Purbalingga	257,0	Baik
14	Boyolali	278,5	Baik	32	Kendal	255,0	Baik
15	Pati	276,0	Baik	33	Kebumen	253,5	Baik
16	Batang	274,5	Baik	34	Kudus	250,5	Baik
17	Kota Salatiga	274,5	Baik	35	Rembang	222,5	Kurang
18	Grobogan	273,0	Baik				

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk meningkatkan capaian kinerja target Indeks Merit pada Tahun 2025 perlu dilakukan pemenuhan aspek-aspek pemenuhan penilaian sistem merit berupa:

- Penyusunan rencana kebutuhan ASN jangka menengah berdasarkan Anjab dan ABK serta data pegawai yang lengkap telah diperbarui secara otomatis melalui sistem informasi dalam aplikasi SIMPEG;
- Penyusunan kebijakan internal terkait pengadaan ASN yang mengatur tentang tata cara pengadaan pegawai dan diperbarui sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara konsisten. Evaluasi pasca latsar pada CPNS nya dan yang sudah diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;
- Menetapkan SKJ untuk JPT, JA, dan JF, tersedianya talent pool untuk JPT, JA, dan JF dan memetakan sebagian pegawai di talent pool secara manual, sudah menyusun strategi pembangunan kompetensi dan kinerja jangka panjang (5 tahun), sudah menyusun program diklat, serta sudah menyusun kegiatan coaching dan mentoring namun belum dilaksanakan di seluruh OPD;
- Membangun sistem informasi kepegawaian berbasis online dan telah menerapkan e-performance yang terintegrasi dengan sistem informasi tentang penghargaan; serta
- Perbaikan pada sektor perlindungan dan pelayanan pegawai.

8) Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE di suatu instansi. Indeks SPBE merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pemerintah. Dalam pencapaian target kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, Indeks SPBE didukung dengan program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan program penyelenggaraan statistik sektoral.

Indeks SPBE Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 3,79, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 3,54 dengan capaian 107,06%. Indeks SPBE Tahun 2024 juga meningkat sebesar 7,06% dibanding dengan Indeks SPBE Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 3,54. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 3,02, Indeks SPBE Tahun 2024 telah mencapai 125,50%.

Berdasarkan uraian diatas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 berhasil meraih penghargaan predikat tertinggi pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah, yakni sebagai Badan Publik "Informatif" pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dengan mencatatkan prestasi gemilang yaitu menjadi Kabupaten/Kota Terbaik ke-Tiga di Jawa Tengah, prestasi ini merupakan penghargaan yang pertama kali diraih setelah sebelumnya pada tahun 2022 ada di posisi ke-Sembilan dan pada tahun 2023 ada di Posisi ke-Tujuh. Penghargaan tersebut mempertahankan capaian predikat yang telah diraih pada tahun 2023, walaupun secara nilai angka mengalami penurunan yang sebelumnya nilai pada tahun 2023 adalah 98,28 sedangkan pada tahun 2024 nilai yang diraih adalah 97,61. Berikut merupakan data capaian SPBE dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
7	2	3	4	5	6
1	Indeks SPBE	2,32	2,96	3,54	3,79

Adapun perbandingan Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan Kabupaten lain se-provinsi Jawa Tengah. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja pada Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jateng atas Indeks SPBE.

Tabel 2.3.9
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,42	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Semarang	3,31	Baik
3	Pemerintah Kab. Kendal	3,66	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Demak	3,93	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Grobogan	3,57	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Pekalongan	3,05	Baik
7	Pemerintah Kab. Batang	3,55	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Tegal	3,16	Baik
9	Pemerintah Kab. Brebes	2,84	Baik
10	Pemerintah Kab. Pati	3,75	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Kudus	4,23	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Pemalang	3,04	Baik
13	Pemerintah Kab. Jepara	3,51	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Rembang	3,99	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Blora	3,28	Baik
16	Pemerintah Kab. Banyumas	4,09	Sangat Baik
17	Pemerintah Kab. Cilacap	3,27	Baik
18	Pemerintah Kab. Purbalingga	3,93	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Banjarnegara	3,72	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Magelang	3,92	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Temanggung	3,64	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Wonosobo	3,79	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Purworejo	3,49	Baik
24	Pemerintah Kab. Kebumen	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Klaten	4,07	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Boyolali	3,89	Sngat Baik
27	Pemerintah Kab. Sragen	4,34	Memuaskan
28	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,45	Memuaskan
29	Pemerintah Kab. Karanganyar	3,9	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Wonogiri	4,2	Memuaskan
31	Pemerintah Kota Semarang	3,95	Sangat Baik
32	Pemerintah Kota Salatiga	3,64	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Pekalongan	3,76	Sangat Baik
34	Pemerintah Kota Tegal	3,95	Sangat Baik
35	Pemerintah Kota Magelang	3,69	Sangat Baik
36	Pemerintah Kota Surakarta	4,3	Memuaskan

Sumber: Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Berdasarkan hasil capaian atas nilai Indeks SPBE Kabupaten Wonosobo dapat dilihat bahwa indeks SPBE Kabupaten Wonosobo masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian indeks SPBE pada Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi terjadi kenaikan capaian nilai indeks SPBE Kabupaten Wonosobo di tahun 2024 yang cukup signifikan

jika dibandingkan dengan indeks SPBE tahun 2023 dari indeks sebesar 3,54 menjadi 3,79 (sangat baik). Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan serta perbaikan kualitas pada beberapa aspek sehingga nilai tingkat kematangan menjadi bertambah. Jika dibandingkan dengan capaian Nilai Indeks SPBE Kabupaten/Kota se Jateng dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo menempati nomor urut ke 22 (dua puluh dua).

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis terwujudnya pemerintahan yang kapabel dengan indikator kinerja Indeks SPBE adalah sangat baik. Realisasi capaian mencapai 107,6% dari target 3,54 tercapai 3,79. Hal ini karena Kabupaten Wonosobo telah berupaya meningkatkan layanan dalam rangka mencapai SPBE.

Nilai Layanan SPBE menggambarkan tingkat kematangan kapabilitas fungsi layanan pemerintah dan layanan publik berbasis elektronik yang mencakup:

- Layanan administrasi pemerintahan dan
- Layanan publik berbasis elektronik.

Untuk nilai layanan mencapai angka 4,07, melebihi target yang telah ditetapkan. Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang telah diterapkan sehingga dapat menunjang keberhasilan mencakup :

1. Layanan perencanaan (aplikasi SIPD),
2. Penganggaran (aplikasi SIPD),
3. Keuangan (aplikasi SIPD),
4. Aset (aplikasi Simda Aset),
5. Pengadaan barang dan jasa (aplikasi LPSE-PBJ),
6. Layanan kepegawaian (aplikasi Simpeg dan SIASN),
7. Layanan kearsipan (aplikasi SriKandi),
8. Layanan pengawasan internal (aplikasi SIMWAS),
9. Layanan akuntabilitas kinerja (aplikasi ESR) dan layanan

Tahun 2024 30 kinerja pegawai (e-SKP dan e-presensi) telah memberikan dampak administratif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Selanjutnya inovasi layanan publik berbasis elektronik juga memberikan dukungan terhadap keberhasilan terhadap peningkatan nilai layanan antara lain mencakup :

1. Layanan pengaduan publik (aplikasi LaporBupati);
2. Layanan data terbuka (aplikasi Satu Data);
3. Layanan informasi dokumentasi hukum (aplikasi JDIH);
4. Layanan penerimaan peserta didik baru (aplikasi PPDB on-line);
5. Aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM);
6. Aplikasi pelayanan perizinan on-line (Aprizob).

Untuk meningkatkan layanan maka terus dilakukan inovasi pengembangan aplikasi layanan untuk mendukung kinerja pemerintahan maupun layanan publik seperti layanan perizinan dan investasi (APRIZOB), layanan kerjasama daerah (ASIK SOBO),

layanan promosi UMKM melalui AyoPromo, portal Satu Data dan integrasi nya ke Pusat. Terus mengupayakan penggunaan aplikasi umum pemerintah pusat seperti penerapan TNDE SriKandi, SIPD, SP4NLapor, LPSE, SIRUP serta menginventarisasi aplikasi khusus pemerintah daerah yang telah dikembangkan untuk bisa dilakukan integrasi dan keterpaduan layanan

9) Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Nilai keterbukaan informasi publik (IKIP) diukur dengan skala 0–100 yang dibagi menjadi beberapa kategori. Nilai IKIP dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga publik. Kategori nilai IKIP Buruk sekali: 0–39, Buruk: 40–59, Sedang: 60–79, Baik: 80–89, Baik sekali: 90–100. Predikat IKIP Informatif: 90–100, Menuju informatif: 80–89,9, Cukup informatif: 60–79,9, Kurang informatif: 40–59,9, Tidak informatif: < 39,9.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo tahun 2024 berhasil meraih penghargaan predikat tertinggi pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Jawa Tengah, yakni sebagai Badan Publik “Informatif” pada penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dengan mencatatkan prestasi gemilang yaitu menjadi Kabupaten/Kota Terbaik ke-Tiga di Jawa Tengah, prestasi ini merupakan penghargaan yang pertama kali diraih setelah sebelumnya pada tahun 2022 ada di posisi keSembilan dan pada tahun 2023 ada di Posisi ketujuh. Penghargaan tersebut mempertahankan capaian predikat yang telah diraih pada tahun 2023, walaupun secara nilai angka mengalami penurunan yang sebelumnya nilai pada tahun 2023 adalah 98,28 sedangkan pada tahun 2024 nilai yang diraih adalah 97,61. Namun demikian apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 95 maka nilai keterbukaan informasi publik Tahun 2024 telah tercapai sebesar 102,75%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93	91,65	98,26	97,61

Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo pada periode tahun 2024 dibandingkan dengan capaian Kinerja Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung dan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2024			
		Satuan	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	98,28	97,38	96,58

Berdasarkan hasil capaian atas nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo dapat dilihat bahwa nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Wonosobo lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Temanggung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan serta perbaikan kualitas pada beberapa aspek sehingga nilai tingkat kematangan menjadi bertambah.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Wonosobo berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif untuk yang ketiga kalinya Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Kabupaten Wonosobo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan menjadi Kabupaten/Kota Terbaik ke-Tiga di Jawa Tengah, prestasi ini merupakan penghargaan yang pertama kali diraih setelah sebelumnya pada tahun 2022 ada di posisi ke-Sembilan dan pada tahun 2023 ada di Posisi ke-Tujuh.

Berdasarkan beberapa data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis "Menguatnya transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik" dengan indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah sangat baik (Informatif). Realisasi capaian mencapai 99% dari target 98,28 tercapai 97,61. Hal ini karena Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah berupaya meningkatkan transparansi informasi publik dan komunikasi publik.

Capain ini diperoleh setelah mengikuti berbagai rangkaian penilaian mulai dari penilaian sosial media dan website, pengisian *Self Assessment Questionnaire (SAQ)*, visitasi atau kunjungan lapangan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa

Tengah dan terakhir melalui forum uji publik yaitu pemaparan Bupati Wonosobo tentang komitmen, inovasi dan berbagai capaian dalam pelaksanaan/implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonosobo.

Dalam tahapan pengisian *self assessment* questionnaire (SAQ) indikator aksesibilitas website. Penyediaan informasi setiap saat dan kelembagaan PPID mendapatkan nilai penuh (100). Kegiatan atau inovasi yang menunjang keberhasilan dalam meningkatkan capaian kinerja Keterbukaan Informasi Publik antara lain meliputi:

- 1) Penyediaan aplikasi yang memuat layanan keterbukaan informasi/PPID berbasis website yang dapat diakses untuk umum dilengkapi dengan fitur ramah disabilitas;
- 2) Memiliki Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan 2024 (format sesuai dengan PERKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik);
- 3) Menyediakan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan Badan Publik, Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- 4) Memiliki Perbup tentang Pelayanan Informasi Publik;
- 5) Memiliki Surat Keputusan Pembentukan dan Penunjukan PPID yang terdiri dari Atasan PPID, PPID dan PPID Pelaksana sebagaimana diatur dalam Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 6) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi ke - PPID-an, yang sekurang-kurangnya diperuntukan untuk bimtek atau sejenisnya, honor pelaksana, upgrading sarana prasarana IT, rapat-rapat dan hal lain terkait penguatan kelembagaan.

Mengelola urusan komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat memerlukan inovasi dan kreatifitas yang tidak boleh berhenti, untuk itu membekali sumber daya manusia/aparatur yang bertugas menyusun berbagai konten edukasi publik harus terus dilakukan.

Pada Tahun 2024 salah satu upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan adalah membekali petugas Pelayanan Informasi Publik, kru Wonosobo Web TV dan penyiar Radio Pesona kemampuan berbahasa isyarat. Bekerjasama dengan Gerakan Tuna Rungu untuk Indonesia (Gerkatin) Wonosobo, Berbagai program lain juga akan terus dilaksanakan sebagai upaya untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo.

Dalam upaya untuk mencapai penguatan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik melalui Nilai Keterbukaan Informasi Publik didukung dengan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

10) Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yaitu meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan sosial. Untuk Kabupaten Wonosobo, kegiatan SPM diampu oleh 7 (tujuh) perangkat daerah dengan persentase ketercapaian SPM tahun 2024 adalah 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan telah dilakukan dengan baik. Kinerja ketercapaian SPM Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024 secara konsisten telah terealisasi sebesar 100%.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Ketercapaian SPM Layanan Dasar	100	100	100	100

Capaian tersebut juga telah memenuhi target akhir RPJMD sebesar 100%. Terpenuhinya capaian SPM tersebut dicapai melalui kegiatan koordinasi intens dengan rapat koordinasi serta kegiatan fasilitasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Pemerintahan berkolaborasi dengan unit kerja terkait serta perbaikan kualitas dokumen capaian penerapan. Selanjutnya untuk mempertahankan kinerja yang telah tercapai maksimal, kedepannya akan tetap dilakukan upaya koordinasi, monitoring dan evaluasi secara intens.

Kinerja Nilai Ketercapaian SPM dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan publik didukung dengan program Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pencatatan Sipil.

11) Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga publik, atau penyedia layanan lainnya. Pengukuran SKM dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) unsur layanan meliputi kesesuaian persyaratan, kemudahan prosedur, kecepatan penyelesaian layanan, kewajaran biaya/tarif, kesesuaian produk layanan yang diterima, kompetensi petugas, keramahan petugas, sarana prasarana pelayanan, ketersediaan sarana pengaduan. Unsur-unsur tersebut

kemudian menunjukkan persepsi kepuasan pengguna layanan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah melalui perhitungan data sampel terhadap data survei yang dihimpun oleh Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP). IKM menggambarkan seberapa baik harapan dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh penyedia layanan, baik dalam sektor publik maupun swasta.

Dalam mencapai target Indeks Kepuasan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik didukung dengan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Realisasi capaian kinerja IKM Tahun 2024 sebesar 90,85 dari target 90,88. Persentase realisasi Tahun 2024 terhadap target sebesar 99,97%, sementara itu capaian realisasi atas target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 107,51%. Berikut merupakan capaian kinerja IKM dari Tahun 2021 sampai dengan 2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,38	84,92	89,74	90,85

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh IKM sebesar 90,85 dengan kategori Sangat Baik (A) sebagai kontribusi pengukuran persepsi kepuasan pengguna layanan pada 97 UPP yang menjadi lokus intervensi kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran tersebut dilaksanakan secara digital melalui <https://skm.wonosobokab.go.id> dengan memanfaatkan WhatsApp (WA) blast untuk mengirimkan tautan unik langsung ke nomor WA pengguna layanan guna mendorong akurasi data survei. Selain itu, sistem SKM online juga memudahkan UPP dalam menyusun analisis dan rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan melalui fitur penyusunan laporan yang secara otomatis menyajikan data hasil survei tanpa perlu melakukan pengolahan data secara manual.

Salah satu hambatan dalam pengukuran IKM adalah pemahaman mendasar mengenai Standar Pelayanan yang diperuntukan untuk mengatur kepastian hukum dan jaminan bagi pengguna layanan maupun petugas layanan untuk memperoleh hak dan kewajibannya dalam kerangka layanan permohonan. Pada dasarnya setiap kebijakan yang diatur oleh pemerintah menjadi bagian dari pelayanan publik, namun demikian tidak semua layanan diselenggarakan berdasarkan permohonan

pengguna yang bersifat transaksional sehingga IKM tidak mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh..

Menjadi pekerjaan rumah yang krusial bagi pemerintah, bahwa urgensi mengukur kepuasan pengguna layanan mesti dipahami secara utuh sebagai alat untuk melindungi pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pengguna layanan sebagai pemohon yang menerima manfaat atas produk layanan yang diterima dari praktik maladministrasi. IKM tidak dapat dilihat semata-mata hanya sebagai nilai akhir tanpa memperhatikan unsur tertimbang yang mendukung, melainkan analisis potensi dan peluang atas data hasil survei dengan metode sampel yang inklusif sesuai peraturan perundang-undangan.

Jika membandingkan perolehan responden survei dan jumlah pengguna layanan yang semestinya untuk melihat persepsi kepuasan pengguna layanan pada 97 UPP yang menjadi lokus pengukuran IKM, maka mayoritas UPP atau 92% lokus belum menggambarkan kondisi ideal persepsi kepuasan pengguna atas IKM yang diperoleh. Adapun RSUD KRT. Setjonegoro, Dinkes Diskominfo, Dinsos PMD, DPPKBPPPA, DPMPTSP dan BPPKAD merupakan UPP yang telah mengupayakan kualitas data hasil survei secara ideal yang terlihat dari upaya secara berkelanjutan melibatkan pengguna layanan sebagai penerima tautan SKM.

Kondisi tersebut salah satunya diakibatkan oleh ketiadaan pemberian reward maupun punishment bagi UPP sehingga menimbulkan kecenderungan mempertahankan status quo (resistance to change) dan budaya tidak menyukai risiko (risk aversion). Dorongan yang diwujudkan melalui otoritas Pimpinan UPP juga belum berjalan untuk memberikan reward bagi petugas layanan yang berkinerja baik menurut penilaian langsung dari responden SKM.

Faktor penghambat lainnya juga muncul akibat sistem survei digital yang belum sepenuhnya memadai untuk melaksanakan SKM secara inklusif sehingga diperlukan penyempurnaan sistem yang dapat menjangkau seluruh pengguna layanan dengan berbagai karakteristik. Sebagai contoh kasus, tidak seluruh pengguna layanan memiliki nomor WhatsApp dan/atau gawai yang kompatibel untuk mendapatkan tautan unik SKM dimana banyak kebanyakan penduduk berusia lansia mengalami hal tersebut.

Selain kendala akses masyarakat terhadap sarana digital, kasus lainnya adalah resistensi SKM digital oleh petugas layanan. Hal tersebut beriringan dengan permasalahan belum adanya reward maupun punishment sehingga urgensi SKM sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap Standar Pelayanan belum dapat terwujud secara optimal.

Selanjutnya untuk peningkatan kinerja mendatang, penyempurnaan sistem SKM digital perlu diintegrasikan dengan FKP dan pengaduan menjadi bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat yang selaras dengan tujuan paradigma pelayanan publik baru yakni masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan.

12) Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian pada PDRB

Laju pertumbuhan sektor pertanian adalah peningkatan atau penurunan nilai sektor pertanian dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 5,21, angka ini lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan Tahun 2024 yaitu sebesar 3,00-4,50 dengan capaian 2234,67%, Laju pertumbuhan sektor pertanian Tahun 2024 juga meningkat sebesar 13581,63% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 0,49. Kinerja indikator sebagaimana dimaksud untuk meningkatkan pertumbuhan sektor dominan didukung dengan program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, serta program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (Tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 2,00-4,00, Indeks Toleransi Tahun 2024 telah mencapai 3352%. Berikut merupakan data perkembangan capaian kinerja Laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB	1,51	2,21	0,49	5,21

Dari data perbandingan tersebut di atas, dapat diperoleh informasi bahwa Laju Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB cenderung meningkat, namun pada Tahun 2023 realisasi sempat menurun drastis dan meningkat secara signifikan kembali pada tahun 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor meningkatnya pendapatan masyarakat di sektor pertanian. Terdapat kenaikan produktivitas sektor pertanian dari 41.251.809 di tahun 2023 menjadi 42.825.464 di Tahun 2024. Produktivitas yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat tersebut disebabkan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian, jumlah tenaga kerja dan konsumsi penggunaan pupuk.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan kinerja target laju pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB melalui:

- Penyusunan kebijakan berupa peraturan daerah tentang LP2B;
- Peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian;
- Penyediaan bibit/benih unggul dan pupuk bersubsidi; serta
- Upaya pengendalian dan penyakit tanaman

13) Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB

Indikator kinerja Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB menggambarkan tingkat perubahan atau pertumbuhan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2024 realisasi kinerja Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB sebesar 1,42 dari target 2,16. Artinya persentase realisasi atas target 2024 hanya tercapai 40,57%. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 28,40. Dalam mencapai target Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan pada PDRB program-program yang mendukung antara lain: program pengawasan keamanan pangan, program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya. Trend realisasi indikator ini cukup fluktuatif, dengan capaian terendah di tahun 2024 selama 4 tahun terakhir. Berikut merupakan perkembangan capaian/realisasi Indikator Laju Pertumbuhan dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB	4,72	2,16	4,68	1,42

Capaian kinerja indikator sebagaimana dimaksud juga masih lebih rendah dibandingkan capaian nasional dimana sektor industri pengolahan menyumbang 18,52% PDRB. Rendahnya realisasi target 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

1. Kondisi geografis kabupaten Wonosobo yang berada di daerah pegunungan sehingga mempengaruhi atas sebaran sarana prasarana strategis berupa akses mobilitas dan akses komunikasi;
2. Sebagian pengolahan sektor industri di Wonosobo masih menggunakan metode tradisional sehingga menyebabkan ketidakefisienan produksi serta kurangnya akses terhadap teknologi modern yang juga membutuhkan sumber daya anggaran yang cukup besar
3. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM pada sektor industri sehingga mendorong rendahnya inovasi dan kecepatan produksi.

Selanjutnya memperhatikan kendala tersebut di atas, strategi untuk meningkatkan kinerja indikator laju Pertumbuhan sektor Industri pengolahan pada PDRB dapat dilakukan melalui: 1) Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung industri yang mencakup akses jalan serta kepastian pasokan sumber daya dan listrik dan 2).

Mengadopsi teknologi modern dan mengembangkan riset penelitian untuk menciptakan inovasi-inovasi yang bisa membantu produksi yang efektif dan efisien.

14) Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB

Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB menggambarkan tingkat perubahan atau pertumbuhan kontribusi sektor perdagangan terhadap ekonomi. Capaian realisasi Tahun 2024 sebesar 3,35 dari target 2,50, artinya persentase realisasi atas target sebesar 134%. Sedangkan persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 83,75%. Capaian kinerja Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan pada PDRB didukung dengan program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standardisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri serta program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Trend realiasi indikator ini cukup fluktuatif, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 pasca covid-19. Berikut merupakan data capaian indikator Laju pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan pada PDRB	7,24	1,99	4,36	3,35

Terpenuhinya target realisasi pada Tahun 2024 tidak terlepas dari beberapa faktor terutama pada sektor strategis sebagaimana berikut: 1). Meningkatnya nilai ekspor bersih. Pada Tahun 2024 nilai ekspor bersih Kabupaten Wonosobo sebesar 24.147.512. 2). Terpenuhinya target tindak lanjut pengawasan terhadap perdagangan dengan sasaran 12 target jenis barang, 3).Persentase pasar dalam kondisi baik telah tercapai 76,19%, 4) Pemanfaatan kiso/los yang dimanfaatkan telah mencapai 95,59%, 5) Naiknya pertumbuhan omzet marketplace lokal produk UMKM dikarenakan banyak produk yang dipasarkan melalui platform marketplace, 6) Peningkatan pertumbuhan marketplace yang memasarkan produk lokal seiring dengan mudahnya pelaku usaha memasarkan pada marketplace. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja laju pertumbuhan sektor perdagangan beberapa hal yang dapat dilakukan adalah : 1) melakukan rehabilitasi pasar daerah, 2) Percepatan e-

retribusi dengan kerjasama Bank Perkreditan Daerah, 3) Meningkatkan fasilitasi kerjasama antara produk pengusaha modern dan pelaku UKM seperti Alfamart, Trio, Rita Pasaraya dan 5 toko modern lainnya, dan 5) menyusun feasibility study PLUT sebagai persyaratan penyusunan pengusulan pembangunan Gedung PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) yang di dalamnya dilengkapi gerai guna memasarkan produk UMKM.

15) Rata-rata Pengeluaran Belanja (*Spending of money*) Wisatawan

Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan (*spending of money*) adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan selama mereka berkunjung ke suatu destinasi wisata. Pengeluaran ini mencakup berbagai aspek, seperti akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, aktivitas rekreasi, serta belanja oleh-oleh atau souvenir. Untuk meningkatkan *spending of money* dalam rangka mengembangkan potensi sektor pariwisata didukung dengan program pengembangan kebudayaan, program pengembangan kesenian tradisional, program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual serta program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Target *spending of money* di Tahun 2024 sebesar 800.000 rupiah dan tercapai 928.000 rupiah. Persentase kinerja atas realisasi sebesar 116,02%. Namun demikian realisasi kinerja atas target akhir RPJMD baru tercapai sebesar 92,81%. Realisasi kinerja dari tahun 2021-2024 cukup fluktuatif sebagaimana data di bawah ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata Pengeluaran Belanja (<i>Spending of money</i>) Wisatawan	500.000	1.054.009	1.054.759	928.143

Capaian realisasi atas target dapat tercapai selaras dengan capaian di sektor pariwisata yang lain seperti peningkatan kebudayaan yang dikembangkan serta kenaikan kunjungan wisata sebesar 25%. Namun demikian faktor yang mempengaruhi *spending of money* tidak bisa dibandingkan antar daerah dipengaruhi oleh faktor lain yang saling berkaitan baik faktor internal maupun eksternal yakni:

1. Karakteristik wisatawan. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan di Tahun 2024 meningkat, masih perlu diidentifikasi *budget* serta durasi lama tinggal. terdapat kemungkinan terdapat wisatawan yang bersifat komuter;

2. Biaya hidup yang rendah mempengaruhi harga barang yang ditawarkan kepada wisatawan, jadi meskipun wisatawan telah membeli banyak produk maupun mengakses akomodasi dalam jangka waktu lama, *spending of money* wisatawan tetap rendah.

Selanjutnya untuk meningkatkan *spending of money*, perlu dilakukan upaya-upaya memperlama lama tinggal wisatawan berupa:

1. Mengembangkan variasi destinasi dan aktivitas wisata melalui pengembangan objek-objek baru yang potensial serta mengembangkan wisata berbasis pengalaman melalui sektor pertanian ataupun nilai tradisional lainnya;
2. Memperbaiki akses akomodasi terutama kemacetan di jalan arah menuju Dieng;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana di sekitar objek wisata di lingkungan Wonosobo;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola penginapan/homestay di sekitar objek wisata agar terwujud penginapan terstadar dengan kualitas dan pelayanan memuaskan.

16) Realisasi Investasi Daerah

Data Capaian Realisasi Investasi diperoleh berdasarkan perhitungan Realisasi Investasi LKPM dan data usaha mikro. Setiap pelaku usaha berskala besar dan menengah wajib untuk melaporkan LKPM setiap triwulan (3 bulan sekali) yang terdiri dari Laporan Konstruksi dan Laporan Produksi, serta pelaku usaha kecil wajib untuk melaporkan LKPM setiap semester (6 bulan sekali). Untuk Usaha Mikro, nilai investasi atau data proyek yang di input dalam sistem OSS RBA di luar nilai tanah dan bangunan karena Usaha Mikro tidak wajib melaksanakan LKPM. Data investasi usaha mikro diperoleh dari data investasi yang di input oleh pelaku usaha melalui sistem OSS RBA, kemudian diolah menggunakan aplikasi Si-Mike yang berasal dari DPMPSTSP Provinsi.

Kinerja realisasi atas target investasi Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan investasi didukung dengan program promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal serta program pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Pada Tahun 2024 Realisasi Investasi Daerah tercapai sebesar 237,89%. Capaian Tahun 2024 menurun dibandingkan capaian 2023. Berikut merupakan data pembandingan realiasi Tahun 2023 dengan 2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi	
		Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4
1	Realisasi investasi daerah	814.982.531.940	733.842.610.095

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan kondisi daerah lain, capaian nilai investasi berada pada peringkat ke-37 (tiga puluh tujuh) untuk tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, untuk peringkat di bawahnya diduduki oleh Kabupaten Purbalingga pada peringkat ke-38, Kota Pekalongan peringkat ke-39 dan Kabupaten Purworejo peringkat ke-40.

Realisasi investasi tahun 2024 mencapai target akhir RPJMD, akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kabupaten Wonosobo belum mempunyai regulasi mengenai DRTR sebagai persyaratan dasar perizinan berusaha;
2. Belum memiliki regulasi peraturan bupati tentang insentif dan kemudahan penanaman modal untuk menarik calon investor;
3. Kekurangan sumber daya untuk melakukan promosi penanaman modal; serta
4. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha menengah besar di Kabupaten Wonosobo

Atas permasalahan di atas maka perlu dilakukan upaya peningkatan realisasi investasi daerah berupa:

1. Melakukan inventarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Mengakomodir semua jenis perizinan dalam perbup ke APRIZOB (Aplikasi Perizinan Online Wonosobo);
3. Menyusun kebijakan terkait dengan kemudahan investasi sesegera mungkin.

17) Persentase Usaha Mikro Naik Kelas

Persentase usaha mikro naik kelas merujuk pada proporsi atau persentase usaha mikro yang berhasil berkembang atau bertransformasi menjadi usaha kecil, menengah, atau bahkan besar dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam konteks ini, "naik kelas" berarti peningkatan skala usaha dari kategori usaha mikro ke kategori usaha yang lebih besar, Usaha mikro dapat naik kelas apabila usaha dengan omzet tahunan lebih dari Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar atau aset lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta.

Indikator Persentase Usaha Mikro Naik Kelas bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Wonosobo. Dalam mencapai kinerja didukung dengan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dan program

pengembangan UMKM. Realisasi Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil yang difasilitasi Tahun 2024 adalah sebesar 0,021 apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 5,35 maka realisasi tersebut masih jauh memenuhi target. Persentase capaian Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil yang difasilitasi Tahun 2024 sebesar 0,39% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 0,99 maka terjadi penurunan capaian sebesar 97,88%, Apabila capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,6 maka telah tercapai sebesar 3,50%. Berikut merupakan capaian persentase usaha mikro naik kelas Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Persentase usaha mikro naik kelas	0,1	0,1	0,99	0,021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja menurun pada Tahun 2024. Selanjutnya, untuk meningkatkan pertumbuhan omzet usaha mikro kecil dapat didorong melalui berbagai program dan kebijakan pemerintah, seperti:

1. Membantu UMKM yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal untuk mendapatkan pembiayaan KUR dan atau pinjaman komersil non subsidi;
2. Memberikan pelatihan, digitalisasi, dan fasilitasi akses pasar secara intensif untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing.

18) Pertumbuhan koperasi sehat

Pertumbuhan koperasi sehat adalah proses perkembangan koperasi yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, efisien, dan mengutamakan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya. Dalam mencapai kinerja peningkatan pertumbuhan Koperasi, Indikator Pertumbuhan Koperasi Sehat didukung dengan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi serta program pengawasan dan pemeriksaan koperasi. Pada Tahun 2024 capaian pertumbuhan koperasi sehat sebesar 2,44 dari target 2,33. Persentase realisasi kinerja atas target sebesar 104,7%. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD telah tercapai 104,72%. Berikut merupakan trend capaian indikator pertumbuhan koperasi sehat selama 4 tahun terakhir:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan Koperasi Sehat	2,5	9,35	2,48	2,44

Dalam pencapaian kinerja, kendala yang dialami atas ketercapaian kinerja Pertumbuhan Koperasi Sehat antara lain:

- Masih banyak koperasi belum melaksanakan tata kelola koperasi dengan baik dan manajemen koperasi yang masih belum profesional;
- Masih banyak pengurus dan pengawas koperasi yang perlu peningkatan kapasitas SDM;
- Beberapa Koperasi Simpan Pinjam belum memiliki izin Usaha Simpan Pinjam berbasis OSS;
- Usaha Simpan Pinjam (USP) belum menghasilkan keuntungan yang ideal dibandingkan jumlah modal yang dimiliki (rasio rentabilitas rendah) baik itu dari kelemahan organisasi maupun partisipasi anggota rendah.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala tersebut strategi yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan koperasi secara rutin terhadap koperasi aktif melalui Surat Edaran Bupati mengenai pelaporan triwulanan.

19) Pertumbuhan strata BUMDes

Pertumbuhan strata BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merujuk pada perkembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes dalam mengelola usaha dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian desa. Secara umum indikator ini menggambarkan pergeseran atau perubahan dalam tingkat kemampuan dan kualitas usaha yang dijalankan oleh BUMDes, dari yang semula mungkin berskala mikro dan terbatas menjadi lebih besar, lebih beragam, dan lebih berdampak. Capaian kinerja Pertumbuhan Strata BUMDes didukung dengan beberapa program, yang beririsan dengan koperasi yakni: program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm), program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi. Capaian persentase pertumbuhan strata BUMDes Tahun 2024 sebesar 17,97% dari target 20%, artinya persentase realisasi atas target 2024 sebesar 89,85%. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 107,80%. Berikut merupakan capaian kinerja pertumbuhan strata Bumdes dari tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Pertumbuhan strata BUMDes	111,76	90,31	21,59	17,97

Ketidakcapaian target Pertumbuhan Strata BUMDes disebabkan oleh beberapa hal yakni: 1). Kesulitan mendapatkan modal untuk meningkatkan kapasitas usaha serta akses terhadap kredit, dan 2). Keterbatasan kapasitas SDM di desa dalam mengelola manajerial operasional sehingga menyebabkan kurangnya inovasi serta ketidakefisienan pengelolaan. Selanjutnya untuk meningkatkan capaian kinerja perlu dilakukan upaya-upaya berupa kebijakan yang mampu memperkuat akses modal melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga keuangan/investor. Selain itu diperlukan kegiatan fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas SDM aparat desa maupun SDM pengelola BUMDes secara berkala.

20) Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk masyarakat 40 persen pendapatan terendah mengacu pada jumlah uang yang dibelanjakan oleh kelompok masyarakat yang termasuk dalam 40 persen terbawah dari segi pendapatan. Pengukuran ini sering digunakan untuk menggambarkan seberapa besar biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap ekonomi produktif yang didukung dengan program penyuluhan pertanian.

Realisasi Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah sebesar Rp496.875 dari target Rp399.483. Persentase realisasi atas target sebesar 124,38%. Sementara itu capaian realisasi 2024 atas target akhir RPJMD sebesar 123,79%. Berikut merupakan perkembangan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah di Kabupaten Wonosobo selama 4 tahun terakhir:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah	394.619	459.976	522.415	496.875

Terdapat penurunan capaian di tahun 2024, namun demikian realisasi atas target akhir RPJMD telah tercapai 123,79%. Jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran perkapita berdasarkan data 2020-2022, pengeluaran masyarakat Wonosobo sebesar Rp833.995. Hal ini menunjukkan Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah sebesar kurang lebih 59% dari rata-rata pengeluaran per kapita.

Untuk meningkatkan indikator rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakat 40 persen pendapatan terendah, perlu dilakukan upaya-upaya yang selaras dengan penurunan angka kemiskinan baik melalui 1) Meningkatkan kinerja indikator persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha dan bisa mengakses modal usaha melalui peningkatan kesadaran administrasi keuangan, 2) Meningkatkan kinerja indikator persentase masyarakat miskin yang menjadi wirausaha yang bermitra dengan UMK/Usaha Bersama subsidi, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan akses pelayanan dasar dan lain sebagainya.

21) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total angkatan kerja. Capaian realisasi TPT Tahun 2024 sebesar 4,02 dari target 3,5, yang berarti bahwa persentase realisasi Tahun 2024 atas target sebesar 99,05%. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 85,14%. Tingkat pengangguran terbuka Wonosobo dari Tahun 2021 sampai dengan 2024 cenderung terus mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan analisa positif, artinya tingkat pengangguran terus menurun selama 4 tahun terakhir. Berikut merupakan perkembangan capaian TPT Kabupaten Wonosobo:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,26	5,01	4,95	4,02

Selanjutnya, berdasarkan data BPS jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar, realisasi kinerja TPT Kabupaten Wonosobo termasuk kategori sedang dimana realisasi Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen namun lebih rendah dibanding Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang. Sementara itu jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah kinerja indikator TPT Kabupaten Wonosobo lebih tinggi. Berikut tabel yang menunjukkan perbandingan realisasi TPT Kabupaten Wonosobo dengan daerah sekitarnya:

Perbandingan TPT Kabupaten Wonosobo dengan daerah sekitarnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Angka Pengangguran Terbuka
		Tahun 2024
1	2	3
1	Provinsi Jawa Tengah	4,78
2	Kabupaten Banjarnegara	5,57
3	Kabupaten Wonosobo	4,02
4	Kabupaten Purworejo	3,89
5	Kabupaten Magelang	3,55
6	Kabupaten Kebumen	5,57

Untuk mencapai target kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja daerah didukung dengan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, program hubungan industrial serta program perencanaan tenaga kerja. Belum tercapainya target kinerja atas target TPT di Tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: 1) Sektor pekerjaan terbatas yang didominasi pertanian, sementara pendidikan dan keterampilan sarjana dan atau lulusan pendidikan formal lainnya yang berkorelasi dengan sektor pertanian masih sangat sedikit dan 2) Akses terhadap modal dan kewirausahaan terutama perbankan masih terbatas. Selanjutnya untuk menghadapi kendala tersebut di atas dan meningkatkan kinerja TPT perlu dilakukan beberapa upaya berupa: 1).Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan menyesuaikan

dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi pertanian dan atau pariwisata di Kabupaten Wonosobo, 2) Meningkatkan kerjasama dengan perbankan/lembaga terkait untuk mempermudah akses modal, 3) Meningkatkan akses informasi dan jaringan terutama pada daerah yang sulit dijangkau, 4) Meningkatkan diversifikasi pertanian dan pariwisata untuk membuka peluang kerja lebih tinggi.

22) Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan adalah komponen yang mengukur kualitas pendidikan suatu daerah atau negara, diukur melalui indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks pendidikan merupakan cerminan dari hasil pembangunan di bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara.

Dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan program-program yang mendukung capaian kinerja Indeks Pendidikan berupa Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan serta Program Pengembangan Kurikulum. Indeks pendidikan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 10,17, lebih rendah dibandingkan dengan target Tahun 2024 yaitu sebesar 10,52 namun demikian terdapat kenaikan sebesar 0,10% dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 10,16. Indeks Pendidikan Tahun 2024 telah tercapai sebesar 96,67%, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD (tahun 2026) yang ditetapkan sebesar 10,52 maka indeks pendidikan telah mencapai 95,14%. Berikut merupakan data perkembangan Indeks Pendidikan Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pendidikan	10,25	10,53	10,16	10,17

Secara umum, capaian Indeks Pendidikan diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja turunan dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan yang mencerminkan rata-rata tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin baik pula akses dan kesempatan belajar

yang dimiliki oleh masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian Harapan Lama Sekolah adalah 11,81 tahun dan berada di bawah target tahunan 11,95 dengan tingkat ketercapaian 98,83% kategori Sangat Tinggi. Harapan lama sekolah selama 11,81 tahun mencerminkan perkiraan rata-rata waktu yang diharapkan bagi seseorang untuk menempuh pendidikan formal. Capaian ini juga masih berada di bawah target akhir Renstra dengan posisi 98,76%, dimana pada akhir Renstra ditargetkan angka Harapan Lama Sekolah 12,1 tahun yang mana target ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang salah satu prioritasnya adalah wajib belajar 12 tahun untuk Pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas, meskipun belum mencapai tingkat pendidikan tinggi. Harapan lama sekolah yang mendekati 12 tahun ini merupakan indikasi bahwa akses terhadap pendidikan semakin membaik apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu pada angka 11,80 dan pada tahun 2022 pada angka 11,77 tahun. Akan tetapi, dengan angka ini masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua individu dapat menyelesaikan pendidikan terutama wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan formal hingga dapat melanjutkan tingkat yang lebih tinggi.

Peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas, serta dukungan ekonomi dan sosial menjadi faktor penting dalam mendorong angka harapan lama sekolah agar semakin meningkat di masa mendatang. Namun demikian, capaian angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo yang belum bisa memenuhi target wajib belajar 12 tahun ternyata juga masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah, dimana Jawa Tengah berada pada angka 12,86 tahun. Sementara apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo masih berada di posisi paling bawah dengan daerah lima terbawah setelah Kabupaten Wonosobo yaitu Kabupaten Banjarnegara 11,83, Kabupaten Pemasang 12,02, Kabupaten Purbalingga 12,03 dan Kabupaten Batang 12,17. Harapan lama sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun lingkungan. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling dominan, karena keterbatasan biaya seringkali menghambat akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Selain itu, faktor geografis juga berperan, di mana anak-anak yang tinggal di daerah terkendala transportasi sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Faktor sosial dan budaya, seperti pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, juga mempengaruhi harapan lama sekolah. Kebijakan pemerintah melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 merupakan

salah satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, kualitas tenaga pengajar dan kurikulum pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang juga menjadi aspek penting yang menentukan seberapa lama seseorang dapat mengenyam pendidikan. Dengan adanya sinergi antara faktor-faktor tersebut, diharapkan angka harapan lama sekolah dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah. Dengan meningkatnya harapan lama sekolah, diharapkan generasi muda dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia tertentu dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun, berbagai faktor seperti aksesibilitas, kondisi ekonomi, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan angka ini, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Pada tahun 2024 capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo berada pada angka 6,89 tahun, dimana angka ini masih dibawah target tahunan yaitu 7,39 dengan tingkat ketercapaian 93.23% kategori Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, angka ini masih dibawah target akhir Renstra dengan posisi 93,90% dimana target akhir Renstra berada pada angka 7,87 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 6,89 ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kabupaten Wonosobo rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan dasar atau kelas awal sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan yaitu pada angka 6,88 pada tahun 2022 dan 6,89 pada tahun 2023. Angka capaian yang masih dibawah target dan peningkatan yang cenderung masih kecil disebabkan adanya perubahan kriteria penghitungan, dimana pada waktu penentuan target pada Rencana Strategis masih menggunakan kriteria penduduk usia 18 tahun keatas. Sementara pada saat penghitungan capaian, kriteria yang digunakan adalah menggunakan penduduk usia 25 tahun keatas. Disamping itu, intervensi yang dilakukan masih berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan anak usia sekolah yaitu usia 7

sampai dengan 18 tahun, sedangkan intervensi peningkatan lama sekolah bagi penduduk usia 25 tahun keatas masih sangat terbatas.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo masih tertinggal dimana Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 8,02. Sementara itu apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo menempati urutan keempat terbawah dengan urutan dibawahnya yaitu Banjarnegara 6,87, Kabupaten Pemasang 6,56 dan Kabupaten Brebes 6,41. Angka ini mencerminkan berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang masih relatif rendah dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan akses dan kualitas Pendidikan terutama bagi penduduk yang sudah melebihi batas usia sekolah (usia 25 tahun keatas) mengingat kriteria penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk usia 25 tahun keatas, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memperoleh lama pendidikan yang lebih tinggi.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akses pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang SD untuk usia 7-12 tahun. Tingginya angka partisipasi sekolah mencerminkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata serta mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Pada tahun 2024 capaian angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun berada pada angka 99,89% dengan tingkat ketercapaian 100.11% kategori Sangat Tinggi dari target tahun 2024 yaitu 99,78. Capaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 99,71 serta cenderung stagnan dari capaian tahun 2023 yaitu 99,78. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berada pada 99,57%. Capaian ini didukung dengan sebaran ketersediaan layanan satuan pendidikan yang tersebar di semua desa di Kabupaten Wonosobo. Disamping itu upaya perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Pendidikan untuk jenjang SD terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan daya tampung siswa maupun peningkatan mutu sarana dan prasarana. Angka capaian ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk

memastikan semua anak usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan jenjang usianya.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

Pada tingkat usia 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah berada di angka 94,03% masih lebih rendah dari yang ditetapkan dalam target yaitu 96,5%. Dengan capaian ini tingkat ketercapaian berapa pada angka 97,44 dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apaian mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 capaian pada angka 93,76 dan pada tahun 2023 capaian pada angka 93,34. Angka tersebut juga masih berada jauh dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 97,12. Angka partisipasi yang rendah pada usia jenjang SMP disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

23) Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan adalah ukuran kesehatan yang dapat menunjukkan perubahan kesehatan dari waktu ke waktu. Indeks kesehatan dapat diukur di tingkat lokal, regional, dan nasional. Indeks kesehatan merupakan salah satu komponen dasar dalam mengukur kualitas hidup. Indeks kesehatan dapat dipecah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kesehatan. Indeks kesehatan dan indeks pengeluaran merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dapat dikategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Dalam mencapai target kinerja Indeks Kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, didukung dengan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan serta program pembinaan Keluarga Berencana (KB). Indeks kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berada pada angka 74,25, nilai ini melebihi target Tahun 2024 yaitu sebesar 72,72. Indeks Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,32% dibanding dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar 74,01. Indeks Kesehatan Tahun 2024 telah tercapai sebesar 102,10% apabila dibandingkan dengan target RPJMD (Tahun 2026) sebesar 72,72 maka Indeks kesehatan telah mencapai 102,10%. Berikut merupakan data perkembangan Indeks Kesehatan Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kesehatan	71,94	72,05	74,01	74,25

Capaian Indeks Kesehatan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Prevalensi Penyakit, Akses terhadap Layanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat. Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan guna meningkatkan capaian Indeks Kesehatan dengan cara: 1).Meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan maupun akses layanan kesehatan sampai dengan level desa, 2) Monitoring dan evaluasi akses atas BPJS terutama pada masyarakat miskin, 2).Mengembangkan teknologi telemedicine untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan 3). Meningkatkan kualitas SDM baik tenaga kesehatan ataupun pendamping dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan dasar penanganan kesehatan sampai dengan level desa baik secara online maupun offline.

24) Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meliputi berbagai jenis kelompok, seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan korban tindak kekerasan.

Penanganan PPKS:

- Bantuan paket pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sembako dan alat kebersihan diri
- Rehabilitasi sosial
- Jaminan sosial
- Pemberdayaan sosial
- Perlindungan sosial

PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini dikarenakan hambatan, kesulitan, atau gangguan. PPKS memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan Penanganan PPKS adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup PPKS secara memadai dan wajar.

Cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Tahun 2024 terealisasi pada angka 82,65, nilai ini melebihi target Tahun 2024 yaitu sebesar 65,22. Cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Tahun 2024 meningkat sebesar 3,65% dibanding dengan realisasi Tahun 2023 yaitu sebesar 79,74. Cakupan Penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial

(PPKS) Tahun 2024 telah tercapai sebesar 126,72%, apabila dibandingkan dengan target RPJMD (Tahun 2026) sebesar 65,22 maka telah tercapai sebesar 126,72%. Berikut merupakan data capaian penanganan PPKS dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	63,27	63,27	79,74	82,65

Dukungan dari berbagai sumber anggaran sangat membantu keberhasilan capaian cakupan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Upaya peningkatan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didorong faktor Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu target lokasi kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi maupun pusat. Termasuk juga peran dari program CSR yang diperoleh. Program yang mendukung capaian kinerja Cakupan Penanganan PPKS sendiri adalah program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS).

Beberapa kendala dalam capaian kinerja indikator cakupan penanganan PPKS adalah 1) Beban kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan SDM sehingga menyebabkan kurang dapat melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara maksimal. Begitu pula dengan proses penjangkauan, dengan tenaga terbatas maka tidak semua PPKS dapat terjangkau secara maksimal. 2) Sarana prasarana yang kurang memadai. Saat ini Kabupaten Wonosobo hanya memiliki dua ruang shelter dengan tingkat hunian yang cukup tinggi. dari data layanan shelter, rata rata per tahun menerima sekitar 70-80 orang pemerlu layanan, kebutuhan penggunaan ruang maksimal 7 hari, dengan perhitungan maksimal penerimaan layanan sesuai kapasitas kebutuhan kamar/tahun hanya sekitar 25 orang /kamar. Selanjutnya untuk upaya peningkatan kinerja berdasarkan kendala yang teridentifikasi perlu dilakukan upaya pemenuhan SDM melalui identifikasi ulang Analisis Beban Kerja dan meningkatkan kualitas sarana-prasarana.

25) Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur untuk menilai perkembangan desa dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. IDM merupakan indikator komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan

(IKL). IDM digunakan untuk mengukur status kemandirian desa. Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik.

Program-program yang mendukung upaya pencapaian target kinerja IDM adalah program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, program peningkatan kerja sama desa, program penataan desa, program peningkatan kualitas keluarga serta program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 0,793, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 0,721. Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2024 meningkat sebesar 2,35% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 0,77, Indeks Desa Membangun Tahun 2024 telah tercapai sebesar 109,99% apabila dibandingkan dengan target RPJMD (Tahun 2026) sebesar 0,721 maka telah tercapai sebesar 109,99%. Dengan angka 0,793 IDM Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori Maju. Berikut merupakan data perkembangan IDM dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,692	0,74	0,7748	0,793

Capaian kinerja IDM Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan IDM Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan rilis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2024, IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,74. Selanjutnya meskipun realiasi telah mencapai target, namun tetap ada kendala dalam pencapaiannya. Beberapa kendala dan upaya peningkatan nilai IDM ini adalah:

1. Masih kurangnya dari seluruh stakeholder dalam rangka melaksanakan pemerataan pembangunan sampai desa. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa diperlukan kebijakan penguatan pembangunan desa;
2. Letak geografis Kabupaten Wonosobo yang berada di daerah pegunungan dengan jangkauan luas wilayah yang cukup luas menjadikan pemenuhan ketersediaan pusat layanan dasar bagi masyarakat terbatas. Selanjutnya diperlukan perbaikan sarana-prasarana sampai dengan level jalan kabupaten untuk mempermudah akses wilayah;
3. Desa memiliki kearifan lokalnya masing masing, seperti ketersediaan kearifan lokal dalam pengelolaan sampah, gotong royong desa. Kearifan lokal tersebut perlu dikembangkan agar bisa menjadi sumber inovasi pemerintah desa untuk

meningkatkan pembangunan ataupun meningkatkan perekonomian di desanya.

26) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran keberhasilan pembangunan manusia yang berbasis gender. IPG digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 92,65, apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 92,91 maka nilai tersebut mengalami penurunan, namun demikian, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 92,65 maka tidak ada peningkatan ataupun penurunan, Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 telah tercapai sebesar 99,72% apabila dibandingkan dengan target RPJMD (Tahun 2026) sebesar 92,96 maka telah tercapai sebesar 99,67%. Berikut merupakan data IPG Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Gender	92,83	92,83	92,95	92,95

Program-program yang mendukung capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender untuk mewujudkan kesetaraan dalam dimensi sosial berupa program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program pemenuhan hak anak (PHA), program pengelolaan sistem data gender dan anak dan program perlindungan perempuan. Berdasarkan beberapa data di atas terlihat adanya progres kinerja selama 4 tahun terakhir. Hal ini didukung beberapa hal di antaranya: terdapat kaukus perempuan politik indonesia (KPPI) yang meningkatkan kualitas caleg perempuan, kesetaraan gender di dalam rekrutmen & promosi pegawai serta meningkatnya tingkat pendidikan perempuan. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kinerja indikator secara maksimal adalah adanya budaya perempuan sebagai ibu rumah tangga dirumah, masih rendahnya kepercayaan diri perempuan untuk menjadi caleg dan budaya lebih memilih caleg laki-laki serta keterampilan pekerja perempuan masih perlu ditingkatkan. Namun demikian capaian IPG Kabupaten Wonosobo telah lebih tinggi dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data terakhir BPS sebesar 92.87.

27) Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP merupakan indeks komposit yang mencakup berbagai aspek pembangunan pemuda. Aspek yang diukur IPP berupa pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi.

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan tolak ukur peningkatan kualitas pemuda dan olahraga yang didukung dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan program pengembangan kapasitas kepramukaan. Indeks pembangunan pemuda Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 53,1 dibandingkan dengan target Tahun 2024 sebesar 53,88 maka nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target. Namun demikian terdapat kenaikan sebesar 2,63% dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Indeks pembangunan Pemuda Tahun 2024 telah mencapai 98,55% apabila dibandingkan dengan target RPJMD (Tahun 2026) sebesar 54 maka telah tercapai sebesar 98,33%. Berikut merupakan data realisasi IPP Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Pembangunan Pemuda	53,5	49,41	51,74	53,1

Meskipun telah mencapai target Tahun 2024, namun masih ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian indeks pembangunan pemuda yakni masih terbatasnya pembinaan pada bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Hal ini mengakibatkan peran pemuda dan peran pelaku di bidang olahraga belum mampu mencapai prestasi secara optimal.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Indeks Pembangunan Pemuda, perlu strategi yang melibatkan kolaborasi dari berbagai sektor, yakni : 1). Perbaikan infrastruktur pendidikan, 2). Peningkatan keterampilan praktis untuk mengurangi potensi angka pengangguran yang tinggi, 3). Mengupayakan penambahan program beasiswa serta 4), Meningkatkan program pengembangan keterampilan digital dan teknologi terbaru.

28) Tingkat kemantapan jalan

Tingkat kemantapan jalan adalah indikator yang menunjukkan kondisi jalan, baik itu jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Jalan mantap adalah jalan yang kondisinya sedang dan baik, sedangkan jalan tidak mantap adalah jalan yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Cara menentukan tingkat kemantapan jalan adalah dengan melakukan identifikasi, pengukuran, dan evaluasi kondisi fungsional dan struktural jalan.

Kinerja Target Tingkat Kemantapan Jalan hanya didukung dengan program penyelenggaraan jalan. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 telah terealisasi sebesar 65,93 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 64,5 maka realisasi tersebut telah melebihi target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 64,14 maka terjadi peningkatan capaian sebesar 2,79%. Tingkat Kemantapan jalan Tahun 2024 telah tercapai sebesar 102,22%, apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 65 maka telah tercapai sebesar 101,43%. Berikut merupakan data realisasi kinerja kemantapan jalan Kabupaten Wonosobo dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat Kemantapan Jalan	58,82	65,18	64,14	65,93

Tercapainya target indikator kinerja tahun 2024 disebabkan oleh upaya pemeliharaan rutin jalan yang masif untuk mempertahankan kemantapan jalan di samping juga melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi lebih selektif dalam penanganan dengan memperhatikan kondisi kerusakan eksisting yang ada, sehingga meskipun anggaran penyelenggara jalan menurun dari semula Rp159.233.481.009 pada tahun 2023 menjadi Rp124.942.421.573 di tahun 2024, kinerja kemantapan jalan masih bisa ditingkatkan. Hal lain yang mempengaruhi adalah dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Nomor 620/415/2023 tentang penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten dimana panjang jalan status kabupaten berubah menjadi 958.314 KM dari semula 999.276 KM.

Program/Kegiatan yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun 2024 adalah :

1. Kegiatan yang bersumber dana DAK dengan alokasi anggaran Rp28.121.446.000 untuk penanganan long segment 5 ruas dan pembangunan 1 jembatan;
2. Kegiatan yang bersumber dana Bankeu dengan alokasi anggaran Rp42.901.000.000 untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi 21 ruas.

3. Kegiatan yang bersumber dana DIF dengan alokasi anggaran Rp9.951.614.524 untuk penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi 7 ruas.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja diperlukan inovasi dan/atau upaya perbaikan antara lain melalui: 1). Mengoptimalkan peluang anggaran non-APBD; 2). Mendorong tanggung jawab bersama dalam memanfaatkan dan memelihara jalan; 3). Membentuk tim reaksi cepat pemeliharaan jalan; dan 4). Mengoptimalkan upaya pemeliharaan jalan kondisi baik dan sedang untuk menjaga tingkat keamanan jalan.

29) Indeks Sanitasi

Indeks Sanitasi adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi sanitasi suatu wilayah, yang mencakup akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, serta pengelolaan limbah cair, limbah padat, dan kualitas lingkungan yang sehat.

Dalam upaya mencapai kinerja, Indeks Sanitasi didukung dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah. Capaian kinerja Indeks Sanitasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 54,5 dari target 64,58 yang berarti persentase realisasi kinerja atas target sebesar 84,39%. Sementara itu realisasi kinerja atas target RPJMD sebesar 70,71%. Namun demikian realisasi kinerja Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi Tahun 2023. Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Indeks Sanitasi Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sanitasi	45,83	40	45,5	54,5

Berdasarkan data USAID, Sektor sanitasi sangat berperan penting dalam pembangunan manusia di Indonesia karena 73% kejadian diare dan 15% kejadian stunting disebabkan kurangnya ketersediaan akses sanitasi yang layak, kualitas air minum yang rendah dan rendahnya higienitas. Target Capaian IUP Sanitasi Provinsi Jawa Tengah hanya berada di angka 10,16%. Capaian Kabupaten Wonosobo telah melebihi target provinsi Jawa Tengah. Namun demikian belum tercapainya target Indeks Sanitasi 2024 disebabkan oleh beberapa hal seperti: 1) Sebagian besar daerah pedesaan di Wonosobo masih kekurangan akses terhadap fasilitas sanitasi layak, seperti toilet bersih dan jamban serta 2). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesadaran dampak sanitasi buruk.

Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja Tahun 2025 diperlukan beberapa tindak lanjut berupa: 1). Menyelenggarakan pelatihan dan/atau penyuluhan sanitasi sehat

kepada masyarakat secara merata terutama pada masyarakat di *slum area* serta pedesaan, 2).

Meningkatkan program bantuan jambanisasi serta perbaikan infrastruktur sanitasi.

30) Indeks layanan air minum

Indeks Layanan Air Minum adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan penyediaan air minum yang berhubungan dengan distribusi, kualitas dan ketersediaan air minum untuk masyarakat. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan program yang mendukung ketercapaian kinerja target indeks layanan air minum. Realisasi kinerja Indeks Layanan Air minum Tahun 2024 mencapai 83,17 dari target 89. Persentase realisasi kinerja atas target Tahun 2024 sebesar 96,65% sementara persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 91,40%. Berdasarkan tabel perkembangan kinerja Indeks layanan air minum di bawah, dapat diketahui terjadi penurunan kinerja dibandingkan Tahun 2023. Berikut merupakan data capaian kinerja Indeks Layanan Air Minum Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks layanan air minum	86	82	87,74	83,17

Masih belum maksimalnya kinerja layanan air minum dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti 1). Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Wonosobo sebagian besar berupa perbukitan dan/atau pegunungan yang terjal dan sulit diakses sehingga infrastruktur ada belum mampu mencapai seluruh wilayah. Selain itu kondisi topografi juga mempengaruhi ketersediaan sumber daya air terutama wilayah di sebelah selatan yang cenderung memiliki jenis tanah berbatu cadas.

Untuk meningkatkan indeks layanan air minum diperlukan perbaikan pada beberapa sektor meliputi 1). Peningkatan kualitas infrastruktur secara kolaboratif antara Pemerintah dengan lembaga swasta agar bisa menjangkau desa-desa terpencil serta 2). Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan ataupun swasta dan NGO berupa pelatihan pengolahan sumber daya air berkelanjutan.

31) Indeks Kinerja Sistem Irigasi

Indeks Sistem Irigasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas, efisiensi, dan efektivitas sistem irigasi dalam mendukung kegiatan pertanian dan penyediaan air bagi kebutuhan pertanian. program pengelolaan sumber daya air (SDA) dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase merupakan program yang mendukung upaya peningkatan kinerja layanan irigasi. Capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 64,71 dari target 66,95 yang berarti persentase realisasi atas target tercapai 96,65%. Sementara itu persentase realisasi kinerja atas target RPJMD tercapai 92,71%. Realisasi kinerja tahun 2024 menurun dibanding tahun 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	62,75	62,75	65,79	64,71

Beberapa kendala dalam mencapai kinerja pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana berikut:

- Infrastruktur Irigasi yang memadai. Sebagai Kabupaten yang memiliki curah hujan cukup tinggi, sering terjadi peningkatan debit aliran sungai yang membawa lumpur atau partikel lainnya yang dapat menyebabkan sedimentasi, penyumbatan serta rusaknya aliran irigasi yang selanjutnya mengurangi tingkat keoptimalan saluran;
- Kondisi geografis dan topografi Kabupaten Wonosobo sebagian besar berupa perbukitan dan/atau pegunungan yang terjal dan sulit diakses. Hal tersebut dapat mempengaruhi pemerataan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi;
- Kurangnya penerapan teknologi irigasi disebabkan keterbatasan anggaran.

Selanjutnya untuk mengatasi kendala dalam mencapai target kinerja, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu melakukan upaya 1). Melakukan perbaikan dan renovasi saluran irigasi dengan ketersediaan anggaran yang ada serta berupaya untuk berkolaborasi dengan masyarakat untuk meningkatkan awareness pemanfaatan irigasi berkelanjutan, dan 2). Meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan mengadopsi teknologi tepat guna dengan biaya yang rendah.

32) Indeks Keselamatan Lalu Lintas

Indeks Keselamatan Lalu Lintas adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keselamatan di jalan raya, yang mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keselamatan pengguna jalan, seperti kecelakaan, kematian, cedera, dan potensi risiko lainnya yang berkaitan dengan lalu lintas. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) merupakan program yang mendukung capaian kinerja Indeks Keselamatan Lalu Lintas. Realisasi kinerja Indeks Keselamatan Lalu Lintas Tahun 2024 sebesar 92,8 dari target 72. Persentase realisasi kinerja Tahun 2024 atas target sebesar 128,89% sementara realisasi kinerja atas target akhir RPJMD sebesar 123,49%. Berikut merupakan perkembangan Indeks Keselamatan Lalu Lintas dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Keselamatan Lalu Lintas	64,23	67,6	69,65	92,8

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja di sektor keselamatan lalu lintas beberapa strategi yang akan diterapkan Pemerintah Kabupaten Wonosobo meliputi:

- Meningkatkan pemasangan perlengkapan jalan pada kurang lebih 273 ruas jalan;
- Memonitoring kelayakan fungsi angkutan darat pada seluruh angkutan yang tersedia kurang lebih 6500 unit;
- Memenuhi standar pelayanan keselamatan pada seluruh kendaraan yang beroperasi kurang lebih 9671 dengan mengacu data pada Tahun 2024;
- Meningkatkan penanganan kemacetan melalui manajemen rekayasa lalu lintas;
- Meningkatkan kualitas fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang tipe c; serta
- Meningkatkan pelayanan uji berkala kendaraan.

33) Persentase permukiman layak huni

Persentase Permukiman Layak Huni adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak atau seberapa besar proporsi permukiman di suatu wilayah yang memenuhi standar kualitas hunian yang layak, aman, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Upaya untuk menyediakan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang diukur dengan Persentase Permukiman Layak Huni didukung dengan program peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, program perumahan dan

kawasan permukiman kumuh, program kawasan permukiman dan program pengembangan perumahan. Capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 99,44 dari target 75. Persentase realisasi kinerja atas target 2024 sebesar 132,59[^] dan persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 132,59%. Kinerja target permukiman layak huni cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan capaian kinerja Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Persentase permukiman layak huni	69,5	69,5	87,36	99,44

Ketercapaian kinerja indikator Persentase Permukiman Layak Huni tidak lepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada penanganan kawasan kumuh dan RTLH. Penangan kumuh serta penanganan RTLH dengan jumlah yang banyak yaitu 1.332 unit rumah, selain itu pada pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian terdapat beberapa kegiatan yang lokus fokusnya tidak pada lokasi kumuh, sehingga pelaksanaannya tidak mengurangi luasan kawasan kumuh secara optimal. Meskipun kinerja di indikator ini sudah tinggi namun masih perlu strategi untuk memaksimalkan kinerja kedepannya, yakni peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur dasar untuk penyediaan air bersih, sanitasi sehat, akses mobilitas serta elektrifikasi.

34) Indeks Aksesibilitas Wilayah

Indeks Aksesibilitas Wilayah adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah dapat diakses atau dijangkau dengan mudah, baik dari segi transportasi, fasilitas, layanan publik, maupun konektivitas sosial dan ekonomi. Beberapa program yang mendukung peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan penataan ruang wilayah berupa program penyelenggaraan penataan ruang, program penataan bangunan gedung dan program penataan bangunan dan lingkungannya. Realisasi kinerja di Tahun 2024 sebesar 1,08 dari target 1,08. Persentase realisasi kinerja atas target sebesar 100%, namun persentase realisasi atas target akhir RPJMD masih mencapai 86,71%. Capaian kinerja dari Tahun 2021-2024 cenderung stagnan, dijabarkan melalui tabel berikut:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Aksesibilitas Wilayah	1,08	1,08	1,08	1,08

Indeks > 1 menunjukkan akses yang sangat baik, wilayah di Kabupaten Wonosobo sangat mudah dijangkau dengan berbagai infrastruktur transportasi, layanan publik yang memadai, dan konektivitas yang tinggi antarwilayah. Faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik disebabkan oleh:

- Kabupaten Wonosobo cukup terhubung dengan kota-kota besar di Jawa Tengah dan memiliki sistem transportasi umum yang mendukung pergerakan penduduk antar wilayah;
- Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses di berbagai kecamatan; serta
- Perekonomian Wonosobo didukung oleh pasar dan distribusi barang yang lancar ke seluruh wilayah.

Namun demikian masih diperlukan peningkatan strategi guna memaksimalkan kinerja di sektor kewilayahan meliputi:

- Memperbaiki akses jalan di pedesaan yang terpencil;
- Meningkatkan kuantitas angkutan umum di pedesaan terpencil; dan
- Memperbaiki jaringan akses internet untuk meningkatkan konektivitas digital terutama di daerah pedesaan.

35) Rasio Konektivitas Wilayah

Rasio Konektivitas Wilayah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu wilayah atau daerah terhubung dengan wilayah lainnya, baik dalam hal akses transportasi, komunikasi, serta hubungan sosial dan ekonomi. Program yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah terutama perairan adalah program pengelolaan pelayaran. Realisasi kinerja Rasio Konektivitas Wilayah selama 4 Tahun kebelakang sudah tercapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Wonosobo telah dapat diakses dan telah terhubung satu sama lain. Berikut merupakan perkembangan Ratio Konektivitas Wilayah Kabupaten Wonosobo selama 4 tahun terakhir:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Wilayah	100	100	100	100

Ketercapaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Wilayah tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam memaksimalkan penyelenggaraan jalan untuk mencapai kemantapan jalan melalui.

36) Indeks Penataan Ruang

Indeks Penataan ruang digunakan untuk mengukur seberapa baik penataan ruang di suatu daerah. Penataan ruang sendiri merujuk pada usaha untuk mengelola dan memanfaatkan ruang secara terencana dan terarah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melindungi lingkungan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Upaya pencapaian target kinerja Indeks Penataan Ruang Tahun 2024 didukung dengan beberapa program yakni program penyelenggaraan penataan ruang, program penataan bangunan gedung dan program penataan bangunan dan lingkungannya. Realisasi kinerja Indeks Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 82,2 kategori (sangat baik) dari target 83, artinya persentase realisasi kinerja atas target sebesar 99,04%. Sementara itu Capaian kinerja atas target akhir RPJMD sebesar 88,15%. Namun meskipun belum tercapai 100%, terdapat peningkatan kinerja signifikan dibandingkan Tahun 2023. Berikut merupakan perkembangan Indeks Penataan Ruang Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Penataan Ruang	42,5	60	66,75	82,2

Meskipun terdapat peningkatan kinerja yang cukup signifikan, namun masih perlu dilakukan upaya perbaikan ataupun strategi untuk memaksimalkan kinerja berupa:

- Menyusun dan menempatkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- Melakukan upaya percepatan pengesahan Raperkada RDTR Perkotaan Wonosobo dan RDTR Perkotaan Kecamatan Kertek; serta

- Memastikan self declare pada pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) sesuai dengan rencana tata ruang.

37) Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air digunakan untuk menggambarkan kualitas air berdasarkan berbagai parameter kimia, fisika, dan biologis. IKA memberikan gambaran apakah air tersebut aman atau tidak untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi manusia, pertanian, industri, atau keperluan ekologis. Dalam upaya pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Air didukung dengan program yang beririsan dengan Indikator Indeks Kualitas udara dan tutupan lahan. Program dimaksud berupa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program perencanaan lingkungan hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI). Capaian kinerja Indeks Kualitas Air Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebesar 51,15 dari target 51,16, hal ini berarti persentase realisasi atas target 2024 sebesar 99,98%. Sementara itu persentase realisasi atas capaian akhir RPJMD sebesar 99,98%. Angka 51,15 menunjukkan kualitas air di Kabupaten Wonosobo masuk kategori Sedang. Berikut merupakan data perkembangan capaian Indeks Kualitas Air dari Tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Air	50,43	50,78	52,5	51,15

Beberapa kendala penyebab belum maksimalnya kualitas air di Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut: 1). Sektor pertanian di Wonosobo merupakan penyumbang PAD yang cukup tinggi serta menjadi sektor mata pencaharian terbanyak. Hal ini mendorong penggunaan pupuk kimia/organik maupun pestisida yang tinggi pula. Ketika hujan datang, bahan kimia tersebut dapat terbawa ke saluran air dan mengurangi kualitas air. Selain itu, limbah organik dari sektor pertanian juga dapat mencemari sumber air; 2). Pengolahan kayu menyebabkan penggundulan lahan serapan air ataupun hutan sehingga rentan terhadap erosi tanah Erosi tanah dapat menyebabkan sedimentasi di sungai, yang mengarah pada peningkatan kekeruhan air dan penurunan kualitasnya; dan 3). Kabupaten Wonosobo memiliki curah hujan yang tinggi. Hujan lebat dapat membawa lebih banyak partikel sedimen dari permukaan tanah ke dalam sumber air. Hal ini

menyebabkan peningkatan kekeruhan dan menurunnya kualitas air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya-upaya oleh Pemerintah Daerah berupa:

- Meningkatkan intensitas sosialisasi Penggunaan Pupuk Secara Tepat dan Efisien terkait dengan informasi dosis pupuk, teknik pemupukan serta pengelolaan limbah pertanian ;
- Menyusun program pertanian berkelanjutan; serta
- Mengimplementasikan penggunaan teknologi pertanian terbaru.

38) Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kualitas udara di suatu area, dan apakah udara tersebut aman atau berbahaya bagi kesehatan manusia. Realisasi indikator kinerja Tahun 2024 sebesar 92,05 atau berpredikat (Baik), artinya secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas udara memenuhi target. Dalam upaya pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Udara didukung dengan program yang beririsan dengan Indikator Indeks Kualitas air dan tutupan lahan. Program dimaksud berupa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program perencanaan lingkungan hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI). Sebenarnya sasaran ini telah melampaui target, tetapi karena ada normalisasi berdasarkan predikat AKIP angka capaian berkurang 10%, sehingga capaian per indikator Indeks Kualitas Udara tidak bisa mencapai 100%.

Realisasi Indeks kualitas udara pada Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan yang tadinya 88,60% di tahun 2023 menjadi 92,05% di tahun 2024.

Berikut merupakan data perkembangan Indeks Kualitas Udara Kabupaten Wonosobo:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Udara	88,64	86,3	88,6	92,05

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 terdapat beberapa kendala seperti: 1). Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK) belum sesuai dengan harapan, karena produsen data dari instansi belum bisa memenuhi data yang dibutuhkan; 2). Masih adanya kegiatan/usaha yang belum melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal; dan 3). Belum dilaksanakan kegiatan pengawasan secara optimal dan komprehensif. Selanjutnya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi perlu dilakukan upaya berupa:

1. Melakukan koordinasi lebih intens dalam meningkatkan capaian indeks kualitas udara
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi lintas stakeholder yang memiliki program konservasi di wilayah wonosobo untuk menghindari tumpang tindih program pada wilayah yang sama.
3. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan.
4. Koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengawasan pengelolaan lingkungan.

39) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana berbagai jenis tutupan lahan (seperti hutan, lahan pertanian, pemukiman, dan lahan terbuka) mendominasi suatu wilayah. Dalam upaya pencapaian target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan didukung dengan program yang beririsan dengan Indikator Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air. Program dimaksud berupa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, program perencanaan lingkungan hidup, program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), program penanganan pengaduan lingkungan hidup dan program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI). Indeks tutupan lahan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 tercapai 56,21 dari target 47,92. Persentase realisasi atas target 2024 sebesar 118,61%, sementara persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 115,85%. Capaian realisasi 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 yakni meningkat 18,75%. Trend realisasi kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan cenderung positif, namun mengalami penurunan di Tahun 2023 dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,36	56,53	47,92	66,67

Meskipun telah mencapai target akhir RPJMD namun tetap diperlukan strategi untuk peningkatan kinerja salah satunya melalui 1). Penyusunan kebijakan rehabilitasi dan restorasi lahan pertanian terutama di daerah yang rawan seperti Dataran Tinggi Dieng dan aliran Sungai Serayu.

40) Persentase sampah yang terkelola

Indikator persentase sampah yang terkelola adalah salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sampah yang dihasilkan di suatu daerah dapat dikelola secara efektif, termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan yang aman. Program pendukung untuk mewujudkan capaian target dalam rangka meningkatkan kinerja layanan persampahan berupa program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan program pengelolaan persampahan. Capaian realisasi indikator kinerja di Tahun 2024 adalah 51 atau tercapai 95,31% atas target. Sementara itu persentase realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 85%. Capaian realisasi tersebut masih di bawah capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 61%. Meskipun belum tercapai 100%, namun kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Wonosobo meningkat 12% dibanding realisasi tahun 2023. Berikut merupakan capaian indikator persentase sampah terkelola dari tahun 2021-2024:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Persentase sampah yang terkelola	45,51	48,53	41,04	51

Beberapa kendala yang dihadapi dalam kinerja indikator Persentase Sampah yang Terkelola antara lain:

- Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada di TPA sehingga belum bisa maksimal dalam pengolahan dan pemilahan sampah;
- Kekurangan Sumber Daya Anggaran guna pemenuhan teknologi sampah sesuai dengan ketentuan;
- Volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan luasan lahan yang ada di TPA

Selanjutnya upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan kebijakan besaran retribusi persampahan, pembatasan sampah masuk TPA serta melakukan internalisasi pengelolaan sampah mandiri pada masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan teknis TPS3R serta penyusunan road map sampah tingkat kabupaten.

41) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) bertujuan untuk mengukur seberapa siap suatu daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik itu bencana alam, sosial, ekonomi, maupun politik. Program yang mendukung ketercapaian target kinerja Indeks Ketahanan Daerah berupa program penanggulangan bencana dan program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Berdasarkan data, realisasi Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2024 sebesar 0,9 dari target 0,84. Persentase realisasi atas target 2024 sebesar 107,14 persen dan realisasi atas target akhir RPJMD sebesar 107,14 persen. Capaian kinerja Tahun 2024 meningkat dibanding Tahun 2023 sebesar 0,02 poin.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,84	0,88	0,9

Apabila Dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah, capaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Wonosobo menempati peringkat ke 4 tertinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.10

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Se-Jawa Tengah Tahun 2024

NO	KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH	NILAI IKD
1	MAGELANG	0,94
2	KLATEN	0,94
3	KEBUMEN	0,90
4	WONOSOBO	0,88
5	CILACAP	0,86
6	GROBOGAN	0,83
7	KOTA SURAKARTA	0,82
8	BANYUMAS	0,81
9	BANJARNEGARA	0,78
10	KARANGANYAR	0,78
11	PEMALANG	0,79
12	SEMARANG	0,75
13	PURWOREJO	0,79
14	KUDUS	0,69
15	TEGAL	0,75
16	WONOGIRI	0,67
17	REMBANG	0,63

NO	KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH	NILAI IKD
18	KOTA SEMARANG	0,66
19	DEMAK	0,71
20	KENDAL	0,70
21	JEPARA	0,54
22	SUKOHARJO	0,63
23	TEMANGGUNG	0,52
24	BREBES	0,57
25	BLORA	0,51
26	KOTA TEGAL	0,54
27	PEKALONGAN	0,56
28	PURBALINGGA	0,47
29	KOTA PEKALONGAN	0,55
30	BATANG	0,47
31	PATI	0,49
32	KOTA SALATIGA	0,43
33	KOTA MAGELANG	0,39
34	BOYOLALI	0,82
35	SRAGEN	0,52

Capaian kinerja Tahun 2024 dapat tercapai melalui penguatan jaringan pentahelix khususnya dengan bantuan relawan penanggulangan bencana dari tingkat kecamatan hingga desa. Meskipun capaian realisasi kinerja telah melebihi target RPJMD namun masih perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kinerja selanjutnya, meliputi:

- Menambah sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau masyarakat menggunakan aplikasi <https://sikk.wonosobokab.go.id/>
- Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya, dengan menyediakan dokumen jalur evakuasi Kecamatan Watumalang dan Sukoharjo serta pembuatan jalur evakuasi mandiri, desa kalikarung, kecamatan kalibawang;
- Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat, ditempuh mengadakan MOU Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan Bulog;
- Pemantauan berkala hulu sungai, dalam rangka mengurangi risiko banjir bandang dengan membuat dokumen RPIP didalamnya ada kolam retensi di Dieng;
- Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota, ditempuh dengan evaluasi DAM Sumber Daya Air DPUPR;
- Pemulihan pelayanan dasar pemerintah, dengan dasar hukum Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan.

2.3.3 Realisasi Anggaran per Misi Daerah

Sebagaimana perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024, terdapat program dan anggaran yang mendukung pencapaian sasaran Daerah. Program-program tersebut dikelompokkan dalam urusan pemerintahan yang mendukung masing-masing Misi Daerah. Sehingga dapat disajikan tabel realisasi program sebagaimana tabel berikut:

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
MISI 1: Mewujudkan Kehidupan Politik Yang Demokratis Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Mempercepat Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat		1.616.566.831.216	1.570.252.523.421	97,14
TUJUAN: Meningkatkan Demokrasi		37.222.054.500	37.092.083.634	99,65
SASARAN: Meningkatnya Pemenuhan Hak-Hak Politik		32.699.443.800	32.687.835.960	99,96
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	32.699.443.800	32.687.835.960	99,96
TUJUAN: Membangun Harmoni Sosial Dalam Masyarakat		3.644.590.000	3.602.244.340	98,84
SASARAN: Meningkatnya Toleransi Kehidupan Bermasyarakat		3.644.590.000	3.602.244.340	98,84
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.024.590.000	2.009.464.680	99,25
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	250.000.000	224.830.000	89,93
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.370.000.000	1.367.949.660	99,85
SASARAN: Meningkatnya Keamanan, Ketentaman Dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas)		4.522.610.700	4.404.247.674	97,38
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.953.610.000	2.944.147.224	99,68

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.569.000.700	1.460.100.450	93,06
TUJUAN: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik		1.575.700.186.716	1.529.558.195.447	97,07
SASARAN: Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel		423.249.039.017	419.555.654.233	99,13
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	405.414.135.030	403.018.247.077	99,41
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	914.423.900	906.236.648	99,10
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.334.384.331	2.208.092.486	94,59
4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	626.787.069	612.731.719	97,76
5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	241.820.000	232.977.500	96,34
6	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	394.000.000	362.809.882	92,08
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	67.200.000	64.892.957	96,57
8	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.054.465.311	4.885.910.161	96,67
9	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.960.738.176	1.561.091.018	79,62
10	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	4.689.490.000	4.195.229.610	89,46
11	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	641.000.000	617.842.884	96,39
12	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	910.595.200	889.592.291	97,69

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
SASARAN: Terwujudnya Pemerintahan Yang Kapabel		3.271.111.666	3.202.347.264	97,90
1	Program Kepegawaian Daerah	1.372.111.666	1.337.087.750	97,45
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.570.000.000	1.562.201.606	99,50
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	20.000.000	19.951.150	99,76
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	56.000.000	55.921.088	99,86
5	Program Pengelolaan Arsip	253.000.000	227.185.670	89,80
SASARAN: Menguatnya Transparansi Informasi Publik Dan Pengelolaan Komunikasi Publik		3.146.300.000	3.120.999.836	99,20
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	3.146.300.000	3.120.999.836	99,20
SASARAN: Meningkatnya Pelayanan Publik		1.146.033.736.033	1.103.679.194.114	96,30
1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	210.200.000	208.065.120	98,98
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.291.817.869	1.248.512.233	96,65
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	18.578.127.967	18.362.691.997	98,84
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.199.171.653	2.154.591.201	97,97
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.032.760.415	995.417.096	96,38
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.119.579.127.851	1.077.663.939.420	96,26

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
7	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.901.780.918	1.823.097.088	95,86
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	30.000.000	23.502.825	78,34
9	Program Pendaftaran Penduduk	1.033.499.360	1.024.976.099	99,18
10	Program Pencatatan Sipil	177.250.000	174.401.035	98,39
MISI 2: Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh Untuk Mengurangi Kemiskinan Yang Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Koperasi		77.745.61 9.341	74.180.768.236	95,41
TUJUAN: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan		69.089.29 6.520	65.783.578.297	95,22
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Dominan		44.336.78 4.019	41.602.60 4.299	93,83
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	135.000.000	132.588.595	98,21
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan	25.650.000	24.783.070	96,62
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	40.000.000	39.050.400	97,63
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	525.000.000	388.122.446	73,93
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.068.000.000	25.657.177.740	94,79
6	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	601.150.000	510.507.756	84,92
7	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	14.100.000	13.364.550	94,78

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	731.433.375	723.828.395	98,96
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.288.887.855	1.284.222.085	99,64
10	Program Pengembangan Ekspor	7.150.000	7.089.640	99,16
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	105.257.135	105.016.544	99,77
12	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	12.150.000	11.770.700	96,88
13	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.419.002.000	5.208.440.843	96,11
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.364.003.654	7.496.641.535	89,63
SASARAN: Berkembangnya Potensi Sektor Pariwisata		13.023.201.000	12.831.414.030	98,53
1	Program Pengembangan Kebudayaan	2.686.000.000	2.678.364.582	99,72
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	50.000.000	47.957.200	95,91
3	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.449.201.000	7.373.353.550	98,98
4	Program Pemasaran Pariwisata	1.200.000.000	1.192.885.946	99,41
5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	170.000.000	166.163.372	97,74
6	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.468.000.000	1.372.689.380	93,51
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Investasi		994.887.000	965.043.512	97,00

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Promosi Penanaman Modal	33.200.000	33.200.000	100,00
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	350.000.000	347.680.272	99,34
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	611.687.000	584.163.240	95,50
SASARAN: Meningkatnya Pertumbuhan Umkm, Koperasi Dan Lembaga Ekonomi Desa		2.078.101.680	10.384.516.456	499,71
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	690.000.000	619.121.661	89,73
2	Program Pengembangan Umkm	792.174.131	776.269.271	97,99
3	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	525.170.000	522.143.461	99,42
4	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	27.065.549	27.058.000	99,97
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	43.692.000	42.734.124	97,81
TUJUAN: Menurunkan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat		8.656.322.821	8.397.189.939	97,01
SASARAN: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Terhadap Ekonomi Produktif		297.500.000	281.520.000	94,63
1	Program Penyuluhan Pertanian	297.500.000	281.520.000	94,63
SASARAN: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah		8.358.822.821	8.115.669.939	97,09
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.917.282.000	7.678.308.030	96,98

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	246.540.821	245.453.199	99,56
3	Program Hubungan Industrial	185.000.000	184.948.930	99,97
4	Program Perencanaan Tenaga Kerja	10.000.000	6.959.780	69,60
MISI 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Berkarakter, Berbudaya, Kreatif, Inovatif, Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Komprehensif Yang Berorientasi Pada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Lokal Dan Perkembangan Teknologi Modern		326.593.470.267	313.177.629.031	95,89
TUJUAN: Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing		326.593.470.267	313.177.629.031	95,89
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pendidikan		178.438.702.814	173.962.522.346	97,49
1	Program Pengelolaan Pendidikan	177.978.702.814	173.503.599.846	97,49
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	200.000.000	199.934.000	99,97
3	Program Pengembangan Kurikulum	260.000.000	258.988.500	99,61
SASARAN: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		116.711.254.935	108.375.002.265	92,86
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98.808.045.427	91.754.005.506	92,86
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.161.591.305	1.026.325.000	88,36
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.465.679.480	1.045.765.609	71,35
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.981.220.080	1.797.132.860	90,71

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
5	Program Pengendalian Penduduk	598.257.643	549.892.829	91,92
6	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.986.661.000	7.529.744.422	94,28
7	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	4.709.800.000	4.672.136.039	99,20
SASARAN: Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesetaraan Dalam Dimensi Sosial		14.133.512.518	13.693.511.741	96,89
1	Program Pembinaan Perpustakaan	1.294.300.000	1.218.026.717	94,11
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	21.180.000	21.000.000	99,15
3	Program Rehabilitasi Sosial	900.000.000	780.088.781	86,68
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	45.000.000	44.978.000	99,95
5	Program Pemberdayaan Sosial	836.200.000	795.926.969	95,18
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	836.200.000	795.926.969	95,18
7	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.238.505.482	6.115.439.333	98,03
8	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	705.654.292	705.599.989	99,99
9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	110.000.000	110.000.000	100,00
10	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	18.000.000	18.000.000	100,00
11	Program Perlindungan Perempuan	110.000.000	109.657.220	99,69
12	Program Penanganan Bencana	135.000.000	123.690.250	91,62

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	840.000.000	835.215.184	99,43
14	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	385.000.000	373.645.406	97,05
15	Program Penataan Desa	1.522.200.000	1.510.044.179	99,20
16	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	136.272.744	136.272.744	100,00
17	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.032.760.415	995.417.096	96,38
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Pemuda Dan Olahraga		17.310.000.000	17.146.592.679	99,06
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	400.000.000	395.226.325	98,81
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.710.000.000	16.551.366.354	99,05
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00
MISI 4: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan Untuk Menciptakan Pembangunan Yang Merata		203.467.260.073	192.338.830.705	94,53
TUJUAN: Meningkatkan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Yang Berkualitas		199.388.410.073	188.500.501.499	94,54
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan		125.615.891.573	115.512.649.156	91,96
1	Program Penyelenggaraan Jalan	125.615.891.573	115.512.649.156	91,96
SASARAN: Meningkatnya Layanan Akses Air Limbah Domestik Layak		19.501.497.000	19.453.744.873	99,76

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.501.497.000	19.453.744.873	99,76
SASARAN: Meningkatnya Layanan Akses Air Minum Layak		15.623.264.000	15.605.323.121	99,89
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.623.264.000	15.605.323.121	99,89
SASARAN: Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi		9.501.250.000	9.127.541.295	96,07
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	9.151.250.000	8.798.904.761	96,15
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	350.000.000	328.636.534	93,90
SASARAN: Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Jalan		13.692.682.500	13.542.552.795	98,90
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	13.692.682.500	13.542.552.795	98,90
SASARAN: Tersedianya Perumahan Dan Kawasan Permukiman Layak Huni		15.453.825.000	15.258.690.259	98,74
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	12.000.800.000	11.843.201.912	98,69
2	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	50.000.000	27.408.710	54,82
3	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	360.000.000	358.126.524	99,48
4	Program Kawasan Permukiman	2.431.525.000	2.422.651.640	99,64
5	Program Pengembangan Perumahan	611.500.000	607.301.473	99,31

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
TUJUAN: Meningkatkan Perkembangan Wilayah		4.078.850.000	3.838.329.206	94,10
SASARAN: Meningkatnya Aksesibilitas, Konektivitas Dan Penataan Ruang Wilayah		4.078.850.000	3.838.329.206	94,10
1	Program Pengelolaan Pelayaran	75.000.000	74.095.422	98,79
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	850.000.000	632.297.347	74,39
3	Program Penataan Bangunan Gedung	763.850.000	754.228.279	98,74
4	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	2.390.000.000	2.377.708.158	99,49
MISI 5: Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Dengan Tetap Menjaga Keseimbangan Dan Pelestarian Fungsi Dan Keberadaannya Dalam Upaya Menopang Kehidupan Dan Penghidupan Akan Datang		18.083.77 2.314	16.360.43 3.310	90,47
TUJUAN: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Tanggap Terhadap Perubahan Iklim		16.458.77 2.314	14.789.23 8.212	89,86
SASARAN: Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan		2.571.616.814	2.495.865.591	97,05
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	176.107.500	171.766.655	97,54
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	538.261.400	503.453.624	93,53
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.700.297.914	1.675.134.782	98,52
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	46.950.000	42.017.980	89,50

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.000.000	98.319.500	98,32
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.000.000	5.173.050	51,73
SASARAN: Meningkatnya Kinerja Layanan Persampahan		13.887.155.500	12.293.372.621	88,52
1	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	35.000.000	33.895.713	96,84
2	Program Pengelolaan Persampahan	13.852.155.500	12.259.476.908	88,50
TUJUAN: Mengurangi Tingkat Risiko Bencana		1.625.000.000	1.571.195.098	96,69
SASARAN: Terwujudnya Wilayah Yang Berketahanan Bencana		1.625.000.000	1.571.195.098	96,69
1	Program Penanggulangan Bencana	1.395.000.000	1.345.533.098	96,45
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	230.000.000	225.662.000	98,11
JUMLAH		2.242.456.953.211	2.166.310.184.703	96,60

Berdasarkan tabel program, anggaran dan realisasi per Misi Daerah Tahun 2024 di atas, dapat diringkas bahwa untuk mencapai sasaran pada masing-masing Misi Daerah, kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana rincian berikut:

- (1) MISI 1: Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.616.566.831.216,00 dengan realisasi sebesar Rp1.570.252.523.42100, atau dengan persentase 97,14%.

- (2) Misi 2: Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi, dialokasikan anggaran sebesar Rp77.745.619.341,00 dengan realisasi sebesar Rp74.180.768.236,00, atau dengan persentase 95,41%.
- (3) Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern, dialokasikan anggaran sebesar Rp326.593.470.267,00 dengan realisasi sebesar Rp313.177.629.031,00, atau dengan persentase 95,89%.
- (4) Misi 4: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata, dialokasikan anggaran sebesar Rp203.467.260.073,00 dengan realisasi sebesar Rp192.338.830.705,00, atau dengan persentase 94,53%.
- (5) Misi 5: Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang, dialokasikan anggaran sebesar Rp18.083.772.314,00 dengan realisasi sebesar Rp16.360.433.310,00, atau dengan persentase 90,47%.

2.3.4 Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Strategis

Efektivitas anggaran dapat diperoleh dari dengan capaian masing-masing indikator sasaran dibandingkan dengan bagaimana kinerja anggaran pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal ini bahwa masing-masing capaian indikator sasaran telah dikelompokkan dalam masing-masing Misi Daerah, sehingga kinerja anggaran juga diklasifikasikan dengan kelompok yang sama. Berikut ini disajikan tabel efektivitas anggaran terhadap capaian strategis yang telah dikelompokkan per Misi Daerah.

Tabel 2.3.4.1

Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Strategis Tahun 2024

No.	Misi Daerah dan Kriteria Capaian Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	%	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Misi 1	11		1.616.566.831.216	1.570.252.523.421	97,14
a	Sangat Tinggi	10	91			
b	Tinggi	1	9			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
2	Misi 2	10		77.745.619.341	74.180.768.236	95,41
a	Sangat Tinggi	7	70			
b	Tinggi	1	10			
c	Sedang	0	0			

No.	Misi Daerah dan Kriteria Capaian Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	%	Anggaran		
				Pagu Anggaran	Realisasi	%
d	Rendah	1	10			
e	Sangat Rendah	1	10			
3	Misi 3	6		326.593.470.267	313.177.629.031	95,89
a	Sangat Tinggi	6	100			
b	Tinggi	0	0			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
4	Misi 4	9		203.467.260.073	192.338.830.705	94,53
a	Sangat Tinggi	8	89			
b	Tinggi	1	11			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
5	Misi 5	5		18.083.772.314	16.360.433.310	90,47
a	Sangat Tinggi	5	100			
b	Tinggi	0	0			
c	Sedang	0	0			
d	Rendah	0	0			
e	Sangat Rendah	0	0			
	JUMLAH	41		2.242.456.953.211	2.166.310.184.703	96,60

Berdasarkan tabel efektivitas anggaran terhadap capaian strategis tahun 2024 di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

- 1) Pada misi ke-1 terdapat 11 indikator sasaran strategis dengan kriteria capaian sangat tinggi sejumlah 10 indikator dan kriteria capaian tinggi sejumlah 1 indikator. Memperhatikan realisasi anggaran sebesar 97,14% dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pencapaian Misi Daerah ke-1 ini berjalan efektif dan efisien.
- 2) Pada misi ke-2 terdapat 10 indikator sasaran strategis dengan kriteria capaian sangat tinggi sejumlah 7 indikator, kriteria capaian tinggi sejumlah 1 indikator, kriteria capaian rendah sejumlah 1 indikator dan kriteria capaian sangat rendah sebanyak 1 indikator. Merujuk pada realisasi anggaran sebesar 95,41% dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pencapaian Misi Daerah ke-2 ini berjalan cukup efektif dan efisien. Namun Meskipun 95,41% anggaran sudah digunakan, realisasi kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan kesuksesan total. Terdapat kinerja yang sangat tinggi (70%), namun juga terdapat 10% kegiatan yang memiliki kinerja yang rendah dan 10% kinerja sangat rendah yang perlu diperhatikan serius. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa meskipun dana sudah tersedia, beberapa program atau kegiatan mungkin menghadapi masalah seperti pelaksanaan yang

buruk, pengelolaan yang kurang efektif atau adanya kendala operasional yang signifikan.

- 3) Pada misi ke-3 terdapat 6 indikator sasaran strategis dan semua capaian masuk kriteria sangat tinggi. Memperhatikan realisasi anggaran sebesar 95,89% dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pencapaian Misi Daerah ke-3 ini berjalan cukup efektif dan efisien.
- 4) Pada misi ke-4 terdapat 9 indikator sasaran strategis dengan kriteria capaian sangat tinggi sejumlah 8 indikator dan kriteria capaian tinggi sebanyak 1 indikator. Memperhatikan realisasi anggaran sebesar 94,53% dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pencapaian Misi Daerah ke-4 ini berjalan cukup efektif dan efisien.
- 5) Pada misi ke-5 terdapat 5 indikator sasaran strategis dan semua capaian masuk kriteria sangat tinggi. Dengan berdasarkan pada realisasi anggaran sebesar 90,47% dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pencapaian Misi Daerah ke-5 ini berjalan cukup efektif dan efisien.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Dasar hukum penyelenggaraan Tugas Pembantuan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, selain mendasarkan pada asas desentralisasi, juga dapat dilaksanakan berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini mendasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 Ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (11) menjelaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Urusan pemerintah daerah yang dapat ditugaskan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat absolut/mutlak, yaitu pertahanan, keamanan, keagamaan, yustisi, politik luar negeri serta moneter dan fiskal.

Tugas pembantuan tersebut diselenggarakan, dikarenakan tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut serta laporan realisasi anggaran berupa neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang dari para kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dana.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas Pembantuan dari Pemerintah Tingkat Atasnya, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang di tugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Tidak ada Target Kinerja dalam Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga.

3.1.2 Realisasi

Tidak ada Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran dalam Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak menerima Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

3.1.1 Target Kinerja

Tidak ada Target Kinerja dalam Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

3.1.2 Realisasi

Tidak ada Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran dalam Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Wonosobo karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak ada Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan tugas pembantuan baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada Saran dan Tindak Lanjut oleh Kabupaten Wonosobo dalam Langkah tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan dalam tugas pembantuan karena pada tahun 2024 Kabupaten Wonosobo tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas dalam pengelolaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan yang dilaksanakan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar; dan
- c. Pendidikan kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (TK, RA, KB, TPA, SPS)	27.266	Setiap Tahun	Angka Partisipasi Sekolah	93,4	Pertahun	4.886.777.000
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,23		
					Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	78,72		
					Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2,33		
					Kecukupan formasi guru ASN	8,84		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Indek distribusi guru	0,39		
					Proporsi PTK bersertifikat	47,35		
					Proporsi PTK penggerak	7,43		
					Pengaduan pelatihan guru	0,25		
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTs)	Jumlah Warga negara Usia 7-12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SD/MI dan Jumlah Warga negara Usia 13-15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar/SMP/MTs	95.397		SD			50.477.400.440
					Angka partisipasi kasar	99,01		
					Angka partisipasi sekolah	99,77		
					Angka partisipasi murni	92,19		
					Kemampuan literasi	81,35		
					Kemampuan numerasi	72,26		
					Perbedaan Skor Literasi	3,52		
					Perbedaan Skor Numerasi	1,51		
					Indeks iklim keamanan	72,65		
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	65,50		
					Kecukupan formasi guru ASN	8,84		
					Indeks distribusi guru	0,39		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Proporsi PTK bersertifikat	36,84		
					Proporsi PTK penggerak	0,09		
					Pengalaman pelatihan guru	100		
					SMP			
					Angka partisipasi kasar	108,82		
					Angka partisipasi sekolah	94,02		
					Angka partisipasi murni	85,66		
					Kemampuan literasi	83,96		
					Kemampuan numerasi	81,84		
					Perbedaan Skor Literasi	3,03		
					Perbedaan Skor Numerasi	1,66		
					Indeks iklim keamanan	69,34		
					Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	64,72		
					Kecukupan formasi guru ASN	2,4		
					Indeks distribusi guru	0,37		
					Proporsi PTK bersertifikat	45,06		
					Proporsi PTK	0,08		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran (Rp)
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					penggerak			
					Pengalaman pelatihan guru	96,30		
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	5.055		Angka partisipasi kasar	0		7.865.000.000
					Angka partisipasi sekolah	37,45		
					Angka partisipasi murni	NA		
					Kemampuan literasi	55,88		
					Kemampuan numerasi	61,14		
					Perbedaan Skor Literasi	6,47		
					Perbedaan Skor Numerasi	1,61		
					Indeks iklim keamanan	66,18		
					Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	55,34		
					Kecukupan formasi guru ASN	0		
					Indeks distribusi guru	0		
					Proporsi PTK bersertifikat	0		
					Proporsi PTK penggerak	0		
					Pengalaman pelatihan guru	0		

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, 2024

4.1.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp63.229.177.440 yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan alokasi anggaran pada tahun 2024 tersebut untuk pemenuhan SPM urusan pendidikan, direalisasikan sebesar Rp60.359.627.142 atau 95,46%.

Tabel 4.1.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		4.886.777.000	
2.	Pendidikan Dasar		50.477.400.440	
3.	Pendidikan Kesetaraan		7.865.000.000	

4.1.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Guru dan Pengawas sebagai berikut:

Tabel 4.1.3

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	315
3.	Strata 1	4.351
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	16
6.	Diploma II	24
7.	SLTA/Sederajat	108
8.	SLTP/Sederajat	17
9.	SD/Sederajat	4
	Jumlah	4.837

4.1.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.4

Realiasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)

1.	Pendidikan Anak Usia Dini	27.266	27.266	100	4.886.777.000	4.808.872.771	98,41
2.	Pendidikan Dasar	95.397	95.397	100	50.477.400.440	48.004.910.537	95,1
3.	Pendidikan Kesetaraan	5.055	5.055	100	7.865.000.000	7.545.843.834	95,94

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Pendidikan Anak Usia Dini	27.266	27.266	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Angka Partisipasi Sekolah	93,4	93,4	100	20
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	80,23	80,23	100	20
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	78,72	78,72	100	20
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	2,33	2,33	100	20
5	Kecukupan formasi guru ASN	8,84	8,84	100	20
6	Indek distribusi guru	0,39	0,46	100	20
7	Proporsi PTK bersertifikat	47,35	50	100	20
8	Proporsi PTK penggerak	7,43	7,43	100	20
9	Pengaduan pelatihan guru	0,25	0,25	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		

					(5 x 80%)
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Pendidikan Dasar	95.397	95.397	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
	SD				
1	Angka partisipasi kasar	99,01	99,01	100	20
2	Angka partisipasi sekolah	99,77	99,77	100	20
3	Angka partisipasi murni	92,19	92,19	100	20
4	Kemampuan literasi	81,35	88,4	100	20
5	Kemampuan numerasi	72,26	82,01	100	20
6	Perbedaan Skor Literasi	3,52	3,52	100	20
7	Perbedaan Skor Numerasi	1,51	1,51	100	20
8	Indeks iklim keamanan	72,65	77,12	100	20
9	Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	65,50	68,64	100	20
10	Kecukupan formasi guru ASN	8,84	8,84	100	20
11	Indeks distribusi guru	0,39	0,39	100	20
12	Proporsi PTK bersertifikat	36,84	36,84	100	20
13	Proporsi PTK penggerak	0,09	0,09	100	20
14	Pengalaman pelatihan guru	100	100	100	20
	SMP				
1	Angka partisipasi kasar	108,82	108,82	100	20
2	Angka partisipasi sekolah	94,02	92,8	100	20
3	Angka partisipasi murni	85,66	85,66	100	20
4	Kemampuan literasi	83,96	90,64	100	20
5	Kemampuan numerasi	81,84	87,7	100	20
6	Perbedaan Skor Literasi	3,03	3,02	100	20
7	Perbedaan Skor Numerasi	1,66	2,06	100	20
8	Indeks iklim keamanan	69,34	73,75	100	20
9	Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	64,72	75,14	100	20
10	Kecukupan formasi guru ASN	2,4	2,4	100	20
11	Indeks distribusi guru	0,37	0,37	100	20

12	Proporsi PTK bersertifikat	45,06	45,06	100	20
13	Proporsi PTK penggerak	0,08	0,08	100	20
14	Pengalaman pelatihan guru	96,30	96,30	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Pendidikan Kesetaraan	5.055	5.055	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Angka partisipasi kasar	0	0	100	20
2	Angka partisipasi sekolah	75.20	37,45	100	20
3	Angka partisipasi murni	100.00	NA	100	20
4	Kemampuan literasi	50.49	55,88	100	20
5	Kemampuan numerasi	39.79	61,14	100	20
6	Perbedaan Skor Literasi	4.39	6,47	100	20
7	Perbedaan Skor Numerasi	2.81	1,61	100	20
8	Indeks iklim keamanan	67.00	66,18	100	20
9	Indeks iklim kebhinekaan dan inklusivitas	60.59	55,34	100	20
10	Kecukupan formasi guru ASN	0	0	100	20
11	Indeks distribusi guru	0	0	100	20
12	Proporsi PTK bersertifikat	0	0	100	20
13	Proporsi PTK penggerak	0	0	100	20
14	Pengalaman pelatihan guru	0	0	100	20

Tabel 4.1.5

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
-----	-----------------------	--------------------------------------	---------------------

1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3.	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

(Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo, 2024)

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

4.1.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1.6
Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Basis Data yang valid dan akurat.	Belum tersedia indeks harga yang mencakup seluruh aktivitas dalam penyusunan kebutuhan pemenuhan SPM.	Melaksanakan penghitungan ulang kebutuhan dan asumsi pendanaan untuk jenis aktivitas pemenuhan SPM sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.
2	Kualifikasi pendidik jenjang PAUD	Masih banyak pendidik jenjang PAUD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan D4/S1.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan biaya Pendidikan bagi Guru PAUD untuk menyelesaikan Pendidikan D4/S1, secara bertahap. - Menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dalam pelaksanaan program percepatan pemenuhan kualifikasi Pendidikan D4/S1 bagi Guru PAUD.
3.	Daya tampung sekolah	Ketersediaan daya tampung sekolah negeri di beberapa wilayah belum seimbang dengan jumlah anak usia sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusulkan tambahan jumlah rombel pada wilayah yang kekurangan daya tampung. - Berkolaborasi dengan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menambah penyediaan daya tampung.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang mempunyai tugas dalam pengelolaan kesehatan masyarakat. Pelayanan Dasar di Urusan Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga TB; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

4.2.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2.1

Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	9353	Setiap Tahun	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	9353	pertahun	1.611.208.000
					Tablet tambah darah	9353		
					Alat deteksi risiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9353		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	9353		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9353		
					Dokter/dokter spesialis kebidanan	177		
					Bidan	502		
					Perawat	768		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	9317	Setiap tahun	Formulir Partograf	9317	pertahun	620.491.000
					Kartu ibu (rekam medis)	9317		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9317		
					Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	177		
					Bidan	502		
					Perawat	768		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	9351	Setiap tahun	Vaksin Hepatitis B0	9351	pertahun	224.261.695
					Vitamin K1 injeksi	9351		
					Salep/tetes mata antibiotik	9351		
					Formulir bayi baru lahir	9351		
					Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	9351		
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9351		
					Dokter/dokter spesialis Anak	175		
					Bidan	502		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Perawat	768		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	50.628	Setiap tahun	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	50.628	Pertahun	100.000.000
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	50.628		
					Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	50.628		
					Vitamin A Biru	6.069		
					Vitamin A Merah	49.016		
					Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib, Campak, Rubella	22.138		
					Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	114.780		
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	136.918		
					Peralatan Anafilaktik	265		
					Bidan	502		
					Dokter	172		
					Perawat	768		
					Ahli Gizi	31		
					Guru PAUD	1,073		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Kader Kesehatan	6,679		
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	118.300	Setiap tahun	Buku rapor kesehatanku	25.784	Pertahun	542.557.000
					Buku pemantauan kesehatan	15.350		
					Kuesioner skrining kesehatan	118.300		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	731		
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	268		
					Dokter/Dokter gigi	208		
					Bidan	502		
					Perawat	769		
					Ahli Gizi	31		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	53		
					Guru	5.133		
					Kader Kesehatan	6.679		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan	417.592	Setiap tahun	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	Pertahun	137.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
		kesehatan			Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	Tensi:1 50 Glukom eter : 125 Alat HB: 72 Lancet Blood, Strip gula: 417.592 Kit IVA: 24		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	417.592		
					Dokter	172		
					Bidan	502		
					Perawat	768		
					Ahli Gizi	31		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	53		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6.679		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	108.636	Setiap tahun	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	108.636	Pertahun	115.000.000
					Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated	24		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			
					Buku kesehatan lansia	108.636		
					Dokter	172		
					Bidan	502		
					Perawat	768		
					Ahli Gizi	31		
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	53		
					Tenaga Non Kesehatan Terlatih	6.679		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	108.975		Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	Pertahun	60.000.000
					Tensimeter	150		
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sehat Indonesiaku(A SIK)	1		
					Obat Tensi	3.269.250		
					Dokter	172		
					Bidan	502		
					Perawat	768		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Tenaga Kesehatan Masyarakat	53		
					Tenaga Kefarmasian	36		
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	6.548	Setiap tahun	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	6.548	pertahun	582.950.000
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	1		
					Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24		
					Obat Diabetes	196.440		
					Dokter	172		
					Bidan	502		
					Perawat	768		
					Ahli Gizi	31		
					Tenaga Kefarmasian	36		
					Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	83		
					Tenaga	53		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Kesehatan Masyarakat			
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	2.338	Setiap tahun	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	33	Pertahun	98.400.000
					Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	3		
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	1		
					Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25		
					Tenaga Kesehatan/Do kter	174		
					Tenaga kesehatan : Tenaga	198		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)			
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	2		
					Tenaga profesional lainnya	1		
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan Kesehatan	11.738	Setiap tahun	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	72	Pertahun	1.415.036.240
					Reagen Zn TB	55		
					Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	11.738		
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunse n, Ose/Lidi), Rak pengering	13.250		
					Catridge tes cepat molekuler	11.738		
					Formulir	1		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					pencatatan dan pelaporan			
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1		
					Tuberkulin	117		
					Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	117		
					Perawat	768		
					Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	83		
					Penata Rontgen	26		
					Tenaga kesehatan masyarakat	53		
					Tenaga kesehatan : Radiografer	25		
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	6.679		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah Warga Negara terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	13.356	Setiap tahun	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	72	Pertahun	468,526,800
					Tes cepat HIV (RDT) pertama	13.356		
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang	13.356		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			
					Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13.356		
					Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	177		
					Perawat	768		
					Bidan	502		
					Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	25		
					Tenaga kesehatan masyarakat	53		
					Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1		

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2024)

4.2.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.525.430.735 dan direalisasikan sebesar Rp4.853.317.985 atau 87,84%.

Tabel 4.2.2
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	1.161.208.000	974.315.070	83,91
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	620.491.000	470.000.840	75,75
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	224.261.695	195.878.350	87,34
4.	Pelayanan kesehatan balita	100.000.000	87.010.780	87,01
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	542.557.000	469.802.955	86,59
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	137.000.000	128.870.900	94,07
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	115.000.000	107.674.250	93,63
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000	54.105.800	90,16
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	582.950.000	515.543.490	88,44
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	98.400.000	93.075.530	94,59
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.415.036.240	1.316.008.620	93,00
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	468.526.800	441.031.400	94,13
	Jumlah	5.525.430.735	4.853.317.985	87,84

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2024)

4.2.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 4.2.3
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	16
3.	Strata 1	212
4.	Diploma IV	73
5.	Diploma III	519

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
6.	Diploma I	1
7.	SLTA/Sederajat	23
8.	SLTP/Sederajat	10
9.	SD/Sederajat	7
	Jumlah	862

Selain tenaga PNS yang jumlahnya masih kurang apabila dibanding dengan jumlah sasaran SPM yang harus dilayani, maka untuk mendukung pelaksanaan SPM urusan kesehatan di setiap unit kerja juga ada tenaga yang statusnya tenaga kontrak, secara rinci jumlah tenaga kontrak yang ada pada Dinas Kesehatan dan UPT nya adalah sebagai berikut:

Tabel Jumlah Tenaga Kontrak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dinas Kesehatan	29
2	UPTD Labkesda	2
3	Puskesmas Wadaslintang 1	14
4	Puskesmas Wadaslintang 2	6
5	Puskesmas Kepil 1	7
6	Puskesmas kepil 2	8
7	Puskesmas Sapuran	13
8	Puskesmas Kalibawang	7
9	Puskesmas Kaliwiro	11
10	Puskesmas Leksono 1	6
11	Puskesmas Leksono 2	4
12	Puskesmas Sukoharjo 1	6
13	Puskesmas Sukoharjo 2	1
14	Puskesmas Selomerto 1	26
15	Puskesmas Selomerto 2	5
16	Puskesmas Kalikajar 1	16
17	Puskesmas Kalikajar 2	11
18	Puskesmas Kertek 1	11
19	Puskesmas Kertek 2	6
20	Puskesmas Wonosobo 1	14
21	Puskesmas Wonosobo 2	6
22	Puskesmas Watumalang	18
23	Puskesmas Mojotengah	17
24	Puskesmas Garung	12
25	Puskesmas Kejajar 1	11
26	Puskesmas Kejajar 2	6
	Jumlah	273

4.2.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2.4

Realisasi Capaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.353	9.007	96,30	Top of Form 1.161.208.000	974.315.070	83,91
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.317	9.312	99,95	Top of Form 620.491.000	Top of Form 470.000.840	75,75
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	9.351	9.180	98,17	Top of Form 224.261.695	Top of Form 195.878.350	87,34
4.	Pelayanan kesehatan balita	50.628	48.415	95,63	Top of Form 100.000.000	Top of Form 87.010.780	87,01
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	118.300	118.300	100	Top of Form 542.557.000	Top of Form 469.802.955	86,59
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	417.592	370.207	88,65	Top of Form 137.000.000	Top of Form 128.870.900	94,03
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	108.636	108.636	100	Top of Form 115.000.000	Top of Form 107.674.250	93,63
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	108.975	108.975	100	Top of Form 60.000.000	Top of Form 54.105.800	90,18
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.548	6.548	100	Top of Form 582.950.000	Top of Form 515.543.490	88,44
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.338	2.338	100	Top of Form 98.400.000	Top of Form 93.075.530	94,59
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	11.738	11.738	100	Top of Form 1.415.036.240	Top of Form 1.360.008.620	93,00

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	Tuberkulosis						
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	13.356	13.356	100	Top of Form 468.526.800	Top of Form 441.031.400	94,13

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					75,54
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	9.353	9.007	96,30	77,04
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					18,70
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1.025	900	87,80	17,56
2	Tablet tambah darah	897.930	782.100	87,10	17,42
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	9.353	9.007	96,30	19,26
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	9.353	9.007	96,30	19,26
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	9.353	9.007	96,30	19,26
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	1.537	1.147	74,63	14,92
7	Alat deteksi resiko ibu	9.353	9.007	96,30	19,26

	hamil: skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B, Sifilis dan HIV				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	9.353	9.007	96,30	19,26
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.353	9.007	96,30	19,26
10.	Media promosi komunikasi informasi dan edukasi (KIE)	48	48	100	20
11	Gel USG	683	510	74,67	14,93
12	Tenaga Medis : Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	177	177	100	20
13	Tenaga kesehatan : Perawat	768	768	100	20
14	Tenaga kesehatan : Bidan	502	502	100	20
15	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
16	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	31	100	20
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	9.977	8.690	87,10	17,42

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					79,96
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.317	9.312	99,95	79,96
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,99
1	Formulir Partograf	9.317	9.312	99,95	19,99
2	Kartu ibu (rekam medis)	9.317	9.312	99,95	19,99
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.317	9.312	99,95	19,99
4	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	48	48	100	20
5	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis obstetric dan ginekologi	177	177	100	20
6	Tenaga Kesehatan: Bidan	502	502	100	20
7	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
8	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	31	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Pelayanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					79,96
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.351	9.312	98,17	78,54
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,84
1	Vaksin Hepatitis B0	9.351	9.180	98,17	19,63
2	Vitamin K1 injeksi	9.351	9.180	98,17	19,63
3	Salep/tetes mata antibiotik	9.351	9.180	98,17	19,63
4	Formulir bayi baru lahir	9.351	9.180	98,17	19,63
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	9.351	9.180	98,17	19,63
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.351	9.180	98,17	19,63

7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	48	48	100	20
8	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis Anak	175	175	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Bidan	502	502	100	20
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	53	53	100	20
13	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	31	100	20
14	Kader Kesehatan	6.679	6.679	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					76,50
4	Pelayanan Kesehatan Balita	50.628	48.415	95,63	76,50
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,15
1	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	50.628	48.415	95,63	19,12
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	50.628	48.415	95,63	19,12
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	50.628	48.415	95,63	19,12
4	Vitamin A Biru	9.961	9.919	99,58	19,91

5	Vitamin A Merah	42.841	42.514	99,24	19,84
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	10.554	9.196	87,13	17,42
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	41.778	37.501	89,76	17,95
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	20.816	17.061	81,96	16,39
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	31.224	28.386	90,91	18,18
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak – Rubella	10.408	9.934	95,45	19,09
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	11.069	10.428	94,21	18,84
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak – Rubella	11.069	10.886	98,35	19,67
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	95.140	85.891	90,28	18,05
14	Peralatan Anafilaktik	265	256	96,60	19,32
15	Formula Terapi Gizi Buruk	1	1	100	20
16	Tenaga Medis : Dokter	172	172	100	20
17	Tenaga kesehatan : Bidan	502	502	100	20
18	Tenaga kesehatan : Perawat	768	768	100	20
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	31	31	100	20
20	Guru PAUD	1	1	100	20
21	Kader Kesehatan	6.679	6.679	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	118.300	118.300	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		

1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18,66
1	Buku rapor kesehatanku	25.784	20.455	79,33	15,86
2	Buku pemantauan kesehatan	15.350	3.570	23,26	4,65
3	Kuesioner skrining kesehatan	118.300	118.300	100	20
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	731	720	98,50	19,70
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	268	245	91,42	18,28
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah	1.923.150	1.704.510	88,63	17,72
7	Alat Pemeriksaan Hb	48	48	100	20
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	18.916	18.916	100	20
9	Media promosi Kesehatan	48	48	100	20
10	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	53.364	52.199	97,82	19,56
11	Tenaga Medis: Dokter/Dokter gigi	208	208	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Bidan	502	502	100	20
13	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
14	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	31	100	20
15	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
16	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	100	20
17	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	1	1	100	20
18	Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Kader	6.679	6.679	100	20

	Kesehatan/Dokter kecil/ peer conselor				
--	--	--	--	--	--

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					68,49
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	417.592	370.207	88,65	70,92
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,76
1	Media promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	100	20
2	Alat : Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	100	100	100	20
3	Alat : Tensimeter	150	150	100	20
4	Alat : Glukometer	125	125	100	20
5	Alat : Alat Pemeriksaan Hb	72	72	100	20
6	Alat : Tes Strip gula darah, lancet, kapas, alcohol	417.592	370.207	88,65	17,73
7	Alat : KIT IVA Tes	24	24	100	20
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	417.592	370.207	88,65	17,73
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	24	24	100	20
10	Kuesioner PUMA	1	1	100	20
11	Alat Pelayanan KB	3	3	100	20
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	100	20
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1	1	100	20
14	Tenaga Medis : Dokter	172	172	100	20
15	Tenaga kesehatan : Bidan	502	502	100	20

16	Tenaga kesehatan : Perawat	768	768	100	20
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	31	31	100	20
18	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	100	20
19	Kader Kesehatan Terlatih dan mempunyai Kualifikasi tertentu	6.679	6.679	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	108.636	108.636	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas dan tensimeter	48	48	100	20
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	48	48	100	20
3	Alat pemeriksaan kolesterol	48	48	100	20
4	Bahan medis habis pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	108.636	108.636	100	20
5	Instrumen skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ Activity Daily	24	24	100	20

	Living (ADL Barthel)				
6	Buku Kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	108.636	108.636	100	20
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	24	24	100	20
8	Tenaga medis: Dokter	172	172	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Bidan	502	502	100	20
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	31	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	100	20
13	Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	6.679	6.679	100	20
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	108.975	108.975	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	24	65	100	20
2	Obat hipertensi	3.269.250	24	100	20
3	Tensimeter	150	3.269.250	100	20
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	1	150	100	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan	24	1	100	20

	Edukasi (KIE)				
6	Tenaga Medis: Dokter	172	24	100	20
7	Tenaga kesehatan: Bidan	502	172	100	20
8	Tenaga kesehatan: Perawat	768	502	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	31	768	100	20
10	Tenaga Kesehatan: Tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku	53	31	100	20
11	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	36	53	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	36	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.548	6.548	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Obat Diabetes Melitus	196.440	196.440	100	20
2	Fotometer atau Glukometer	120	120	100	20
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes	6.548	6.548	100	20

	gula darah, kapas, alkohol, lancet				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	1	1	100	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	24	24	100	20
6	Tenaga medis: dokter	172	172	100	20
7	Tenaga kesehatan : Bidan	502	502	100	20
8	Tenaga kesehatan : Perawat	768	768	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	36	36	100	20
10	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	100	20
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	31	31	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	83	83	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2.338	2.338	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20

1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	33	33	100	20
2	Penyediaan Psikofarmaka	3	3	100	20
3	Penyediaan formulir skrining Kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	1	1	100	20
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan	1	1	100	20
5	Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	25	25	100	20
6	Tenaga medis: Dokter	174	174	100	20
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa	198	198	100	20
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	2	2	100	20
9	Tenaga profesional lainnya	1	1		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.738	11.738	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6

PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,70
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	72	72	100	20
2	Reagen Zn TB	55	49	89,09	17,81
3	Masker bedah dan Masker N95	11.738	11.738	100	20
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	13.250	11.738	88,59	17,71
5	Catridge tes cepat molekuler	11.738	11.738	100	20
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	100	20
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100	20
8	Tuberkulin	117	117		
9	Tenaga medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	176	176	100	20
10	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga kefarmasian	36	36	100	20
12	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	53	53	100	20
13	Tenaga Kesehatan: Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	83	83	100	20
14	Tenaga kesehatan: Radoiografer	25	25	100	20
15	Kader kesehatan	6.679	6.679	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
12	Pelayanan Kesehatan	13.356	13.356	100	80

	Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)				
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	72	72	100	20
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	13.356	13.356	100	20
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	13.356	13.356	100	20
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	13.356	13.356	100	20
5	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	177	177	100	20
6	Tenaga Kesehatan: Bidan	502	502	100	20
7	Tenaga Kesehatan: Perawat	768	768	100	20
8	Tenaga Kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	83	83	100	20
9	Tenaga Kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	53	53	100	20
10	Tenaga non kesehatan terlatih/mempunyai kualifikasi tertentu: pendamping dan	1	1	100	20

	penjangkauan				
--	--------------	--	--	--	--

Tabel 4.2.5

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	95,74	Tuntas Utama
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,95	Tuntas Utama
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,38	Tuntas Utama
4	Pelayanan kesehatan balita	95,65	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98,66	Tuntas Utama
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	90,68	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	99,70	Tuntas Utama
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna
	IP Keseluruhan	98,23	Tuntas Utama

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, 2024)

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Dari 12 indikator SPM Urusan Kesehatan, 5 indikator mencapai kategori Tuntas Paripurna dan 7 indikator mencapai kategori Tuntas Utama.

Indikator yang mencapai kategori Tuntas Utama yang masih rendah capaiannya yaitu Pelayanan Pada Usia Produktif dikarenakan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan atau sekedar skrining masih rendah dan masih banyaknya Masyarakat usia produktif di kabupaten

Wonosobo yang mencari penghidupan di luar kabupaten wonosobo. Langkah-langkah yang sudah dilakukan diantaranya melalui kegiatan Posbindu di desa maupun kelurahan dan menyelenggarakan *event-event* khusus di tempat-tempat tertentu.

4.2.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2.6
Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal	Masih adanya petugas pelaksana teknis di lapangan / puskesmas yang belum memahami secara detail tentang aturan atau definisi operasional dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan kurangnya koordinasi antar lintas program dan sektoral.	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelayanan SPM terhadap pelaksana teknis dilapangan dalam pelayanan SPM yang sesuai dengan aturan atau SOP yang sudah di tentukan oleh kementerian kesehatan.
		Kurangnya komitmen dari tenaga pelaksana teknis pelayanan SPM bidang kesehatan yang berada di Unit Pelaksana Teknis (Puskesmas) sebagai ujung tombak pelayanan. Jumlah tenaga kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah sasaran yang harus dilayani tidakimbang.	Melakukan Pemerataan tenaga dengan pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan yang diperlukan pada unit-unit kerja yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo. Adapun status tenaga kesehatan bisa berupa PNS maupun tenaga dengan perjanjian kerja.
		Pelaporan yang masih terkendala dengan masih adanya petugas pelaksana yang salah mengartikan definisi operasional pelayanan SPM sehingga menjadikan terhambatnya pelaporan untuk dilakukan analisis data.	Meningkatkan kapasitas petugas pelaksanaan SPM di Puskesmas dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal terutama terkait sistem pencatatan dan pelaporan data SPM bidang kesehatan.
II	Eksternal	Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pelayanan SPM sehingga mempengaruhi capaian pelaksanaan pelayanan SPM dan Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan (regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk pemenuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan SPM bidang kesehatan.	Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap pelayanan yang berkaitan dengan SPM dan pengintegrasian program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penerapan dan pencapaian SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian, maka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan SPM bidang kesehatan dapat terpenuhi.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan Dasar di Urusan Pekerjaan Umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.1

Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	16.960	Setiap Tahun	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	4.532	pertahun	15.623.264.000
					Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum	4.532		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau			
					Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	-		
					Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	12.536 12.536	Setiap Tahun Setiap Tahun	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	3.865	pertahun	19.501.497.000
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di	-		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					<p>wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T</p>			
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan	3.865		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, 2024)

4.3.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp35.124.761.000 yang bersumber dari APBD, dan terealisasi sebesar Rp35.059.067.994 atau 99,81 %.

Tabel 4.3.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	-	15.623.264.000	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	19.501.497.000	-

4.3.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

Tabel 4.3.3**Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	1
3.	Strata 1	35
4.	Diploma IV	1
5.	Diploma III	8
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	7
8.	SLTP/Sederajat	3
9.	SD/Sederajat	-
	JUMLAH	55

4.3.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3.4**Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Th. 2024**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	16.960	16.960	100	15.623.264.000	15.605.323.121	99,89 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	12.536	12.536	100	19.501.497.000	19.453.744.973	99,76 %

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)	
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)			
1	2	3	4	5	6	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	16.960	16.960	100	80	

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	4.532	4.532	100	20
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	4.532	4.532	100	20
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan	-	-	100	20

	terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM				
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	-	-	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	12.536	12.536	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan	3.865	3.865	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik				
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	414	414	100	20
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar	3.865	3.865	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				

Tabel 4.3.5

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100	Tuntas Paripurna
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo, 2024

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Untuk indikator SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari jenis layanan mutu Jaringan Bukan Perpipaan, di Kabupaten Wonosobo tidak ada jaringan air minum bukan perpipaan.

2 indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum mencapai kategori Tuntas Paripurna untuk Indeks Pencapaian (IP) SPM Tahun 2024.

4.3.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.6

Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Pekerja Umum Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Metode Pengadaan	Menggunakan metode pengadaan material baru melalui e katalog, jadi sering terjadi pergantian sistem dan masih pada masa transisi, sehingga terjadi keterlambatan pekerjaan	Perlu sosialisasi dan pembelajaran lebih dalam terkait metode pengadaan melalui e katalog
II	Eksternal		
1	Tenaga kerja lapangan	dengan metode pengadaan baru, maka berimbas pada keterlambatan pembayaran pekerja, sehingga pekerja lapangan juga terlambat dalam pembayaran	Perlu adanya dana lain untuk antisipasi dalam pembayaran pekerja di lapangan

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan. Pelayanan Dasar di Urusan Sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.1

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak	19	Setiap Tahun	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	pertahun	561.500.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
	bagi korban bencana di Kabupaten	huni			Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	11		
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	8		
					Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	Setiap Tahun	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	pertahun	50.000.000
					Subsidi uang sewa	0		
					Penyediaan rumah layak huni	0		

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2024

4.4.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp611.500.000 yang bersumber dari pendanaan APBD, dan direalisasikan sebesar Rp607.301.473 atau 99,31 %.

Tabel 4.4.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	-	561.500.000	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang	-	50.000.000	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
	layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			

4.4.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagai berikut:

Tabel 4.4.3

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	-
3.	Strata 1	15
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	3
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	-
8.	SLTP/Sederajat	-
9.	SD/Sederajat	-
	JUMLAH	18

4.4.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4.4

Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	19	19	100	561.500.000	559.943.000	99,72
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi	1	1	100	50.000.000	47.358.473	94,71

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
	masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah						

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	19	19	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	11	11	100	20
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	8	8	100	20
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	-	-	-	-
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	-	-	-	-
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan / atau Bangunan	-	-	-	-
2	Subsidi uang sewa	-	-	-	-
3	Penyediaan rumah layak huni	-	-	-	-

Tabel 4.4.5

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

(Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, 2024)

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

2 Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai kategori Tuntas Paripurna untuk Indeks Pencapaian (IP) SPMnya.

Untuk indikator SPM Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, capaiannya 100% karena sudah dilakukan tahapan pendataan maupun edukasi kepada masyarakat terdampak bencana, tetapi tidak terlaksana kegiatan relokasi karena beberapa hal, antara lain :

1. Tidak ada kegiatan relokasi (pengadaan tanah relokasi);
2. Masyarakat tidak bersedia untuk direlokasi;
3. Tidak tersedianya lahan potensial untuk relokasi;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpindah ke lokasi yang aman.

4.4.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.4.6
Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I Internal			
1		Penghitungan kebutuhan didasarkan pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga tidak semua usulan bisa tertangani	Perlu kolaborasi lintas instansi dan CSR
2		Kebutuhan lahan untuk relokasi, terbatas pada kemampuan APBD dan kemauan warga untuk di relokasi	Perlu kolaborasi lintas instansi, CSR dan perlunya edukasi secara berlanjut kepada masyarakat terdampak bencana
3		SK Kejadian bencana yang tidak bisa dikeluarkan pada setiap kejadian bencana, akan tetapi harus direkapitulasi terlebih dahulu	Perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, agar kemudian bisa segera dikeluarkan SK Kejadian bencana
4		kurangnya fasilitas sarana, prasarana dan personil untuk mendukung operasional dan kelancaran program dan kegiatan.	mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia maupun menggunakan pihak konsultan.
II Eksternal			
1		Keterbatasan kemampuan penerima manfaat untuk memberikan swadaya.	Perlu adanya berita acara kesediaan untuk memberikan swadaya.
2		Kesadaran masyarakat untuk berpindah ke lokasi yang aman dari bencana.	Edukasi berlanjut kepada masyarakat terdampak bencana.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.5.1

Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	Setiap Tahun	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	Pertahun	3.859.43 8.627
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0		
					Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	20		
					Standar	10		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			Anggaran Rp.
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara			
					Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	11		
					Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap	1		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					pelayanan kerugian material			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	31.291	Setiap Tahun	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	pertahun	60.000.000
					Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	77.995		
					Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	31.291		
					Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public KIE per jenis bencana	15		
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	2.934	Setiap Tahun	Sarana prasarana penanggulangan bencana	385	pertahun	25.000.000
					Peningkatan kapasitas	2.934		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
		terhadap bencana			personil/ Sumber Daya Manusia (SDM)			
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	11.576	Setiap tahun	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	pertahun	810.800.000
					Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	11.576		
					Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	303		
					Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0		
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	303		
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	158	Setiap Tahun	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/lapo	48	pertahun	230.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
		kebakaran			ran sampai tiba di lokasi			
					Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2		
					Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	172		
					Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan /Sumber Daya Manusia	9		
					Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	71		
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami	71		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo, 2024)

4.5.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibumlinmas, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp5.484.438.627 dengan sumber pendanaan dari APBD, dan direalisasikan sebesar Rp5.374.527.084 atau 98%.

Tabel 4.5.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		3.859.438.627	
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		60.000.000	
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		525.000.000	
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana		810.000.000	
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran		230.000.000	

4.5.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.5.3

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	7
3.	Strata 1	36
4.	Diploma IV	-

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
5.	Diploma III	6
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	55
8.	SLTP/Sederajat	6
9.	SD/Sederajat	8
	JUMLAH	118

4.5.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.5.4

Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	100	3.859.438.62 7	3.803.331.98 6	98,55
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	31.291	31.291	100	60.000.000	59.300.000	98,83
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.934	2.934	100	525.000.000	477.895.878	91,03
4.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	11.576	11.576	100	810.000.000	808.337.220	99,80
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	158	158	100	230.000.000	225.662.000	98,11

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	100	80

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	-	-	-	-
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	-	-	-	-
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	10	10	100	20
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	20	20	100	20
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	11	11	100	20
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	1	1	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	31.291	31.291	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20

1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100	20
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	77.995	77.995	100	20
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	31.291	31.291	100	20
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	15	15	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.934	2.934	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	385	385	100	20
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	2.934	2.934	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		

		(Orang)	(Orang)	(4:3 x 100%)	Layanan Dasar (5 x 80%)
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	11.576	11.576	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1		
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	11.576	11.576	100	20
3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	303	303	100	20
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	0	0		
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	303	303	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	158	158	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		

		dibutuhkan			(5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	48	48	100	20
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100	20
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	172	172	100	20
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	9	9	100	20
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	71	71	100	20
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	71	71	100	20

Tabel 4.5.5

Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi	100	Tuntas Paripurna

	Korban Bencana		
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Wonosobo, 2024)

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

100 : Tuntas Paripurna

90 – 99 : Tuntas Utama

80 – 89 : Tuntas Madya

70 – 79 : Tuntas Pratama

60 – 69 : Tuntas Muda

< 60 : Belum Tuntas

Urusan Trantibumlinmas untuk Indeks Pencapaian (IP) SPM 5 indikator mencapai kategori Tuntas Paripurna.

Pada Indikator Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 100% karena untuk Mutu Layanan Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian Materiil dan Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan tidak terpenuhi. Hal ini terjadi sebab tidak ada Warga Negara yang terkena dampak dari pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dimaksud.

4.5.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5.6

Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1	Personil	Jumlah SDM dan sarpras yang masih terbatas	Pembentukan Relawan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran tingkat desa dan kelurahan dan pelatihan untuk relawan secara berkala
2	Sarana Prasarana	Kurang layak	Perbaikan Semaksimal mungkin
II	Eksternal		
1	Wilayah	Jangkauan yang terlalu luas	Prioritas wilayah penanganan
2	Sasaran	Tempat sasaran yang berdekatan fasilitas masyarakat / Umum	Memilih sasaran yang lebih aman

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pelayanan Dasar di Urusan Sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.1

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	25	Pertahun	18.750.000
					Penyediaan permakanaan	338		17.500.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2		
					Penyediaan sandang	21		3.750.000
					Penyediaan alat bantu	49		85.000.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan	19		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	36		25.000.000
					Pemberian	86		35.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar			
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan /Bukti kepemilikan NIK	15		7.500.000
					Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12		
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5		8.750.000
					Layanan rujukan	24		22.500.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	25	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	25	Pertahun	18.750.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3		37.500.000
					Penyediaan permakanan	18		17.500.000
					Penyediaan Sandang	7		3.750.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					Penyediaan perbekalan Kesehatan	19		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15		25.000.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	25		35.000.000
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan /Bukti kepemilikan NIK	15		7.500.000
					Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12		
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5		8.750.000
					Layanan rujukan	5		22.000.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang	77	Setiap tahun	Layanan data dan pengaduan	25	Setiap Tahun	18.750.000
					Penyediaan	3		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
	luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat			
					Penyediaan permakanan	8		17.500.000
					Penyediaan Sandang	77		3.750.000
					Penyediaan alat bantu	36		65.000.000
					Penyediaan perbekalan Kesehatan	19		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15		25.000.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	26		35.000.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan /Bukti kepemilikan NIK	10		7.500.000
					Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	5		
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12		
					Pemberian pelayanan	5		8.750.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					reunifikasi keluarga			
					Layanan rujukan	5		22.500.000
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	60	Setiap Tahun	Layanan data dan pengaduan	62	Pertahun	8.750.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3		
					Penyediaan permakanan	60		17.500.000
					Penyediaan sandang	60		3.750.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan	19		
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15		25.000.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	25		35.000.000
					Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	21		7.500.000
					Akses ke layanan	25		

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN						Anggaran Rp.
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
					pendidikan dan kesehatan			
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	21		
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	41		8.750.000
					Layanan rujukan	12		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	314	Setiap Tahun	Penyediaan permakanan	157	Pertahun	70.000.000
					Penyediaan sandang	157		25.000.000
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1		
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	157		15.000.000
					Pelayanan dukungan Psikososial	30		15.000.000

(Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2024)

4.6.3. Anggaran

Dalam mendukung capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial, pada Tahun 2024 dialokasikan anggaran APBD Kabupaten Wonosobo sebesar Rp830.000.000 dan direalisasikan sebesar Rp730.497.166 atau 88,01%.

Tabel 4.6.2

Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi sosial dasar		705.000.000	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.)		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
	penyandang disabilitas terlantar di luar panti			
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten		125.000.000	

(Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2024)

Dalam pemenuhan pelayanan ke masyarakat, pendanaan dibantu oleh anggaran APBN Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Kartini Temanggung, dalam hal ini Kabupaten Wonosobo sebagai lokus pemberian bantuan. Melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertugas melaksanakan koordinasi dan pendampingan proses penyaluran kepada masyarakat.

Pada Tahun 2024 telah disalurkan beberapa program bantuan berupa Program Atensi Kewirausahaan 30 orang, Penyaluran alat bantu 46 orang, Bantuan atensi YAPI 599 orang, Program atensi pemenuhan kebutuhan hidup 69 orang, Atensi bagi difabel dan lansia 16 orang.

4.6.4. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo tahun 2024, didukung oleh personil terutama dari aparaturnya Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

- a. PNS: 8 orang
- b. Non-PNS: 4 orang

Tabel 4.6.3

Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 3	-
2.	Strata 2	2 orang
3.	Strata 1	10 orang
4.	Diploma IV	-
5.	Diploma III	-
6.	Diploma II	-
7.	SLTA/Sederajat	-
8.	SLTP/Sederajat	-

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
9.	SD/Sederajat	-
	JUMLAH	12

Dalam pelaksanaannya juga dibantu oleh pilar Sosial sebagaimana data pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Dukungan Personil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Rehabilitasi Sosial a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti b. Persentase (%) anak terlantar, yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti c. Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti d. Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh 6 orang PNS dan 4 orang non PNS, dibantu oleh TKSK sebanyak 15 orang.
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial : e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung oleh 2 orang tenaga PNS dan dibantu oleh Tagana (taruna siaga bencana) 15 orang dan 30 tagana muda.

4.6.5. Hasil Capaian SPM

Realisasi pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.6.4
Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	100	705.000.000	615.816.916	87,35
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	25	25	100			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	77	77	100			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	60	60	100			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	314	314	100	125.000.000	114.680.250	91,74

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	100	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		

1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20
1	Layanan data dan pengaduan	25	25	100	20
2	Penyediaan permakanaan	338	338	100	20
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2	2	100	20
4	Penyediaan sandang	21	21	100	20
5	Penyediaan alat bantu	49	49	100	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	19	19	100	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	36	36	100	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	86	86	100	20
9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100	20
10	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25	25	100	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12	12	100	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	20
13	Layanan rujukan	24	24	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	25	25	100	80
No.	Mutu Minimal Pelayanan	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Mutu Minimal
		Jumlah Mutu Barang/Jasa	Jumlah Mutu Barang/Jasa		

	Dasar	yang dibutuhkan	yang tersedia	(4:3 x 100%)	Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20
1	Layanan data dan pengaduan	25	25	100	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3	3	100	20
3	Penyediaan permakanan	18	18	100	20
4	Penyediaan Sandang	7	7	100	20
5	Penyediaan perbekalan Kesehatan	19	19	100	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	100	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	25	25	100	20
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	15	15	100	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	25	25	100	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12	12	100	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	20
12	Layanan rujukan	5	5	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	77	77	100	80
		Penerima Pelayanan Dasar			Indeks Pencapaian
		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu		

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Barang/Jasa yang dibutuhkan	Barang/Jasa yang tersedia	Persentase (4:3 x 100%)	Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Layanan data dan pengaduan	25	25	100	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3	3	100	20
3	Penyediaan permakanan	8	8	100	20
4	Penyediaan Sandang	77	77	100	20
5	Penyediaan alat bantu	36	36	100	20
6	Penyediaan perbekalan Kesehatan	19	19	100	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	100	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	26	26	100	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	10	10	100	20
10	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	5	5	100	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	12	12	100	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	100	20
13	Layanan rujukan	5	5	100	20

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan Pengemis di luar panti	60	60	100	80

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Layanan data dan pengaduan	62	62	100	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3	3	100	20
3	Penyediaan permakanan	60	60	100	20
4	Penyediaan sandang	60	60	100	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	19	19	100	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	100	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	25	25	100	20
8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan/Atau Kartu Identitas Anak	21	21	100	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan	25	25	100	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	21	21	100	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	41	41	100	20
12	Layanan rujukan	12	12	100	20
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban	314	314	100	80

No.	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia		
1	2	3	4	5	6
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20
1	Penyediaan permakanaan	157	157	100	20
2	Penyediaan sandang	157	157	100	20
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100	20
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	157	157	100	20
5	Pelayanan dukungan Psikososial	30	30	100	20

Tabel 4.6.5
Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna
	IP Total	100	Tuntas Paripurna

(Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo, 2024)

Keterangan:

Kategori Nilai Indeks Pencapaian SPM (IP SPM)

- 100 : Tuntas Paripurna
- 90 – 99 : Tuntas Utama
- 80 – 89 : Tuntas Madya
- 70 – 79 : Tuntas Pratama
- 60 – 69 : Tuntas Muda
- < 60 : Belum Tuntas

4.6.6. Kendala Yang Dihadapi

Hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal, serta solusi penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.6.6
Hambatan dan Tantangan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Internal	Kurangnya Sumber Daya Manusia terlatih terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya dalam upaya penjangkauan pemerlu layanan sosial	1. Pemberdayaan tenaga pilar sosial 2. Mengadakan kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam penanganan PMKS.
2		Belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).	Perencanaan anggaran untuk pembangunan shelter.
3		Sebagian kegiatan belum ada data sasaran berdasarkan pendataan karena data sasaran sifatnya tentative berdasarkan permohonan dan laporan.	Menggunakan data estimasi yang dilakukan perhitungan oleh pemegang program berdasarkan jumlah anggaran yang tersedia.

Dari data-data diatas, dapat dilihat secara keseluruhan Nilai Indeks Pencapaian (IP) Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 yaitu 99,71%.

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1. Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.1
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	4,886,777,000
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	243.900.000
		a. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	210.800.000
		b. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada	33.900.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	4.642.877.000
		i. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2.765.000.000
		ii. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	680.000.000
		iii. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	1.197.877.000
2	Pendidikan Dasar	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	50.477.400.440
		Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	32.819.765.440
		Penyediaan layanan Pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	32.819.765.440
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	17.657.635.000
		a. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2.016.766.000
		b. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	15.640.869.000
3	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	7,865,000,000
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	7,865,000,000
		Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan Pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	7,865,000,000

4.7.2. Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.2

Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Top of Form
			1.161.208.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan	1.161.208.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.161.208.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	620.491.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	620.491.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	620.491.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	224.261.695
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	224.261.695
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	224.261.695
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.000.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	100.000.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100.000.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	542.557.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	542.557.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	542.557.000
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	137.000.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	137.000.000
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	115.000.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	115.000.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	115.000.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.000.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	60.000.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60.000.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	582.950.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	582.950.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	582.950.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	98.400.000
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	98.400.000
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	98.400.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	1.415.036.240

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Tuberkulosis	Masyarakat	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	1.415.036.240
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.415.036.240
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	468.526.800
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	468.526.800
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	468.526.800

4.7.3. Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.3

Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	15.623.264.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	15.623.264.000
		a. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	195.000.000
		b. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	15.428.264.000
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.501.497.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan	19.501.497.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		a. Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	225.000.000
		b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.945.000.000
		c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000
		d. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	17.181.497.000
		e. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.000.000

4.7.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.4
Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di Kabupaten	Program Pengembangan Perumahan	511.500.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	511.500.000
		a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	225.000.000
		b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	286.500.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Program Pengembangan Perumahan	100.000.000
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000
		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000

4.7.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.5

Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3,859,438,627
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.690.461.000
		a. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	2.461.410.000
		b. Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	25.000.000
		c. Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	204.051.000
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.168.977.627
		a. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	25.000.000
		b. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	442.200.000
		c. Sub Kegiatan Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	701.777.627
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	60.000.000
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	60.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	60.000.000
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	505.000.000
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan	505.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
	terhadap Bencana	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		b. Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10.000.000
		c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	85.000.000
		d. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	70.000.000
		e. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	30.000.000
		f. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	210.000.000
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20.000.000
		Koordinasi penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	Program Penanggulangan Bencana	810.000.000
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	810.000.000
		a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	500.000.000
		b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000
		c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan penyelamatan Non Kebakaran	230.000.000
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	155,000,000
		a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	80,000,000
		b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	75,000,000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25,000,000
		Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	25,000,000
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	50,000,000
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam	25,000,000	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
		Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
		b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25,000,000

4.7.6. URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan dalam penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.7.6

Program dan Kegiatan Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	830.000.000
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	705.000.000
		a. Penyediaan Permakanan	70.000.000
		b. Penyediaan Sandang	15.000.000
		c. Penyediaan Alat Bantu	150.000.000
		d. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	35.000.000
		e. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	100.000.000
		f. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	140.000.000
		g. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000
		h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	75.000.000
		i. Pemberian Layanan Rujukan	90.000.000
2	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupaten	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	125.000.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	125.000.000
		a. Penyediaan Makanan	70.000.000
		b. Penyediaan Sandang	25.000.000
		c. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	15.000.000
		d. Pelayanan Dukungan Psikososial	15.000.000

BAB V PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 dikemas dalam arah kebijakan yang ditujukan untuk "Penguatan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah" yang merupakan perencanaan ketiga dalam periode RPJMD 2021-2026 sekaligus sebagai tahap implementasi RPJPD Kabupaten Wonosobo tahun 2005-2025 Tahap Keempat (2021-2025) yaitu "Pengembangan Kegiatan Pembangunan Di Semua Bidang, Dengan Arah Kebijakan Pada Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Output Yang Berupa Pelayanan Publik Dan Produksi Daerah".

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional, dengan capaian sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan, dari 70,18 di tahun 2023, menjadi 70,63 di tahun 2024;
- Angka kemiskinan mengalami penurunan dari 15,58% di tahun 2023, menjadi 15,28% di tahun 2024;
- Angka pengangguran yang pada tahun 2023 sebesar 4,95%, mengalami penurunan menjadi 4,02% di tahun 2024;
- Pertumbuhan Ekonomi dari sebesar 4,3% di tahun 2023, mengalami peningkatan menjadi 5,36% di tahun 2024;
- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Wonosobo meningkat dari 25,65 Juta Rupiah di tahun 2023 menjadi 27,19 Juta Rupiah di tahun 2024; dan
- ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Rasio menunjukkan perbaikan, dari 0,356 pada tahun 2023 menjadi 0,334 pada tahun 2024.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara optimal. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan ini merupakan sinergi dari efisiensi serta efektivitas pembangunan dari seluruh komponen pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan di Wonosobo. Di sisi lain, masih ada beberapa indikator kinerja yang belum mampu tercapai secara maksimal, tentunya menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk bekerja lebih keras lagi. Keberhasilan maupun kekurangan yang ada merupakan bentuk evaluasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Wonosobo yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Dari berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada Tahun 2024, tidak lepas dari partisipasi semua komponen pemerintahan daerah dengan didukung oleh APBD dan sektor pendukung lainnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo mengapresiasi segala bentuk dukungan, masukan, dan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Wonosobo. Keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat terus ditingkatkan agar Kabupaten Wonosobo semakin maju dan sejahtera.

Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Wonosobo semakin maksimal. Oleh karena itu, diharapkan adanya sinergi dan kerja sama yang semakin erat antara seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.

Demikian penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, dengan harapan semoga kinerja pembangunan di Kabupaten Wonosobo semakin baik dan memiliki manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan, dan petunjuk-Nya kepada kita semua untuk mewujudkan visi "**Terwujudnya Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera.**"



wonosobo
the soul of java

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO